

JURNAL SOSIOLOGI
DILEMA
Dialektika Masyarakat

Vol 27 No. 2 Tahun 2011
Terbit atas SK Rektor No. 1857/PT.40.H.3/I/88
ISSN : 0215 - 9635

Dewan Penyunting :
Dr. Drajat Trikartono, M.Si
Prof. Dr. RB Sumanto, MA

Penyunting Ahli :
Drs. Yulius Slamet, MSc. PhD
Drs. Jefta Leibo, SU
Dr. Mahendra Wijaya, M.Si

Penyunting Pelaksana :
Dra. Rahesli Humsona, M.Si
Eva Agustinawati, S.Sos, M.Si

Pelaksana Tata Usaha :
Sugiyanto

Harga langganan untuk satu tahun (2 kali terbit)
April dan Oktober
Sudah termasuk ongkos kirim adalah :
Pulau Jawa = Rp. 25.000,- dan Luar Pulau Jawa = Rp. 30.000,-

Sekretariat Redaksi :
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jl. Ir. Sutami 36 A telp (0271) 648379

JURNAL SOSIOLOGI

DILEMA

Dialektika Masyarakat

- Ahmad Zuber
**KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN:
STUDI KASUS DI DESA SANGGANG, SUKOHARJO** 95-110
- Akhmad Ramdhon
**DINAMIKA KOTA SURAKARTA
: Gerak Satu Dekade Pelaksanaan Otonomi Daerah** 111-118
- Bagus Haryono
**CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS :
SEBUAH PENGANTAR BAGI SOSIOLOGI** 119-128
- Eva Agustinawati dan Siany Indria Liestyasari
**KEMISKINAN BERPERSPEKTIF GENDER
DI KOTA SURAKARTA** 129-138
- R.A Anggraeni Notosrijoedono
PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI PASCA BENCANA 139-148
- Rubangi Al Hasan
PERSPEKTIF GENDER DALAM PENELITIAN KEHUTANAN 149-158
- Siti Zunariyah
**PENGEMBANGAN INSTITUSI
PENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN** 159-168
- Sri Yuliani
**WACANA TUBUH PEREMPUAN DI DUNIA MEDIA :
TINJAUAN PERSPEKTIF GENDER** 169-180
- Ambar Sari Dewi
**"RADIO KOMUNITAS DAN DISASTER RISK REDUCTION :
STUDI KASUS RADIO LINTAS MERAPI DI KLATEN JAWA TENGAH
DAN RADIO ANGKRINGAN DI YOGYAKARTA** 181-188

KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN: STUDI KASUS DI DESA SANGGANG, SUKOHARJO

Ahmad Zuber
Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

This paper aims to analyse the types of poverty found in Sanggang village, Bulu, Sukoharjo District, the governmental and non-governmental organisations in alleviating the poverty in Sanggang village. They are cultural, structural and natural poverties. The cultural poverty can be seen from the minimum participation of people in poverty in the social organisations, either in the community, in sub-district or in district level. They have relatively large number children. They tend to develop a broad family where the husband, wife, children and parents live in one family. They have the long working hour but their income is relatively low.

The poor people have made various efforts to alleviate their poverty, including cultivating the barren land for planting cassava or peanuts, and looking for wood in the forest for substituting oil for fire. The government and private sectors have also done some efforts by making some programs. Their efforts, however, are not effective enough to tackle the problems of the rural poverty in Sanggang village. The programs, nevertheless, have been able to create happiness of the rural families, especially those suffering poverty.

Keywords: *Cultural poverty, Structural poverty, Conjunctural poverty, Natural poverty, Poverty controlling program*

A. Pengantar

Dewasa ini masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya. Masalah kemiskinan tidak hanya melanda masyarakat Asia, seperti Indonesia, tetapi masalah kemiskinan juga melanda seluruh masyarakat dunia, termasuk Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adi kuasa (*super power*). Di Amerika Serikat, sebagian besar kekayaan (68%) dimiliki oleh hanya 10% penduduk bangsa tersebut. Sedangkan 40% dari kekayaan negara Amerika Serikat ini hanya dimiliki oleh 1% penduduk (Sumber: Western, 2000, dalam Henslin, 2007: 207).

Secara umum, realitas kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2006, jumlah penduduk miskin Sukoharjo sebanyak 239.882 jiwa (28,93%) dari jumlah total penduduk 829.054 jiwa. Kemudian pada tahun 2007 angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo meningkat menjadi 260.356 jiwa (30,98%) dari jumlah penduduk 840.477 jiwa. Kemudian ketika tahun 2008 dibuka kesempatan untuk mengisi kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), jumlah KK miskin meningkat dari 80.170 KK miskin pada tahun 2007, menjadi 97.333 KK (Solopos, 14 Juli 2008: 1 dan 8).

Kondisi di atas bertolakbelakang dengan realitas yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sampai saat ini Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Setiap tahun Kabupaten Suko-harjo yang berslogan “Sukoharjo Mak-mur” ini selalu surplus beras. Bahkan produksi padi selalu melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kabupaten Sukoharjo. Sebagai contoh, pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mematok target produksi padi sebanyak 292.035 ton, namun realisasinya menjadi 322.426 ton. Kemudian pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan 305.750 ton, dan terealisasi 319.720 ton (Solopos, 14 Juli 2008: 1 dan 8

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “Kemiskinan Masyarakat Pedesaan Sukoharjo (Studi Kasus di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah).

B. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan dipandang sebagai keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kekurangan. Orang disebut miskin apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-harinya. Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan kedalam dua bentuk, pertama kemiskinan absolut, dan kedua, kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut menjelaskan bahwa seorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Sedangkan kemiskinan relatif menjelaskan bahwa seorang atau sekelompok orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin apabila membandingkan dengan orang atau kelompok lain.

Secara konseptual, kemiskinan itu sendiri dapat dijelaskan melalui konsep-konsep seperti kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, kemiskinan kongjung-tural, dan kemiskinan natural.

Istilah kultur atau budaya dipahami sebagai kata yang memiliki banyak arti. Tylor mendefinisikan budaya sebagai unsur-unsur seperti pengetahuan, seni, kepercayaan, hukum, moralitas, kebiasaan, dan semua sikap dan kebiasaan hidup dalam suatu masyarakat (dalam Coiffier *et. al*, 1990: 107). Menurut Coiffier dkk. (1990: 107), kata budaya menunjuk pada perilaku yang menjadi sifat khusus suatu masyarakat. Dalam arti yang dapat membedakan dengan masyarakat lainnya. Misalnya masyarakat Prancis secara budaya berbeda dengan masyarakat Indonesia, karena masing-masing masyarakat tersebut mempunyai unit budaya yang berbeda. Tiap-tiap masyarakat dari suatu negara mempunyai bentuk sikap, perilaku, teknik produksi dan distribusi ekonomi, literatur, seni, pengetahuan dan juga pertukangan yang berbeda.

Menurut Oscar Lewis (1993: 6-20), terdapat kesamaan bentuk hubungan sosial di antara mereka (dalam suatu keluarga miskin dengan tetangganya). Lebih lanjut menurut Oscar Lewis (1969: 801), budaya kemiskinan ini diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Sebuah karakteristik yang dominan dari budaya kemiskinan ini adalah orang-orang miskin itu cenderung putus asa, apatis, dan tidak berdaya. Begitu juga secara umum ada kesamaan dalam struktur keluarga, hubungan antar individu, sistem nilai, dan cara pengeluaran uang. Mereka memperlihatkan adanya kesamaan adaptasi dalam menghadapi masalah-masalah yang umum.

Kemiskinan struktural berbeda dengan kemiskinan individual. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh sekelompok masyarakat. Suatu kelom-

pok masyarakat hidup dalam keadaan miskin karena mereka tidak memiliki kesempatan yang baik dalam struktur masyarakat. Mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari sebuah struktur strategis dalam masyarakat. Apalagi apabila suatu kelompok masyarakat tersebut dieksploitasi oleh seseorang atau sekelompok masyarakat lainnya.

Andre Gunder Frank (1968: 19) dengan teorinya ketergantungan sosial, menemukan suatu penjelasan bahwa orang-orang miskin akan cenderung semakin miskin karena telah melakukan kontak hubungan dengan orang-orang kaya. Secara ringkas teori ketergantungan sosial Andre Gunder Frank (1968: 19) menjelaskan bahwa secara historis pembangunan dari sistem kapitalisme telah mengakibatkan keterbelakangan pada negara-negara satelit pinggiran. Negara-negara pusat metropolitan cenderung mengeruk keuntungan surplus ekonomi dari negara-negara satelit pinggiran. Proses pengambilan keuntungan seperti ini masih terjadi hingga sekarang ini. Sebagai contoh, kasus di Chili dimana Andre Gunder Frank (1968: 19) melakukan analisa. Proses kapitalisme yang muncul pada beberapa abad yang lalu hingga sekarang ini telah mengakibatkan keterbelakangan.

Dalam tulisan ini ide pemikiran tentang kemiskinan kongjungtural berasal dari Armel Huet (2003: 1-5). Menurut Huet, kemiskinan kongjungtural menjelaskan melalui lamanya seseorang atau sekelompok orang dalam proses pencarian pekerjaan yang menyebabkan seseorang/sekelompok orang tersebut menjadi miskin.

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan sumber daya alam yang tidak mampu mendukung untuk hidup secara normal. Keadaan alam terlalu gersang, tidak cukup hujan, sulit untuk ditanami tanaman pangan. Keadaan sumber daya alam seperti ini mendorong manusia untuk hidup dalam

kemiskinan. Berkaitan dengan kemiskinan natural ini, Sunarso (dalam Mardimin, 2000) menjelaskan bahwa kemiskinan natural atau kemiskinan situasional terjadi jika seorang atau sekelompok orang tinggal di daerah-daerah yang kurang menguntungkan yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Dengan kata lain, kemiskinan natural itu terjadi sebagai akibat yang kurang menguntungkan seperti kemarau panjang, tanah tandus, gagal panen, atau bencana alam lainnya.

Kemiskinan natural ini diperparah dengan letak lokasi/ daerah yang jauh dari pusat perkotaan dan rendahnya tingkat teknologi yang ada dalam masyarakat. Jauhnya lokasi dari pusat perkotaan ini sering kali menyebabkan daerah yang bersangkutan kurang mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah setempat. Para ahli ilmu sosial memasukkan jauhnya lokasi dari pusat perkotaan sebagai faktor geografis. Rendahnya tingkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat pedalaman yang sumber daya alamnya kurang menguntungkan memperparah kondisi kemiskinan mereka. Tingkat teknologi ini antara lain berupa jaringan listrik, telepon, mesin pembajak tanah

C. Masyarakat Miskin Pedesaan

Berikut ini akan dipaparkan beberapa karakteristik masyarakat miskin pedesaan.

1. Karakteristik Umum Masyarakat Miskin Pedesaan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di Desa Sanggang menunjukkan bahwa yang menjadi karakteristik utama masyarakat miskin pedesaan itu adalah tingkat pendapatannya tidak menentu dan jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi delapan kebutuhan dasar sebagaimana dikemukakan oleh Radwan dan Alfthan (dalam Sumardi dan Evers, 1985), yang

meliputi (1) makanan; (2) pakaian; (3) perumahan; (4) kesehatan; (5) pendidikan; (6) air dan sanitasi; (7) transportasi; dan (8) partisipasi. Ketidak-menentukan jumlah pendapatan tiap bulannya bahkan dalam jumlah yang sangat kecil menjadikan seseorang atau keluarga miskin sangat kesulitan dalam memenuhi 8 kebutuhan dasar hidupnya.

2. Karakteristik Kultural

a. Tidak adanya keterlibatan dalam organisasi sosial politik

Pada umumnya keluarga miskin pedesaan Sanggang tidak ikut aktif dalam organisasi sosial politik, seperti sebagai pengurus ataupun anggota perangkat desa ataupun partai politik. Meskipun demikian ada juga satu keluarga yang menduduki jabatan sebagai Ketua RT dan pengurus ranting PDIP.

b. Kebiasaan mempunyai banyak anak dan dalam keluarga luas

Keluarga miskin pedesaan umumnya mempunyai banyak anak. Disamping itu anggota keluarga mereka cukup besar. Seringkali ditemukan adanya keluarga luas, artinya satu keluarga dihuni oleh orang tua mereka, anak yang sudah berkeluarga dan seorang kakek atau nenek.

c. Keluarga miskin pedesaan lahan kering pekerja keras

Keadaan yang cukup bertolak belakang dengan teori-teori yang ada selama ini (antara lain Lewis, 1959) yaitu bahwasannya keluarga miskin cenderung malas bekerja. pada umumnya keluarga miskin pedesaan di Desa Sanggang termasuk orang-orang pekerja keras. Mereka bekerja mulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Oleh karena

itu salah satu karakteristik yang sangat menonjol lainnya dari kehidupan keluarga miskin pedesaan adalah jam kerja keluarga miskin pedesaan panjang namun penghasilan mereka sedikit. Ini sangat terkait dengan faktor struktural, dimana jenis pekerjaan sangat menentukan miskin dan tidaknya seseorang.

d. Anak dan istri mengembangkan budaya merantau

Keadaan menonjol anak-anak mereka yang laki-laki pergi merantau terutama ke Jakarta ikut membantu orang untuk berjualan bakso. Sedangkan ibu rumah tangga berjualan jamu. Mereka memanfaatkan jaringan di luar daerah, seperti di Jakarta yang sudah ada sebelumnya.

f. Keinginan yang tinggi untuk memperbaiki rumah, jika ada uang

Satu karakteristik yang sangat menonjol dari kehidupan keluarga miskin pedesaan Sanggang, yang belum dikaji oleh Lewis (1959), yaitu menjadikan prioritas utama memperbaiki rumah, jika mendapatkan uang cukup banyak. Skala prioritas ini barangkali akan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kaya, dimana masyarakat kaya kalau mempunyai uang cukup banyak prioritas utamanya adalah ditabung atau untuk investasi. Masyarakat kaya inilah kalau dalam kajian Harold dan Domar (dalam Kanto, 2006) dipandang sebagai ciri-ciri masyarakat modern.

g. Keadaan rumah keluarga miskin pedesaan sangat sederhana

Keadaan rumah keluarga miskin pedesaan Sanggang umumnya cukup sangat sederhana. Rumah

berukuran 10 m kali 10 m (100 m²) dengan dinding terbuat dari bambu, dan isi perabot rumah yang masih sangat sederhana.

3. Karakteristik Struktural

a. Pada umumnya jenis pekerjaan sebagai petani

Jenis pekerjaan keluarga miskin pedesaan Sanggang adalah rata-rata sebagai petani/ buruh tani yang lebih menitikberatkan pada keseimbangan hidup dalam bermasyarakat. Sebagai petani seringkali mengalami kerugian dari hasil panen yang diperolehnya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lahan, bibit dan pemeliharaan tanaman seringkali tidak sepadan dengan hasil panen yang didapatkan. Lebih-lebih masyarakat pedesaan Sanggang ini adalah pada umumnya sebagai petani Ubi Singkong, sehingga hasil panen yang mereka dapatkan sangat tidak menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

b. Kebijakan pendidikan dirasa sangat mahal

Keluarga miskin pedesaan Sanggang merasa bahwa pendidikan dirasa sangat mahal. Mahalnya dunia pendidikan ini sering kali membuat anak-anak mereka harus keluar dari sekolah (terutama ketika sudah memasuki sekolah menengah pertama).

c. Tidak adanya taman desa

Di masyarakat miskin pedesaan Sanggang tidak ditemukan taman desa yang fungsinya sangat penting sebagai paru-paru desa. Paru-paru desa sebagai penyedia oksigen yang sangat penting untuk kesehatan. Disamping itu taman desa sangat bermanfaat untuk menikmati wak-

tu luang/ santai ataupun untuk arena olah raga. Kebiasaan tidak adanya taman desa seperti ini hampir ditemukan di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia.

d. Tidak merasa dibayar murah pekerjaan oleh majikan

Dari sisi kemiskinan struktural, keluarga miskin pedesaan Sanggang tidak dapat melihat adanya terlalu murah bayaran upah yang mereka terima. Keluarga miskin sudah sangat senang apabila ada pekerjaan yang mereka dapatkan dari orang-orang kaya. Permasalahan yang muncul itu justru sulitnya pekerjaan yang dapat diperoleh dari orang-orang kaya. Oleh karena itu mereka tidak setuju untuk menerima pernyataan bahwa mereka menjadi miskin karena melakukan hubungan kerja dengan orang-orang kaya.

Ini bertentangan dengan teori konflik (Mosca, 1896, Dahrendorf, 1959) bahwa struktur kekuasaan merupakan sumber konflik, dan teori ketrgantungan (Andre Gunder Frank, 1968), bahwa orang, keluarga, atau negara menjadi miskin karena mereka melakukan hubungan dengan orang atau negara kaya.. Masyarakat miskin pedesaan lebih menekankan pada keseimbangan (teori struktural fungsional, Moore dan Davis, Robert K. Merton, 1945) untuk berlangsungnya sebuah sistem kemasyarakatan.

e. Kaum perempuan terpinggirkan dalam proses pembuatan keputusan politik

Aspek struktural yang lain, terlihat bahwa kaum perempuan masyarakat pedesaan Sanggang masih sangat terpinggirkan dalam proses pembuatan keputusan baik di

tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Namun di sisi lain kaum perempuan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam kehidupan keluarga miskin dalam menanganikan ketidak-cukupan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

4. Karakteristik Kemiskinan Kongjungtural Masyarakat Miskin Pedesaan

Dari sisi kemiskinan kongjungtural, pada umumnya keluarga miskin pedesaan Sanggang tidak memiliki cita-cita yang tinggi berkaitan dengan pekerjaan di sektor formal. Keluarga miskin pedesaan Sanggang ketika masih muda cenderung mencita-citakan jenis pekerjaan informal, seperti tukang batu bata, berdagang bakso, dan juga berdagang mi ayam. Jenis pekerjaan informal tersebut tidak memerlukan kualifikasi pendidikan formal yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan di masyarakat pedesaan Sanggang bahwa jenis-jenis pekerjaan informal di atas sangat rentan sekali. Artinya walaupun ada yang dibidang cukup berhasil jumlahnya relatif sedikit dan biasanya tidak tahan sampai di usia tua.

5. Karakteristik Kemiskinan Natural Masyarakat Miskin Pedesaan

Kemiskinan natural yang dialami oleh masyarakat miskin pedesaan Sanggang dapat dilihat dari ketidakmampuan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan normal keluarga miskin. Alam tidak mampu untuk ditanami tanaman pangan khususnya padi dan jagung, karena struktur tanah yang kering dan tanah berada pada dataran tinggi. Di samping itu faktor usia yang tua menjadikan keluarga miskin yang bersangkutan tidak mampu bekerja.

D. Upaya Masyarakat Miskin Pedesaan, Pemerintah dan Swasta dalam Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat Pedesaan

Upaya masyarakat miskin sendiri untuk keluar dari permasalahan kemiskinan adalah sudah cukup besar. Mereka telah melakukan berbagai usaha untuk keluar dari permasalahan kemiskinan antara lain meliputi: mengolah lahan tegal untuk ditanami singkong ataupun kacang tanah, mencari kayu di hutan, sebagai buruh penebang kayu, membuat arang, membuat tape singkong dan migrasi ke kota-kota besar untuk berjualan, serta ada yang beternak sapi/ kambing.

Upaya pemerintah dan swasta dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Masyarakat miskin pedesaan Sanggang masih merasakan sedikit sekali peningkatan kesejahteraan hidupnya melalui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan swasta ini. Meskipun demikian upaya pemerintah dan swasta dalam mengurangi kemiskinan masyarakat pedesaan masih terus diperlukan dan dikembangkan sampai permasalahan kemiskinan itu sirna dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian di masyarakat pedesaan Sanggang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan seseorang atau keluarga. Oleh karena itu untuk meningkatkan jenjang pendidikan keluarga miskin pedesaan, pemerintah perlu membuat kebijakan sekolah gratis dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas bagi keluarga miskin pedesaan.

Melihat kenyataan bahwa upaya pemerintah dan swasta dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan masyarakat

pedesaan Sanggang masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Masyarakat miskin pedesaan Sanggang masih merasakan sedikit sekali peningkatan kesejahteraan hidupnya melalui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh diri masyarakat, pemerintah dan swasta ini. Namun demikian berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta telah mampu membuat kebahagiaan tersendiri di hati para keluarga miskin pedesaan. Oleh karena itu pemerintah dan swasta perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas atas semua program-program anti kemiskinan yang telah ada selama ini.

E. Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan

Masyarakat miskin pedesaan Sanggang masih menemukan banyak kendala yang bersifat kultural, struktural dan natural dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang mereka alami. Sebagian besar aspek-aspek yang terdapat pada kemiskinan kultural, struktural, dan natural cenderung sangat tidak mendukung untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yang mereka alami. Sehingga hal ini menyebabkan bahwa kemiskinan itu selalu direproduksi dari generasi ke generasi.

Paling tidak ada tiga model yang akan ditawarkan dalam artikel ini untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang.

1. Model Sistemik

- a. Model sistemik kemiskinan kultural dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan
Pembangunan masyarakat pedesaan mencakup komponen-komponen: masukan, proses, keluaran dan pengaruh. Masukan pembangunan masyarakat pedesaan meliputi lingkungan, sarana, dan bahan mentah.

Pada umumnya di masyarakat pedesaan Sanggang, semua aspek yang ada dalam model sistemik kemiskinan kultural bersifat netral. Komponen yang sangat mendukung ataupun yang sangat tidak mendukung dalam penanggulangan kemiskinan pedesaan sama kuatnya. Artinya adalah bahwa untuk aspek kultural ini belum bisa signifikan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat pedesaan. Hal ini berarti masyarakat pedesaan Sanggang masih menemukan kesulitan yang cukup tinggi untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil temuan dengan model sistemik ini, maka model penanggulangan kemiskinan kultural pedesaan Sanggang adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga miskin pedesaan perlu mempertahankan budaya kerja keras untuk bisa keluar dari permasalahan kemiskinan.
- 2) Budaya merantau untuk bekerja adalah budaya yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat miskin pedesaan.
- 3) Budaya kondangan, sambutan bangun rumah dan kerja bakti bangun jalan perlu dipelihara di dalam masyarakat miskin pedesaan. Budaya-budaya ini mampun menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat miskin pedesaan.
- 4) Budaya pemeliharaan ternak perlu terus ditingkatkan di dalam masyarakat miskin pedesaan. Budaya ini dapat memberikan nilai tambah sosial

dan ekonomi bagi masyarakat miskin pedesaan.

- 5) Masyarakat miskin pedesaan perlu meningkatkan keahlian/ketrampilan khususnya melalui pelatihan atau jenjang pendidikan.
- 6) Masyarakat miskin pedesaan perlu meningkatkan jiwa kewirausahaan, seperti jiwa berdagang dan membuat sentra mebel di desanya.

b. Model Sistemik Kemiskinan Struktural dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan Di masyarakat pedesaan Sanggang, aspek-aspek dari kemiskinan struktural tersebut meliputi: aspek sebagai petani, sempitnya kepemilikan lahan pertanian, membayar pajak selaku warga masyarakat, adanya iuran sosial bagi masyarakat, upah rendah, tidak menjadi perangkat desa, jauh dari pusat kota, wilayah pedesaan, jalan/transportasi desa yang cukup baik, tidak adanya alat transportasi umum yang melintasi Desa Sanggang, mahal biaya pendidikan, adanya program-program kebijakan pemerintah seperti BLT, Raskin, PNPM, dan adanya UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Secara umum semua aspek dalam kemiskinan struktural ini masih di kategori tidak mendukung untuk keluar dari permasalahan kemiskinan. Artinya adalah bahwa untuk aspek struktural ini belum bisa signifikan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di masya-

rakat pedesaan Sanggang. Hal ini berarti masyarakat pedesaan Sanggang masih menemukan banyak kesulitan secara struktural untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil temuan dengan model sistemik ini, maka model penanggulangan kemiskinan struktural pedesaan Sanggang adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan/transportasi desa untuk memperlancar aktivitas perekonomian dan sosial.
- 2) Petani perlu mempunyai pekerjaan tambahan/ sampingan seperti berdagang, memelihara hewan ternak dan lainnya.
- 3) Program-program pemerintah anti kemiskinan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
- 4) Masyarakat miskin pedesaan perlu melestarikan kewajiban membayar pajak untuk kepentingan pembangunan.
- 5) Masyarakat miskin perlu melestarikan bayar iuran sosial untuk meringankan beban penderitaan tetangga.
- 6) Masyarakat miskin pedesaan perlu melakukan intensifikasi pengolahan lahan pertanian.
- 7) Pemerintah perlu membuat kebijakan "wajib belajar 12 tahun" dengan dana dukungan dari pemerintah khusus bagi keluarga miskin. Program ini untuk meningkatkan perhatian masyarakat miskin pedesaan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

c. Model Sistemik Kemiskinan Natural dalam Penanggulangan

Kemiskinan Masyarakat Pedesaan

Di masyarakat pedesaan Sanggang, aspek-aspek dari kemiskinan natural tersebut meliputi: lahan kering, kesulitan air, tanaman padi sulit tumbuh, tanaman jagung sulit tumbuh, tanaman ketela pohon tumbuh subur, tanaman kacang tanah tumbuh subur, Sayuran kacang panjang dapat tumbuh, banyak hama tanaman (monyet, dan garangan), pohon jati tumbuh subur, pohon mahoni tumbuh subur, dan teknologi pertanian rendah.

Secara umum semua aspek dalam kemiskinan natural ini masih di kategori tidak mendukung untuk keluar dari permasalahan kemiskinan. Artinya adalah bahwa untuk aspek natural ini belum bisa signifikan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat pedesaan Sanggang. Hal ini berarti masyarakat pedesaan Sanggang masih menemukan banyak kesulitan secara natural untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil temuan dengan model sistemik ini, maka model penanggulangan kemiskinan natural pedesaan Sanggang adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat miskin pedesaan tetap melestarikan penanaman singkong/ ketela pohon sebagai alternatif penyedia bahan makanan pokok.
 - 2) Masyarakat miskin pedesaan tetap melestarikan penanaman tanaman kacang tanah, sayuran kacang panjang sebagai penyedia makanan dan sayuran.
 - 3) Masyarakat miskin pedesaan tetap melestarikan penanaman pohon jati dan mahoni sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
 - 4) Masyarakat miskin pedesaan perlu memikirkan alih fungsi lahan kering dari penanaman tanaman pangan ke fungsi yang lain, seperti untuk tempat wisata, vila tempat peristirahan dan lainnya.
 - 5) Masyarakat miskin pedesaan dan pemerintah desa di daerah kesulitan air perlu memikirkan jalan keluar untuk mendapatkan air bersih untuk menopang kehidupan manusia.
 - 6) Masyarakat miskin pedesaan di lahan kering yang kesulitan menanam tanaman padi perlu dicarikan sistem penanganan yang lain, supaya tanaman padi tetap tumbuh, seperti dengan sistem gogo. Apabila tidak memungkinkan maka perlu penggantian tanaman padi dengan tanaman yang lain seperti ketela pohon, tebu dan lainnya.
 - 7) Masyarakat miskin pedesaan dan pemerintah desa yang menghadapi banyak hama tanaman perlu memikirkan cara-cara penanggulangannya secara baik.
2. Model Berbasis Partisipasi Masyarakat Penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang, perlu melibatkan segenap komponen masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut dibutuhkan tidak hanya dalam pelaksanaan program namun sejak diagnosis masalah, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi program.

Dengan kata lain suara masyarakat miskin juga menjadi titik perhatian untuk menanggulangi kemiskinan dalam arti memperhatikan kebutuhan, keinginan, harapan, cita-cita, maupun kendala yang dihadapi.

Pelibatan perguruan tinggi, organisasi-organisasi kemasyarakatan (RT, RW, PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat formal maupun informal dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan sangat berarti dan memegang kunci keberhasilan baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program.

Secara umum di masyarakat pedesaan Sanggang, tingkat partisipasi aktor terutama masyarakat miskin dalam pembangunan secara keseluruhan masih dalam kategori rendah. Hal ini berarti bahwa dengan adanya pelaku pembangunan yang kebanyakan masih sangat rendah tingkat partisipasinya dari diagnosis permasalahan kemiskinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, menyebabkan permasalahan kemiskinan tidak dapat ditangani/dipecahkan dengan baik.

Dengan demikian Bisa jadi persepsi pelaku pembangunan aparat pemerintah mengemukakan berhasil, akan tetapi pelaku pembangunan dari masyarakat miskin, tokoh informal, LSM dan lainnya akan mengemukakan tidak berhasil, karena memang terdapat perbedaan skala prioritas terhadap permasalahan kemiskinan yang akan ditanggulangi menurut aparat pemerintah di satu sisi, dan menurut masyarakat miskin di sisi lain.

Berdasarkan hasil temuan dengan model berbasis partisipasi masyarakat ini, maka model penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat pedesaan Sanggang adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi aparat pemerintah dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga pusat perlu dipertahankan diperbaiki tingkat kualitasnya dalam program penanggulangan kemiskinan.
- b. Masyarakat miskin pedesaan, tokoh informal, ormas, LSM, dan perguruan tinggi perlu ditingkatkan partisipasinya dalam program penanggulangan kemiskinan di masyarakat miskin pedesaan. Peningkatan partisipasi ini dimulai dari diagnosis permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

3. Model Paul Shaffer

Model ketiga dari penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang, yaitu dengan model Paul Shaffer (2008) yang meliputi pendekatan tujuh modal, yaitu:

- a. Pendekatan Modal Manusia (*Human Capital*), meliputi: peningkatan pendidikan hingga tamat SMU, kesehatan, dan gizi makanan.
- b. Pendekatan Modal Sosial (*Social Capital*), meliputi: organisasi sosial, pertemanan, jaringan kerja, kepercayaan, dan resiprositas.
- c. Pendekatan Modal Ekonomi (*Economic Capital*), meliputi: tanah, tenaga kerja, dan modal (uang, perhiasan dan lain-lain).
- d. Pendekatan Modal Politik (*Political Capital*), meliputi: jaringan formal/ informal terhadap kekuasaan politik.
- e. Pendekatan Modal Budaya (*Cultural Capital*), meliputi: norma, kepercayaan, dan nilai-

nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat.

- f. Pendekatan Modal Paksaan (*Coercive Capital*), meliputi: sumber kekerasan, intimidasi, dan kekuatan untuk menstabilkan norma sosial, dan untuk memelihara hubungan sosial.
- g. Pendekatan Modal Alam (*Natural Capital*), berkaitan dengan kualitas dan kuantitas persediaan sumber daya alam.

Secara umum di masyarakat pedesaan Sanggang, aspek-aspek yang terdapat dalam model Shaffer (2008) masih dalam kategori tidak mendukung dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin pedesaan. Hal ini berarti bahwa masih banyaknya bentuk-bentuk modal yang sangat tidak mendukung dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin pedesaan Sanggang, menyebabkan masyarakat miskin pedesaan Sanggang masih menemukan banyak kesulitan untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil temuan dengan model Paul Shaffer (2008) ini, maka penanggulangan kemiskinan model Paul Shaffer (2008) masyarakat pedesaan Sanggang adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat miskin pedesaan tetap melestarikan dan menjunjung tinggi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.
- b. Masyarakat miskin pedesaan perlu meningkatkan tingkat kesehatannya melalui asupan gizi dan olah raga yang cukup.
- c. Masyarakat miskin pedesaan perlu memelihara dan mempertahankan jaringan kerja informal, pertemanan dan kepercayaan (*trust*) antara sesama manusia.
- d. Masyarakat miskin pedesaan perlu memelihara dan mempertahankan

tingginya nilai-nilai kepercayaan setempat mengenai kerja keras dan ketekunan dalam bekerja, dan tingginya nilai-nilai gotong royong yang ada di masyarakat pedesaan.

- e. Pemerintah perlu mencanangkan program wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat miskin pedesaan dengan dana APBN.
- f. Masyarakat miskin pedesaan perlu mengaktifkan diri dalam organisasi sosial yang besar baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
- g. Masyarakat miskin pedesaan perlu meningkatkan modal ekonomi dengan cara menabung atau berwirausaha.
- h. Masyarakat miskin pedesaan perlu membuka diri untuk membuat jaringan hubungan kepada jajaran politik formal maupun informal.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang dapat berupa kemiskinan kultural, struktural, dan natural. Bentuk kemiskinan kongjungtural tidak ditemukan di masyarakat pedesaan Desa Sanggang, karena masyarakat pedesaan Sanggang umumnya tidak mempunyai cita-cita untuk mendapatkan pekerjaan profesional sesuai dengan yang diinginkan. Kendala utama tidak adanya cita-cita untuk mendapatkan pekerjaan profesional adalah karena tidak dimilikinya pendidikan yang

cukup memadai yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan profesional tersebut.

- b. Kemiskinan kultural masyarakat miskin pedesaan Sanggang dapat berupa ketidakterlibatan dalam organisasi tingkat desa, kecamatan, kota ataupun negara, kebiasaan mempunyai banyak anak, jam kerja panjang namun penghasilan relatif kecil.
- c. Kemiskinan struktural masyarakat miskin pedesaan Sanggang dapat berupa jenis pekerjaan keluarga miskin rata-rata petani/ buruh tani yang lebih menitikberatkan pada keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, sebagai orang desa, dan juga kebijakan pendidikan dirasa terlalu mahal.
- d. Kemiskinan natural masyarakat miskin pedesaan Sanggang dapat dilihat dari ketidakmampuan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan normal keluarga miskin. Alam tidak mampu untuk ditanami tanaman pangan khususnya padi dan jagung, karena lahan yang kering dan tanah berada pada dataran tinggi. Di samping itu faktor usia yang tua menjadikan keluarga miskin yang bersangkutan tidak mampu bekerja.
- e. Upaya masyarakat miskin pedesaan Sanggang, pemerintah dan swasta dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Masyarakat miskin pedesaan Sanggang masih merasakan sedikit sekali peningkatan kesejahteraan hidupnya melalui upaya-upaya yang telah mereka lakukan sendiri, dan juga upaya-upaya yang

telah dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Namun demikian berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta telah mampu membuat kebahagiaan tersendiri di hati para keluarga miskin pedesaan.

- f. Aspek-aspek kultural, struktural, dan natural yang terdapat dalam model penanggulangan sistemik, kemudian aspek-aspek yang terdapat pada model penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat dan Paul Shaffer (2008) cenderung masih sangat lemah, sehingga penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan masih belum menunjukkan hasil yang optimal.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa saran untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin pedesaan Sanggang perlu memelihara budaya kerja keras dan tekun untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- b. Keluarga miskin pedesaan Sanggang perlu meningkatkan jaringan kerja dengan pihak yang ada di perantauan. Hal ini untuk semakin memperluas jaringan usaha di daerah perantauan.
- c. Keluarga miskin pedesaan Sanggang perlu meningkatkan jenjang pendidikan formal untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan hidup. Aspek pendidikan formal yang bisa ditamatkan ini sangat penting untuk melaku-

- kan mobilitas vertikal di dunia kerja. Program peningkatan jenjang pendidikan formal ini akan bisa berhasil dengan baik apabila dibantu pembiayaan oleh pemerintah.
- d. Keluarga miskin pedesaan Sanggang perlu meningkatkan hasil pertaniannya terutama ketela pohon untuk dibuat tape dan permen. Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga jual ketela pohon, dan meningkatkan ketahanan nilai guna ketela pohon tersebut.
- e. Hasil kiriman uang dari keluarga yang merantau di daerah perantauan ditanamkan dalam usaha produktif seperti berdagang, *home industry* tape/ permen, dan lainnya.
- f. Masyarakat miskin pedesaan Sanggang perlu membangun sentra industri mebel dan industri pengelasan besi. Mengingat di desa ini terdapat sentra perkebunan kayu jati dan akasia. Adapun sentra industri pengelasan besi untuk memenuhi kebutuhan baik yang berasal dari dalam dan luar Desa Sanggang.
- g. Perlu dilakukan penyatuan lahan petani dalam bentuk corporate farming yang ditunjang dengan teknologi pengolahan dan manajemen secara baik untuk dapat meningkatkan produktifitas pertanian.
- h. adanya kesadaran terutama bagi orang muslim pedesaan maupun perkotaan untuk memberikan zakat malnya 2,5%, untuk dikelola oleh lembaga profesional guna mengurangi kemiskinan masyarakat pedesaan.
- i. Pemerintah perlu membuat kebijakan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan biaya pemerintah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah umum bagi keluarga miskin.
- j. Pemerintah harus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui model sistemik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara proporsional.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Akhter U., et al. 2007. *The World's Most Deprived: Characteristics and Causes of Extrem Poverty and Hunger*, Washington DC: International Food Policy Research Institute
- Anonim, *Badan Pusat Statistik*, Indonesia, 2001
- Appelbaum, Richard P. 1970. *Theories of Social Change*. Chicago: Markham Publishing Company
- Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia: Ketegantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
- Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, cetakan kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Centre Tricontinental. 2000. *Comment se Construit la Pauvreté* . Paris: l'Harmattan
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*, Penerjemah Pepep Sudrajat. Jakarta: Penerbit LP3ES
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Penerjemah Drs. Susetiawan, S.U. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Departemen dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara, dan SCBD (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project), *Program Pengentasan Kemiskinan dan Monev Program Pengentasan Kemiskinan*, Modul 4, Juni 2007
- Ernayanti, dan Ita Novita. 1996. *Budaya Kemiskinan di Desa Tertinggal di Yogyakarta (Kasus Desa Karang Tengah, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul)*. Jakarta: CV. Bupara Nugraha
- Hanani AR, Nuffil, dkk. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian: Sebuah Pemikiran Baru*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Harriss, John. 1982. *Rural Development: Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*. Great Britain: Anchor Brendon Limited
- Henslin, James M. 1998. *Essentials of Sociology: A Down-to-Earth Approach*, Second Edition. United State of Amerika: Allyn and Bacon, A Viacom Company, Massachusetts
- Hidayat, Syarif I. 2007. *Kemiskinan dalam Perspektif Masyarakat Desa Tertinggal yang Religius (Studi kasus di Desa Kamoning Kabupaten Sampang, Madura)*. Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya
- Horton, Paul B.. Chester L. Hunt. 1984. *Sociology*, Sixth Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Huet, Armel. 2003. *La Pauvreté Conjuncturelle*, Rennes France. tidak diterbitkan
- Jarry, David. Julia Jary. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Great Britain: Harper Collin Publishers
- Johnson, D. Paul. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 2, cet. 2, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Judawan, Hadi. 1997. *Studi Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan serta Pengaruhnya terhadap Pembangunan Keluarga Sejahtera (Kasus di Desa Nglopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur)*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya

- Kanto, Sanggar. "Sampling, Validasi, dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif," *Kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia* (BMPTSI) Wilayah VII Jawa Timur, Surabaya, 1998.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lauer, Robert H. 2003. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lincoln, Yvonna S.. Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publication Inc.
- Macionis, John J. 1995. *Society: the Basic*, 3rd Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Perjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping Mulyarto. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pitomo, Sundoyo. 1985. "Kebutuhan Dasar Kelompok Berpenghasilan Rendah di Kota Jakarta", *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, eds. Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers, cetakan kedua. Jakarta: Rajawali
- Raper, Michael. 2006. *Negara Tanpa Jaminan Sosial: Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*. Jakarta: Penerbit TURC
- Ritzer, George, and Barry Smart, ed.. 2001. *Handbook of Social Theory*. Great Britain: Sage Publications
- Rubin, Herbert J. dan Irene S. Rubin. 2001. *Community Organizing and Development*, Edisi ketiga, USA: The State University of New York Press
- Rustiani, F. dan Maspiyati. 1996. *Usaha Rakyat Dalam Pola Desentralisasi Produksi dan Subkontrak*. Bandung: Yayasan AKATIGA
- Setiawati, Lindyastuti dan Sri Guritno. 1997. *Budaya Kemiskinan di Desa Tertinggal di Jawa Timur (Kasus Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo)*. Jakarta: Bupara Nugraha
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sugiarto, Dakung dkk. 1989. *Teknologi Pertanian Tradisional sebagai Tanggapan Aktif Masyarakat terhadap Lingkungan di Daerah Pekalongan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
- Sugiyanto. 2004. *Analisis Statistika Sosial*. Malang: Bayumedia Publishing
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: FE UI
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutopo, H.B.. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Cetakan kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka
- Yin, R.K. 2002. *Case Study Research Design and Methods*, Penerjemah Mudzakir MD, Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Zubaedi. 2007. *Wacana pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Sumber Lain

Website:

<http://en.wikipedia.org/wiki/poverty>, diakses May 25, 2009.

<http://www.icarrd.org>. *Country Report: Agrarian Reform and Rural Development in Indonesia*, diakses October 12, 2007.

Surat kabar

Solopos, Senin, 14 Juli 2008, Tahun XI/No. 286/Juli/2008.

Dokumen

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2007, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, 2007).

DINAMIKA KOTA SURAKARTA : Gerak Satu Dekade Pelaksanaan Otonomi Daerah

Akhmad Ramdhon
Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

Implementation of a decade of regional autonomy, giving the opportunity for local government to perform a variety of changes. The dynamics of city then grew in the context of decentralization which is managed by executives as the spearhead. The era of leadership in Surakarta, Slamet Suryanto and Joko Widodo provide a trail for the city changes very fast. The first period becomes the beginning of transition for the implementation of autonomy and provide the foundation for the acceleration of the town afterwards. Leadership of the second period and then accelerate in economic cities, politics and culture. With massive process, pushing the rate to be developed and made the city election effect found urgency in the era of regional autonomy.

Keywords: dynamic city, economic, outonomy

A. Pendahuluan

Menganalisa berbagai fakta perubahan kota-kota di Indonesia tidak akan bisa melepaskan analisa pada persoalan nasional yang kemudian merambah ke tingkat lokal. Perubahan tatanan nasional yang mengukung slogan pembaharuan serta merta mendorong dan mengukung berbagai agenda perubahan berdampak lura biasa pada tataran local, dalam bentuk desentralisasi. Desentralisasi adalah ide yang terbangun sebagai sebuah koreksi atas masa lalu sekaligus semangat untuk tidak melakukan kembali semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan menarik semua logika, kepentingan dan orientasi tindakan pada kerangka yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Gagasan tentang otonomi daerah serta merta menjadi sebuah tuntutan kolektif yang melahirkan beragam tatanan.

Tata aturan untuk menegaskan komitmen tersebut kemudian lahir dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999-UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999-UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, merupakan undang-undang yang didasarkan pada TAP MPR RI nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah ; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara

Pelaksanaan Pemilu 1999 sekaligus menjadi batas untuk menegaskan akan perubahan sekaligus pergantian kepemimpinan secara nasional maupun lokal. Di Surakarta kondisi tersebut sekaligus mengawali fase kepemimpinan Slamet

Suryanto (2000-2004) yang mengusung konsep *Nguwongke Wong* (memanusiakan manusia ; humanis) sekaligus berupaya untuk membangun kota Surakarta ketika mengawali desentralisasi pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan memberi dampak luar biasa berat bagi daerah. Catatan desentralisasi kemudian bergeser dan diupayakan untuk diperbaiki semua rekamannya untuk sekaligus mengawali fase kepemimpinan Joko Widodo (2005-2010) yang mengusung jargon *Berseri Tanpa Korupsi*. Sebuah proses panjang kepemimpinan yang diawali dari sebuah proses demokratis mau tidak mau harus menempatkan pola kepemimpinan yang lebih terbuka. Dua fase kepemimpinan kota Surakarta menyisakan banyak catatan tentang dinamika kota selama satu dekade terakhir, dimana desentralisasi menjadi proses bagi keterbangunan kota. Semangat otonomi menjadi energi bagi proses keterlibatan dan pelibatan setiap warga kota dalam menjalankan kotanya dan reorientasi pembangunan menjadi titik tolak bagi Surakarta untuk membangun. Tulisan ini adalah upaya merangkum catatan kota tentang proses dinamisasi kota Surakarta di era desentralisasi, di era ke-dua kepemimpinan walikota terpilih.

Perkembangan kota yang banyak mengalami pergeseran sebagai konsekuensi akhir atas dinamika dan adanya perubahan. Dengan latar belakang tersebut, orientasi dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : mencatat dinamika kota dalam skema dan skala desentralisasi 1999-2004 dan 2005-2010 yang berberbasis pada analisa dokumen Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Surakarta di era kepemimpinan Slamet Suryanto dan Joko Widodo, sebagai proses dinamisasi kota Surakarta di satu dekade terakhir.

B. Desentralisasi Awal : 1999-2004

Kepemimpinan pasca reformasi menjadi titik awal atas proses panjang yang secara bertahap menjadi investasi bagi kondisi kekinian kota Surakarta. Perubahan tatanan nasional yang mengusung slogan Reformasi (Pembaharuan) serta mengusung pula berbagai agenda perubahan di tataran lokal mulai diluncurkan, berdampak luar biasa, tak terkecuali dengan yang terjadi di Surakarta. Gagasan tentang otonomi daerah serta merta menjadi sebuah tuntutan kolektif dari bergantinya kepemimpinan ditingkat pusat.

Momentum tersebut hadir dan bersama-sama menjadi bagian awal atas keterbukaan sebuah orde yang baru yaitu orde Reformasi. Pelaksanaan Pemilu 1999 menjadi batas untuk menegaskan akan perubahan sekaligus pergantian kepemimpinan secara nasional. Di Surakarta kondisi tersebut sekaligus mengawali fase kepemimpinan Slamet Suryanto (2000-2004). Dengan konsep *Nguwongke Wong* (memanusiakan manusia ; humanis) upaya untuk membangun kota Surakarta dilakukan kembali. Beban berat yang ditanggung kota selepas krisis ekonomi yang tak kunjung membaik karena harus ditanggung bersamaan dengan memori kolektif akibat kerusakan sosial Mei '98 dan kerusakan yang terulang kembali namun dalam area yang lebih kecil, Oktober '99. Namun kewenangan yang diberikan lewat otonomi daerah menjadi bekal yang berharga atas upaya untuk mengembalikan kembali denyut ekonomi kota. Dengan pertumbuhan ekonomi 4.5 % pada tahun 2000 secara perlahan realisasi otonomi daerah memberi dampak yang positif (untuk mengakselerasi) bagi perkembangan kota. Salah satu indikator dari otonomi daerah adalah gerak migrasi yang melambat seiring dengan pertumbuhan daerah-daerah di sekitar Surakarta.

Di kota Surakarta, dinamika PDRB berdasarkan harga konstan terhitung tahun 1995 sampai 1999 berturut-turut adalah : Rp. 1.258.960,51 juta, Rp. 1.374.559,01 juta, Rp.432.582,37 juta, Rp.1.233.018,44 juta, Rp. 1.250.807,41 juta. Tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun 1995-1999 adalah : 8,65 %, 8,70 %, 4,44 %, (-13,93%), 1,44%. Ada cacatan kenaikan yang konstan namun sejak krisis ekonomi 1997-1999, dinamika kota merosot tajam rata-rata negatif 2,68 %. Paling parah adalah kemerosotan pada tahun 1998 sebesar negatif 13,93 %. Hal ini diakibatkan oleh memuncaknya krisis ekonomi nasional sehingga sebagian besar industri yang menggunakan komponen import banyak yang gulung tikar dan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja. Catatan pertumbuhan mulai menumukan mommentumnya bersamaan dengan membaiknya ekonomi nasional, dimana pada tahun 2000, perhitungan sementara angka pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 %. Situasi krisis yang menghantam member tantangan baru bagi pemerintah baru untuk merilis kebijakan otonomi yang memberi daerah kewenangan yang lebih besar untuk membangun. Kondisi tersebut menjado indicator positif bagi pengembangan daerah pasca krisis ekonomi yang melilit dan meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi nasional.

Kepemimpinan Slamet Suryanto, menjadi embrio bagi kota mengawali dan merenda desentralisasi. Data pertumbuhan ekonomi, baik menurut perkembangan PDRB maupun PDRB per kapita tahun 1995-1999, khususnya pertumbuhan ekonomi dari tahun 1998 ke 1999 mengindikasikan ketahanan yang sangat signifikan, meskipun masih dalam tekanan krisis ekonomi makro. Dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah sendiri terhadap APBD sejak tahun 1996/1997 - 2000 rata-rata 24,5 %. Pertumbuhan yang diarahkan

untuk meningkatkan kualitas dan menguatkan peran aktif semua komponen masyarakat Kota Solo pada proses pembangunan di segala bidang. Hasil-hasil tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan dan peran aktif institusi-institusi yang berakar pada wilayah dan komunitas. Pelaksanaan model pembangunan partisipatif yang diawali dari proses perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun dan Musyawarah Kota Membangun telah mampu menumbuhkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat dan memunculkan swadaya masyarakat yang sangat berarti. Bagian tindak lanjut dari pola perencanaan yang partisipatif adalah upaya desentralisasi pengelolaan anggaran dalam wilayah kotapun dilakukan dengan pola pemberian kewenangan pada level kelurahan. Dimana alokasi *block grant* untuk semua kelurahan yang diawali pada tahun 2001 untuk stimulan pembangunan inisiatif masyarakat, di tataran implementasinya telah menghasilkan swadaya masyarakat yang sangat berarti. Adapun jumlah alokasi *block grant* dari tahun 2001 sampai tahun 2004 mencapai total biaya sebesar Rp.22.975.000.000,- dengan capain akhir partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam rangkaian kegiatan kota secara kolektif.

Pola penganggaran yang menuntut kemandirian menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Penguatan sektor-sektor yang menjadi daya tarik kota, tak terhindarkan oleh sebab keunggulan daerah, dimana salah satunya adalah sektor pariwisata. Pelaksanaan dibidang pariwisata dengan mempertimbangkan bahwa pariwisata sebagai salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Surakarta harus mampu berkembang dan berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi demi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

C. Momentum Pemilukada

Pasca reformasi semua agenda yang ada mampu mengakselerasi dan merambah ke ranah politik yang lebih luas. Pembaharuan perundang-undangan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah hadir dan diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Momentum untuk menentukan kepala daerah, menjadikan segenap warga kota mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan minimal dengan memilih calon-calon pemimpin kota (selain dengan pola pembangunan partisipatif). Komposisi hasil dari pemilihan anggota legislatif lalu menjadi standart penentu bagi pengajuan calon kepala daerah.

Terpilihnya Joko Widodo-Hadi Rudyatmo menyisakan berbagai agenda bagi perkembangan kota Surakarta. Dengan visi menjadikan Surakarta sebagai '*Kota Sala Berseri, tanpa Korupsi*' (Perda No. 10 Tahun 2001), kota dicoba dimaknai dalam arti bersihnya kota Sala secara fisik dan sehat lingkungannya sehingga mengangkat potensi dalam perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan dan olah raga. Serta mengembangkan manajerial pemerintahan kota dengan bersih tanpa korupsi, dalam suasana budaya pelestarian kota Sala yang rapi, indah, nyaman dan sejahtera. Untuk itu beberapa agenda pembangunan kemudian direncanakan dan digelar. Agenda pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan jujur ; Pengelolaan anggaran yang terbuka, partisipatif, efektif dan efisien ; Pengelolaan kesejahteraan rakyat dengan target pemenuhan tingkat kelayakan kesejahteraan lahir dan batin ; Pengelolaan pembangunan baik fisik dan non fisik perkotaan dalam sarana dan fasilitasnya untuk melayani aktivitas dan kegiatan kota secara maksimal.

Dengan latar : pertumbuhan ekonomi selama 2002-2005 telah mencapai angka

5.51 persen per tahun, nilai PDRB per kapita mencapai besaran 9.55 persen per tahun selama kurun waktu 2000-2005, lalu angka inflasi dibawah 10 persen (2004-2005 angka inflasi kembali meningkat mencapai 13.88 persen), kegiatan ekspor -yang belum dapat bangkit kembali- sampai dengan tahun 2004 nilai ekspor hanya mencapai jumlah US \$ 33.742.243.07. Maka berlatar kebijakan-kebijakkan yang telah ada sebelumnya, agenda untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya kemudian implementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta (RPJPD) Tahun 2005–2025, yang antara lain menegaskan : Kebijakan pengembangan masyarakat yang produktif dan berjiwa wirausaha, Mewujudkan '*good governance*' yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, Peningkatkan dan pengembangan SDM melalui pendidikan yang berbasis kompetensi, Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi wisata dan kebijakkan untuk melestarikan, Mengembangkan dan mengapresiasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai jati diri warga kota. Dua point terakhir kemudian menjadi lokomotif atas pengembangan kota, spirit untuk mengembalikan kota sebagai kota yang beridentitas budaya (pariwisata) yang menjadi spirit kolektif untuk kemudian ikut menggerakkan denyut perdagangan, jasa maupun pendidikan.

Strategi unggulan PANCA KRIDA UTAMA ; Pola Dasar Pembangunan Tahun 2003–2008 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 ; Propeda Tahun 2003–2008 ; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005–2010 ; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 adalah "Mewujudkan Masyarakat Kota Surakarta Sejahtera, Berkualitas dan Berbudaya". Munculnya rumusan visi dan misi kota Surakarta untuk periode 2005-2025 tersebut didasarkan atas keinginan

untuk menjadikan Surakarta sebagai kota budaya yang berjiwa progresif dan kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman. Di dalamnya juga sudah mengadopsi berbagai aspek yang menyangkut perlindungan budaya (*protective cultural*), kemitraan institusi yang mampu memberi kontribusi terhadap kemajuan pembangunan, dan kemampuan warga untuk menjadikan Kota Surakarta yang unggul dalam bidang perdagangan dan jasa.

D. Akselerasi Desentralisasi : 2005-2010

Dalam kasus Surakarta, komitmen pembangunan pada periode kepemimpinan yang terpilih memberi ruang yang lebar bagi komitmen yang lebih baik untuk publik. Dari sisi komitmen untuk kualitas masyarakat, maka Surakarta mencanangkan : peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk, kesempatan kerja, pariwisata, investasi dan revitalisasi usaha kecil/ menengah. Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang sejalan dengan RTRW, konservasi lingkungan hidup dan pencitraan kota. Disamping itu juga, prioritas pembangunan kawasan kota bagian utara menjaga pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan dan pengurangan disparitas antara kawasan kota bagian selatan dan utara, sesuai daya dukung ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.

Strategi penciptaan pemerintahan yang lebih baik, kemudian diupayakan dalam bentuk lain berupa strategi peningkatan daerah untuk merealisasikan peningkatan pendapatan daerah dengan tetap mengupayakan pertumbuhan perekonomian kota yang sehat. Pelaksanaan program dan

kegiatan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap PAD seperti pembangunan dan rehabilitasi pasar, maupun yang tidak secara langsung memberikan kontribusi terhadap PAD, seperti penyediaan sarana, prasarana dan penyelenggaraan event-event pariwisata serta kegiatan-kegiatan yang menstimulasi sektor rill. Kondisi tersebut memberi dampak pada kinerja perekonomian Surakarta yang meningkat, bila dilihat dari perkembangan indikator makro ekonomi, tahun 2009 : Dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Surakarta pada tahun 2009 dengan angka sementara adalah 5,9% meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 5,69%. Dengan tingkat inflasi tercatat 2,63%. Sedangkan catatan *PDRB* berdasarkan harga berlaku dengan angka sementara adalah Rp.8.867.563.170.000,- atau meningkat 12,22% dari Tahun 2008 sebesar Rp.7.901.886.060.000,- Adapun pendapatan perkapita Surakarta berdasarkan angka sementara adalah Rp.14.693.189,32, lebih tinggi dari tahun 2008 sebesar Rp.13.220.433,14, sedangkan angka sementara di tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 adalah Rp.10.003.924,61. Peningkatan ini menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya. Data-data perkembangan indikator perekonomian tersebut di atas mengisyaratkan bahwa secara umum kinerja perekonomian Kota Surakarta tahun 2009 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Indikator Kondisi Ekonomi Regional Surakarta

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2010.

Dilihat dari komponen pendapatan daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2005-2009, nampak bahwa pendapatan daerah Kota Surakarta masih didominasi oleh dana perimbangan rata-rata sebesar 78%, Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 15% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata sebesar 7%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Surakarta masih sangat tergantung dari dana perimbangan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah, dimana sumber terbesar dari dana perimbangan masih bersumber dari dana pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum, dimana rata-rata kontribusinya dalam periode tahun 2005-2009 mencapai 78%.

Dari situlah urgensi stabilisasi dan optimalisasi pendapatan daerah, diinisiasi melalui program upaya peningkatan penanaman modal, lewat strategi peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di dalam negeri secara selektif terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan potensi unggulan daerah; peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi; kajian kebijakan penanaman modal dan

kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi, penyelenggaraan Central Java Infrastructure Business Forum.

Pada level kebijakan yang lebih mikro, tahun 2009 target maupun outputnya, pengelolaan sebesar dana sebesar Rp.16.487.062.013,- digunakan untuk upaya-upaya meningkatkan pemantauan peredaran barang dan jasa, tersebarnya data industri dan perdagangan, pasar murah untuk masyarakat kurang mampu, memantau fluktuasi harga di pasaran untuk meningkatkan daya jual dan pengembangan pasar melalui pameran baik lokal, regional maupun nasional. Ditambah juga dengan beberapa rangkaian program yang mensupport usaha kecil menengah yang secara intens menggerakkan ekonomi mikro dalam jumlah yang besar, seperti kegiatan peningkatan kapasitas sistem produksi, peningkatan kemampuan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah, penataan struktur industri, pengembangan sentra-sentra industri potensial, peningkatan dan pengembangan ekspor.

Orientasi kinerja tersebut tidak terlepas dari kebijakan ekonomi daerah yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil,

meningkatkan kegiatan produktif masyarakat, meningkatkan investasi dan meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Dimana penekanan kebijakan kota memberikan perluasan lapangan kerja, penataan pasar baik tradisional maupun modern, dan efisien ; Pengelolaan kesejahteraan rakyat dengan target pemenuhan tingkat kelayakan kesejahteraan lahir dan batin ; Pengelolaan pembangunan baik fisik dan non fisik perkotaan dalam sarana dan fasilitasnya untuk melayani aktivitas dan kegiatan kota secara maksimal. Sebab kesemuanya menjadi janji yang siap direalisasikan dan dinilai secara langsung oleh segenap warga kota. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah periode yang ke-dua mengganjar kepemimpinan Joko Widodo-FX Rudi Hardiyatmo dengan kemenangan 90.09% kepercayaan dari warga kota untuk melanjutkan kembali kepemimpinan di Surakarta.

Daftar Pustaka

- Achmad Nurmandi, 1999. *Manajemen Perkotaan : Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia* : Lingkaran
- Agus Salim, 2002. *Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* : Tiara Wacana
- Agus Dody Sugiartoto, 2003. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo : Pendekatan Pembangunan Nguwongke Uwong* : IPGI
- Alexander Abe, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif* : Lapera
- Budhy Tjahjati SS edt, 2006. *Bungai Rampai : Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21* : URDI dan Yayasan Sugijanto Soegijoko
- Hari Mulyadi -dkk 1999. *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit : Studi Radikalisasi Sosial Wong Solo dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta* : LPTP
- Koentjaraningrat, 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* : Gramedia
- Koentjaraningrat & Emerson, Donald K. 1982. *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat* : Gramedia
- Laurer, Robert H. 2001. *Perspektif tentang Perubahan Sosial* : Rineka Cipta
- RG. Soekadijo, 1997. *Anatomi Pariwisata : Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Lingkage* : Gramedia

Dokumen Terkait

- Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah 2006* : Pemkot Surakarta 2006
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Walikota 2000-2005* : Pemkot 2005
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Walikota 2009* : Pemkot 2009
- Laporan Pemilu 2004 di Surakarta, dari Pilwan ke Pilpres* : KPU Surakarta 2005
- Mozaik Otonomi Daerah Kora Surakarta* : Pemkot Surakarta 2000
- Memujudkan Pilkada Demokratis : Pendokumentasian Pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta 27 Juni 2005* : KPU Surakarta 2005
- Peraturan dan Keputusan KPU Kota Surakarta dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2005* : KPU Kota Surakarta 2005
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Surakarta 2005-2010* : Pemkot Surakarta 2005
- Kajian Ekonomi Regional Wilayah Eks Karisidenan Surakarta* : Bank Indonesia 2004
- RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025* : Pemkot Surakarta 2006

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS : SEBUAH PENGANTAR BAGI SOSIOLOGI

Bagus Haryono
Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

Confirmatory Factor Analysis (CFA) is a statistical technique used to verify the factor structure of a set of observed variables. It different with Exploratory Factor Analysis (EFA). EFA used only to explore the possible underlying factor structure of a set of observed variables without imposing a preconceived structure on the outcome. CFA allows the researcher to test the hypothesis that a relationship between observed variables and their underlying latent constructs exists. The researcher uses knowledge of the theory, empirical research, or both, postulates the relationship pattern a priori and then statistically confirm on many factors (latent, unobservable, non visible) variables underlying measurement. First Order Confirmatory Factor Analysis (1st CFA) used as a tool to analyzed reflective indicators as formed latent variables. Second Order Confirmatory Factor Analysis (2nd CFA) used as a tool to analyzed dimensi formed latent variables.

Keywords: *Confirmatory Factor Analysis, First Order Confirmatory Factor Analysis, Second Order Confirmatory Factor Analysis*

A. Pendahuluan

Penelitian sosiologi dengan pendekatan kuantitatif, di bawah pengaruh filsafat positivisme, menerapkan logika deduktif, dan kebenaran ontologiknya terbatas pada kawasan empirik sensual *probabilistic* (Noeng Muhadjir, 2007), serta menerima realisme sosial, mengikuti paradigma fakta Sosial, umumnya menggunakan instrumen yang melibatkan konstruk, variabel, indikator, bahkan item atau butir yang banyak. Untuk menemukan hubungan antar variabel yang saling bebas, yang direduksi menjadi variabel yang jumlahnya lebih sedikit, dapat digunakan analisis faktor.

B. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

CFA ini bertujuan menemukan sejumlah faktor yang mendasari (*underlying*) sejumlah pengukuran yang besar untuk menemukan faktor (sering digunakan istilah variabel laten, atau konstruk), yang memiliki sifat tidak dapat diamati langsung (*unobservable*). Misalnya, variabel *latent* atau faktor (Jahja Umar: 2006), variabel *unobservable* (Imam dan Fuad, 2005: 12) atau konstruk, variabel *non visible*, karena sifatnya yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung oleh peneliti karena merupakan hasil kumpulan dari beberapa ukuran atau beberapa pengamatan atau beberapa indikator (Arief Wibowo, 2004: 2,4).

Di bawah analisis faktor berkembang *Exploratory Factor Analysis* (EFA) dan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Para psikolog lebih menyukai analisis ini untuk menganalisis pada *measurement model* (model pengukuran). Sementara itu, sosiolog yang lebih menekankan pada realitas sosial pada tataran makro objektif, lebih menyukai analisis pada *structural model* yang dilakukan dengan *path analysis* (Sarwono, 2007: 1-320).

Ketika sosiolog dengan pendekatan kualitatif menguat, *path analysis* semakin ditinggalkan. Sementara itu, CFA dengan menerapkan logika matematik kian berkembang, baik dalam *First Order Confirmatory Factor Analysis* (1st CFA) yang menganalisis indikator reflektif pembentuk variabel latennya, maupun *Second Order Confirmatory Factor Analysis* (2nd CFA) yang menganalisis dimensi pembentuk variabel latennya. CFA tingkat kedua yang dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara variabel laten pada tingkat pertama yang diperlakukan sebagai dimensi dari variabel laten tingkat kedua (Setyo Hari Wijanto, 2008: 190-195; Sofyan dan Heri, 2009: 57-68, Kusnendi, 2008: 128-131).

Ide dasar analisis faktor, baik eksploratori maupun konfirmatori adalah mereduksi banyaknya faktor (variabel laten, konstruk atau dimensi). Beda EFA dan CFA, tampak dalam model. Jika dalam EFA model tidak ditentukan diawal, sedangkan CFA sudah ada model yang akan di konfirmasi lebih lanjut.

Pada x_1, \dots, x_q , terdapat himpunan faktor x_1, \dots, x_n (dengan $q > n$). Besarnya X_i (variabel observe) akan sangat ditentukan oleh kombinasi linear faktor x_1 . Rumusnya:

$$X_i = I_{i1} x_1 + I_{i2} x_2 + \dots + I_{in} x_n + d_i \dots \dots \dots (1)$$

Asumsi yang harus dipenuhi, bahwa kesalahan pengukuran (d_i) sebagai bagian unik dari x_j tidak boleh saling berkorelasi

dengan x_1, x_2, \dots, x_n . Untuk $i \neq j$, maka $d_i \perp d_j$.

EFA merupakan suatu teknik untuk mendeteksi sumber laten dari variasi atau kovariansi dalam suatu pengukuran (Joreskog & Sorbom, 1993). EFA dimaksudkan untuk mengeksplorasi data empiris, serta menemukan dan mendeteksi karakteristik dan hubungan antar variabel tanpa menentukan model di awal. Pada analisis ini, peneliti tidak memiliki teori *a priori* untuk menyusun hipotesis (Stapleton, 1997). Mengingat sifatnya yang eksploratif inilah, hasil analisis faktor eksploratori ini lemah. Hasil analisis, sebatas menjelaskan hubungan antar variabel semata, dan tidak didasarkan pada teori yang kuat. Hasil analisis juga hanya tergantung data empiris, dan jika variabel observe nya banyak, hasil analisis akan sulit dimaknai (Stapleton, 1997). Analisis faktor lebih dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang validitas konstruk, yaitu apakah suatu skor mengukur apa yang seharusnya diukur.

Sebagai contoh data NPV.RAW pada *TUTORIAL LISREL 8.51* (Heri Retnawati, Hari Yulianto dan Bagus Haryono (2006). Data ini merupakan data yang dikumpulkan Holzinger dan Swinwford pada tahun 1939 dengan menggunakan 21 tes psikologi yang diikuti 145 siswa di Chicago. Ada 9 jenis tes, yang dianggap sebagai variabel observe, yakni *VISPERC*, *CUBES*, *LOZENGES*, *PARCOM*, *SENCOM*, *WORDMEAN*, *ADDITION*, *COUNTDOT* dan *SCCAPS*. Secara eksploratif, setelah melalui proses rotasi Promax, 9 variabel tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor baru, yakni komponen 1 (*VISPERC*, *CUBES*, *LOZENGES*), komponen 2 (*PARCOM*, *SENCOM*, *WORDMEAN*) dan komponen 3 (*ADDITION*, *COUNTDOT* dan *SCCAPS*).

Pada komponen 1, dapat mudah diinterpretasikan, bahwa variabel *VISPERC* (pandangan visual), *CUBES* (kubus), *LOZENGES* (belah ketupat) terkait dengan

konsep geometri. Komponen 2, *PARCOM* (parable, perumpamaan/parafrase), *SENCOM* (sentence-kalimat), *WORDMEAN* (arti kata) mudah dimaknai bahwa faktor ini terkait dengan kemampuan verbal. Namun pada komponen ketiga yang merupakan kumpulan variable *ADDITION* (penjumlahan), *COUNTDOT* (menghitung titik) dan *SCCAPS* (*straight-curved capital*, huruf lurus-lengkung) akan sulit dimaknai.

Variable *ADDITION* (penjumlahan) terkait dengan ketepatan, *COUNTDOT* (menghitung titik) terkait dengan ketelitian dan *SCCAPS* masih berbau konsep geometri. Namun hasil ini tetap dapat digunakan untuk membangun model hubungan antar variabel, yang dapat digunakan untuk membuat/menyusun hipotesis penelitian yang lain.

**Tabel 1. Hasil CFA pada data NPV.RAW
Component Score Coefficient Matrix**

Variabel	Component		
	1	2	3
VISPERC	.028	.059	.349
CUBES	-.046	-.049	.415
LOZENGES	.027	-.022	.400
PARCOM	.365	-.020	.017
SENCOM	.362	.047	-.036
WORDMEAN	.363	-.029	.013
ADDITION	.048	.450	-.142
COUNTDOT	.060	.441	.057
SCCAPS	.024	.303	.177

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

Ada beberapa kritik yang terkait dengan beberapa hubungan kausalitas yang diasumsikan *linear*. Kenyataannya, tidak semua variabel bersifat linear. Penemuan struktur faktor, dapat dilakukan dengan metode tertentu, baik metode ekstraksi ataupun rotasi.

Berbeda dengan EFA, CFA digunakan untuk menguji model pada data empiris,

dengan menggunakan parameter yang lebih sedikit dibandingkan dengan variabel observe (Joreskog dan Sorbom, 1993; Steward, dalam Anonim, 2001). Model dibangun didasarkan pada informasi *a priori* tentang struktur data dalam bentuk teori atau hipotesis (Garson, 2006), yang dibangun didasarkan pada teori yang telah ada atau hasil penelitian sebelumnya.

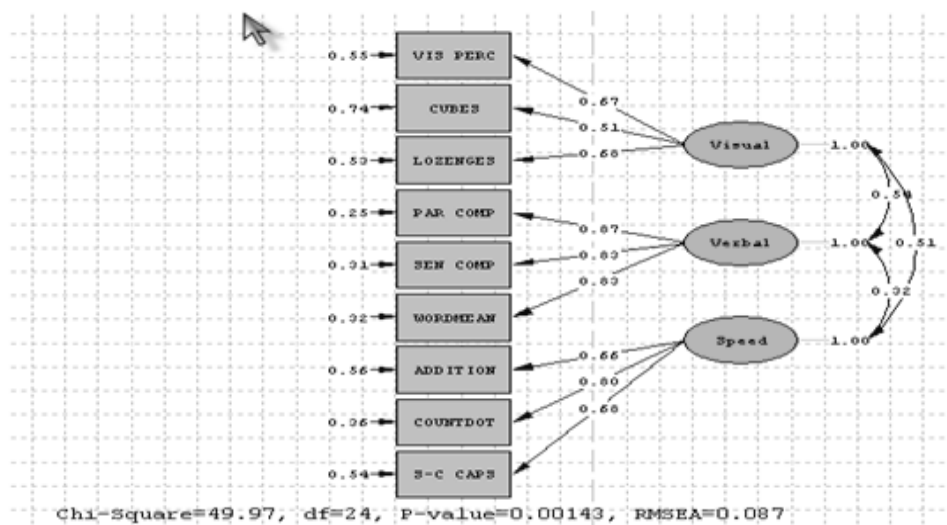
Sebagai contoh, data NPV.RAW pada TUTORIAL LISREL 8.51 kembali digunakan, dengan 9 variabel observe, yakni VISPERC, CUBES, LOZENGES, PARCOM, SENCOM, WORDMEAN, ADDITION, COUNTDOT dan SCCAPS. Berdasarkan hasil EFA (yang dianggap sebagai hasil penelitian), dibangun model

konseptual, dengan variabel laten Visual (dengan variabel observe VISPERC, CUBES, LOZENGES), Verbal (PARCOM, SENCOM, WORDMEAN) dan Speed (ADDITION, COUNTDOT dan SCCAPS). Path diagram untuk model konseptualnya digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Model konseptual dari data NPV.RAW

Setelah dilakukan CFA dengan menggunakan Lisrel, diperoleh hasil yang disajikan pada Gambar 2.

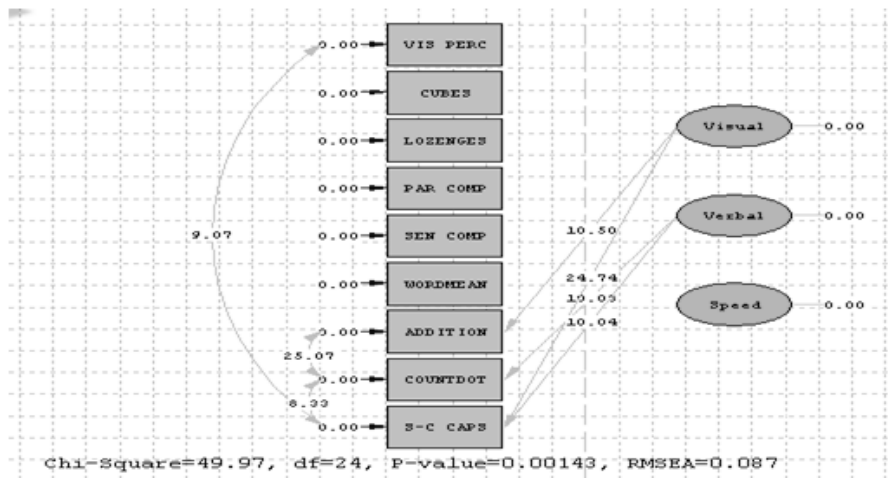
Gambar 2. Hasil CFA dari data NPV.RAW



Hasil analisis ini menunjukkan bahwa model tidak fit (model fit jika p-value lebih besar dari α , RMSEA mendekati 0). Ini berarti bahwa path diagram hubungan antar

variabel yang dihipotesiskan tidak didukung oleh data empiris. LISREL memberikan alternatif path diagram untuk memodifikasi model yang disajikan pada gambar 3.

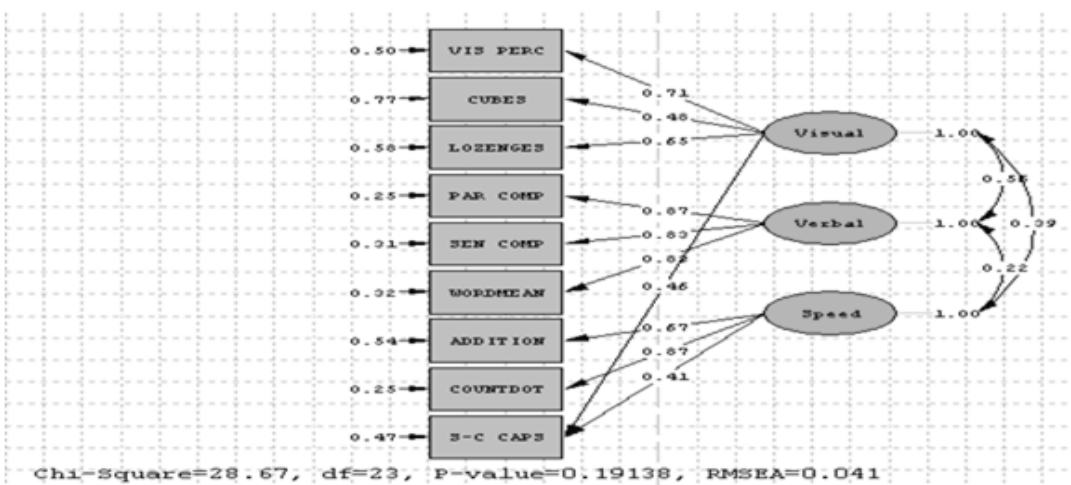
Gambar 3. Alternatif Hubungan antar variabel yang disarankan Lisrel/ Untuk dimodifikasi.



Berdasarkan saran ini, ada 4 jalur yang dapat ditambahkan, yakni dari *Visual-ADDITION* (memberikan sumbangan penurunan χ^2 sebesar 10.5), *Visual-S-CCAPS* (memberikan sumbangan penurunan χ^2 sebesar 24.74), *Verbal-COUNTDOT* (memberikan sumbangan penurunan χ^2 sebesar 10.08) dan *Verbal-S-CCAPS* (memberikan

sumbangan penurunan χ^2 sebesar 10.04). Berdasarkan hal ini, untuk memodifikasi model, jalur *Visual-S-CCAPS* ditambahkan dengan harapan akan terjadi penurunan χ^2 sebesar 24.74 sehingga dapat diperoleh model yang fit. Setelah dimodifikasi diagram jalurnya, kemudian dijalankan kembali, diperoleh hasil seperti pada gambar 3.

Gambar 4. Hasil CFA dari data NPV.RAW yang dimodifikasi



Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang digambarkan merupakan model yang fit ($p\text{-value}=0.19138>a$). Ini berarti bahwa variable "*straight-curves Capitals*" merupakan variabel observe baik untuk variabel laten *Visual* maupun *Speed*. Hasil ini memperoleh dukungan secara teoretis.

Instrumen penilaian yang dikembangkan Dikti Kementerian Pendidikan Nasional bagi dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik 2011, barangkali dapat ditelusuri mana yang menjadi faktor, aspek, indikator, *scoring*, serta penilaian yang digunakan untuk menentukan kelulusan seorang dosen. Profesionalisme (dapat dipahami sebagai faktor) diukur melalui 4 kompetensi (dapat dipahami sebagai aspek/dimensi), meliputi: pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, yang diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Masing-masing jenis kompetensi dijabarkan dalam sub kompetensi (dapat dipahami sebagai indikator). Kompetensi Sosial misalnya dibatasi sebagai Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan. Subkompetensinya a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan; b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas; c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain; d. Kemampuan membina suasana kelas; e. Kemampuan membina suasana kerja; f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat. Jawaban diberi skor dalam interval 1 sampai dengan 5. Skor 1 = sangat tidak baik/sangat

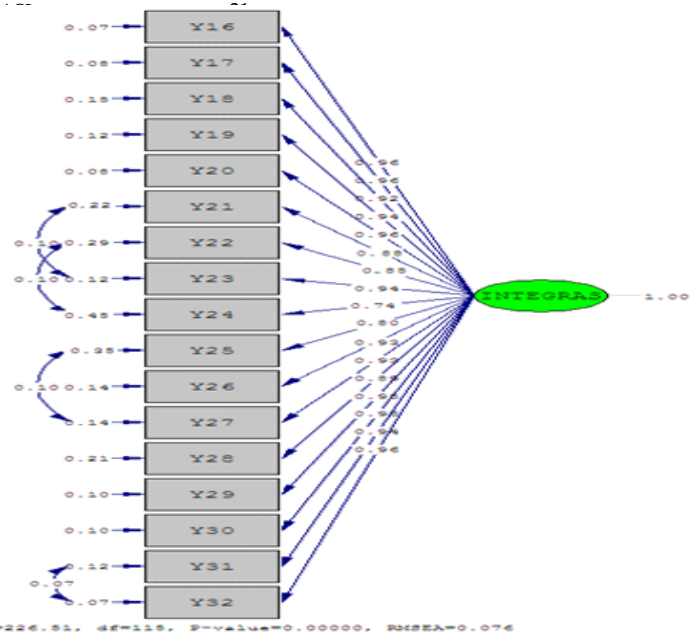
rendah/tidak pernah; 2 = tidak baik/rendah; 3 = biasa/cukup; 4 = baik/tinggi; 5 = sangat baik/sangat tinggi. Model pengukuran pada instrumen penilaian bagi dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi kajian sosiologi pendidikan, yang dapat diuji lebih lanjut dengan CFA.

Model pengukuran dengan mengimplementasikan logika matematik, yang diberlakukan untuk kajian sosiologis terhadap Integrasi Sosial telah diuji Bagus Haryono (2011) dengan CFA; teori dijelaskan dengan menerapkan pendekatan integrasionis (Horton dan Hunt, 1980: 358); dianalisis berdasar dimensi fungsional (ekonomi), struktural (normatif dan politik), suku, dan budaya (Werner S. Lendecker, Amitae Etzioni, dan Zamroni, 2001: 66-67); diasumsikan sebagai sistem yang melibatkan sub-sistem ideologi, *cross-cutting affiliation* dan ketergantungan ekonomi (Sunyoto Usman, 1998: 77-80). Integrasi budaya dianalisis menggunakan *cultural hybridization* (Shin, 2008: 211). Variabel laten integrasi sosial telah dijabarkan ke dalam empat dimensi yaitu: dimensi integrasi suku, integrasi budaya, integrasi struktural dan integrasi ekonomi. Keempat dimensi dijabarkan ke dalam indikator reflektif Y16-Y32. Dimensi integrasi suku dijabarkan ke indikator Y16-Y20; integrasi budaya dijabarkan ke indikator Y21-Y24; integrasi struktural dijabarkan ke indikator Y25-Y31; dan integrasi ekonomi dijabarkan ke indikator Y32. Jawaban diberi skor dalam interval 1 sampai dengan 5.

Persamaan pada model pengukuran untuk variabel Integrasi Sosial, dirumuskan sebagai berikut:

Y16 = Epsilon (ϵ) merupakan kesalahan pengukuran dari indikator variabel endogen
 Y17 = λ_{17} INTEGRASI + ϵ_{17}
 Y18 = λ_{18} INTEGRASI + ϵ_{18}
 Y19 = λ_{19} INTEGRASI + ϵ_{19}
 Y20 = λ_{20} INTEGRASI + ϵ_{20}
 Y21 =
 Y22 =
 Y23 =
 Y24 =
 Y25 =
 Y26 =
 Y27 =
 Y28 =
 Y29 =
 Y30 =
 Y31 =
 Y32 =

Indikator integrasi dari Y16 sampai dengan Y32 yang dikembangkan Bagus Haryono (2011) ditampilkan pada gambar 5 berikut

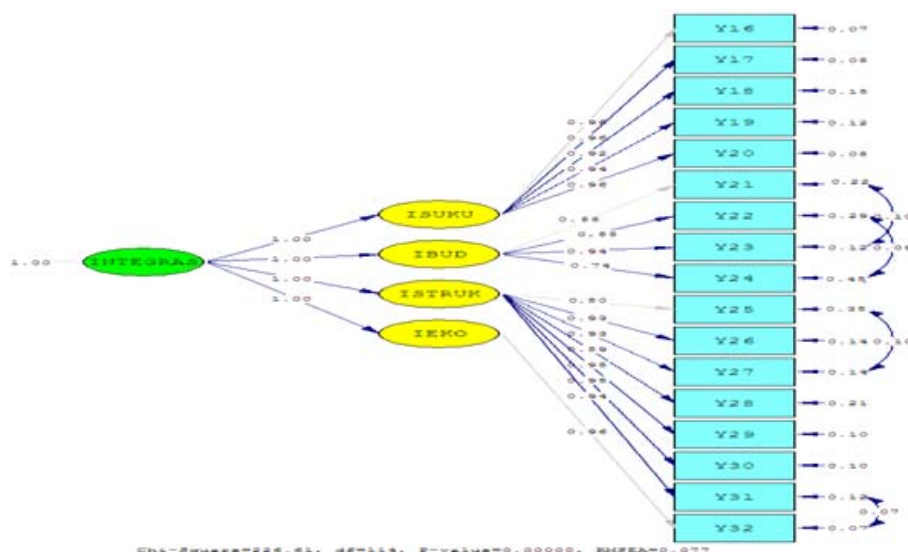


Pada gambar 5 tampak bahwa secara komposit, uji dengan 1st CFA terbukti hanya valid, reliabel dan signifikan dan fit untuk suatu daerah, hanya ketika dilakukan *covariance error* Y21&Y23, Y22&Y24,

Y25&Y27; Y31&Y32. Konsekuensi dari mengkovariankan antar *error*, maka indikator yang dihubungkan dalam model menjadi tidak lagi murni sebagai indikator uni dimensi dari konstruk awalnya.

Persamaan pada model pengukuran 2nd CFA, untuk dimensi Integrasi Sosial dirumuskan:

Gambar 6. Hasil estimasi parameter *measurement model* 2nd CFA Integrasi Sosial



Dari uji dimensi integrasi dilakukan dengan 2nd CFA, khususnya terhadap integrasi suku (Y16-Y20); integrasi budaya (Y21-Y24); integrasi struktural yang bersifat normatif dan yang bernuansa politik (Y25-Y31); dan integrasi fungsional/ ekonomi (Y32). Hasil penelitian menunjukkan yang semula memiliki 4 dimensi yaitu dimensi suku, budaya, struktural dan dimensi ekonomi, akhirnya dari uji secara komposit dengan 2nd CFA disarankan Lisrel hanya tinggal memiliki 3 dimensi yang dominan, yaitu dimensi suku, budaya dan struktural-ekonomi.

C. Penutup

Sosiolog telah mengembangkan analisis model struktural yang terhenti pada *path analysis*, yang dipahami sebagai analisis sebatas pada variabel laten. Bahkan dalam perkembangannya analisis ini jarang digunakan, karena kuatnya pendekatan kualitatif. Perkembangan tersebut telah menyebabkan para Sosiolog terhenti yang pernah dikuasainya, untuk melanjutkan analisis pada tataran dimensi ataupun tataran indikatornya. Padahal secara metodologis, saat ini telah dikembangkan aplikasi teknik statistik Lisrel atau Amos yang menerapkan 1st CFA untuk menganalisis indikator dan 2nd CFA untuk mengungkap dimensinya, bahkan seharusnya mulai familiar dengan upaya mengkombinasikan *path analysis* dan CFA dalam *structural equation modelling* (SEM).

Daftar Pustaka

- _____. 2004. *Model Persamaan Struktural: Konsep & Aplikasi dengan Program Amos 16.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Anonim. 2001. *Faktor Analisis*. *Journal of Consumer Psychology*, 10(1&2), 75-82. Lawrence Erlbaum
- Arif Wibowo. 2004. *Pengantar Analisis Faktor Eksploratori dan Analisis Faktor Konfirmatori. Materi Pelatihan SEM IV*. Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga
- Ghozali, Imam. Fuad. 2005. *Structural Equation Modeling (Teori, Konsep & Aplikasi dengan Program Lisrel 8.54)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryono, Bagus. 2011. *Estimasi Parameter Integrasi Sosial Suku Tionghoa-Jawa di Yogyakarta dan Surakarta: Pembangan Hybrid Model*. Disertasi
- Heri Retnawati, Hari Yulianto dan Bagus Haryono. 2006. *Analisis Faktor Konfirmatori* (yang disarikan dari : Joreskoq & Sorbom, Ch. 1.4, p. 22).
- Horton, Paul B & Chester, L Hunt. 1980. *Sociology*. New York: Mc Graw-Hill Book Company
- Jahja Umar. 2006. *Aplikasi Model Persamaan Struktural: Bahan Kuliah Pasca Sarjana*. tidak diterbitkan.
- Joreskog, K. & Sorbom, D. 1993. *Lisrel 88 : Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language*. Hillsdale, NJ : Scientific Software International
- Kusnendi. 2008. *Model-Model Persamaan Struktural (Satu dan Multigroup Sampel dengan Lisrel)*. Bandung: Alfabeta
- Noeng Muhadjir. 2007. *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi V. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf

Sumber Lain

- DeCoster, J. 1998. *Overview of Factor Analysis*. Diambil tanggal 25 September 2006 dari <http://www.stat-help.com/notes.html>
- Garson, D. 2006. *Factor Analysis*. Diambil tanggal 24 September 2006 dari <http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/index.htm>
- Stapleton. 1997. *Basic Concepts and Procedures of Confirmatory Factor Analysis*. Diambil tanggal 25 September 2006 dari <http://ericae.net/ft/Cfa.HTM>.
- Sunyoto Usman. *Menyoal disintegrasi bangsa*. (diambil pada tanggal 10 Februari 2011, dari <http://psp.ugm.ac.id/menyoal-disintegrasi-bangsa.html>)

KEMISKINAN BERPERSPEKTIF GENDER DI KOTA SURAKARTA

Eva Agustinawati Jurusan
Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret
Siany Indria Liestyasari
Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

This research with background of many problem of poverty, one of the problems is gender inequity. The objective of this research are making of mapping of poverty in gender dimation. Design of this research was discribe of qualitative with Focus Group Discussion and indepth interview. The sampling with purposive and snowball sampling. Result of this research to discribe that poverty in Surakarta City were not be economic accses. Poverty of gender perspective were not same of activity, access, control and participation between a man and women for economic and social resources.

Keywords: *Poverty, Gender perspective, Gender inequity.*

A. Pendahuluan

Tahun 2008, sumber dari Badan Koordinasi Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa di Surakarta terjadi kenaikan jumlah keluarga miskin. Hal ini tampak dari peningkatan jumlah keluarga yang masuk dalam kategori prasejahtera selama tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya. Prasejahtera adalah kategori keluarga kurang mampu dalam pendataan BKKBN yang didasarkan pada beberapa kriteria. Data BKKBN menyebutkan bahwa data keluarga kurang mampu di Solo mengalami kenaikan. Untuk kategori keluarga Prasejahtera tahun 2007 sebanyak 13.233 keluarga dan naik menjadi 13.567 keluarga di tahun 2008. Sementara itu untuk kategori keluarga Sejahtera I jumlahnya di tahun 2007 sebanyak 26.982

keluarga dan turun menjadi 26.913 keluarga di tahun 2008. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin di daerah Surakarta yang membutuhkan berbagai macam penanganan serius (Solopos, 28/03/2009).

Persoalan kemiskinan di perkotaan berawal dari berbagai sebab: urbanisasi yang meningkat tajam, minimnya lapangan pekerjaan di desa membuat kota menjadi sentra, atau daerah yang banyak didatangi orang untuk tujuan mencari nafkah. Krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak tahun 1998 menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kian sulit. Setelah sepuluh tahun lebih krisis berlalu, kehidupan masyarakat belumlah bisa diartikan stabil secara ekonomi. Dampak dari

banyaknya PHK, tutupnya pabrik, mahalnya harga-harga semakin membuat jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin meningkat. Apabila dahulu jumlah masyarakat miskin terkonsentrasi di daerah pedesaan maka krisis moneter membuat membludaknya masyarakat miskin terutama di daerah perkotaan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kemiskinan Berperspektif Gender di Kota Surakarta” ini bertujuan untuk: pertama, membuat peta kemiskinan di Kota Surakarta; dan kedua, mengidentifikasi permasalahan kemiskinan di Kota Surakarta dari perspektif gender.

C. Tinjauan Pustaka

Saptari dan Holzner (1997: 89) menyebutkan bahwa seorang ahli sosiologi Inggris, Ann Oakley adalah orang yang mula-mula melakukan pembedaan antara istilah seks dan *gender*. Perbedaan sex berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak selalu identik dengannya. Proses simbolisasi ini sangat terkait dengan sistem budaya ataupun struktur sosial setiap masyarakat sehingga perbedaan gender tidak selalu bertumpu pada perbedaan biologis. Oleh karena itu, gender lebih merupakan konstruksi sosial budaya suatu masyarakat. Gender dengan demikian tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

1. Konsep Kemiskinan

Sutrisno (1995:18-19) menjelaskan ada dua jenis *school of thought* yang hidup di kalangan para pakar dan aktivis LSM dalam upaya memahami substansi kemiskinan. Pertama, yang berpendapat bahwa kemiskinan itu pada hakekatnya adalah masalah campur

tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Kedua, yang biasanya terdiri dari para pejabat, yang melihat bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah.

Ada beberapa dimensi dalam memahami kemiskinan. Pertama, kemiskinan berdimensi ekonomi atau material yang menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia. Kedua, kemiskinan berdimensi sosial budaya, bahwa lapisan yang secara ekonomi miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Ketiga, dimensi struktural atau politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah (Nugroho, 1995: 3-32).

Definisi kemiskinan dapat disimpulkan dalam beberapa hal:

- a) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, papan, pangan);
- b) ketidakmampuan mengakses kebutuhan dasar hidup lainnya (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
- c) ketiada jaminan masa depan (tidak memiliki investasi apapun untuk keluarga);
- d) kerentanan terhadap goncangan, baik yang bersifat individual maupun massal;
- e) rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan SDA;
- f) termarginalkan dalam kegiatan sosial masyarakat;

- g) ketidakmampuan mengakses pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- h) ketidakmampuan berusaha karena difabel; dan
- i) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin) (Basuki 2007: 10).

Basuki dkk. pernah melakukan penelitian di Kota Surakarta di mana hasilnya menunjukkan bahwa kemiskinan juga menggambarkan adanya ketimpangan gender. Kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan sebagai ujung tombak keluarga. Di lain pihak peran perempuan juga sebagai katup penyelamat apabila perekonomian keluarga mengalami goncangan. Peran perempuan didalam keluarga miskin yang harus dilakukan: pertama, sebagai pengelola keuangan rumah tangga; kedua, sebagai penanggungjawab seluruh pekerjaan domestik; ketiga, sebagai pencari nafkah dalam keluarga; keempat, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis (Basuki 2007: 10-11).

D. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa deskriptif kualitatif yakni berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang persoalan yang dijadikan topik penelitian dengan mengutamakan data-data verbal.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, data sekunder berupa data statistik yang mencerminkan angka partisipasi kerja masyarakat, tingkat

pendidikan dan ekonomi masyarakat, dan data-data statistik lain yang berkaitan dengan kemiskinan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dengan sejumlah informan Wawancara dengan sejumlah informan dan juga diskusi terarah yang sering dikenal dengan istilah *focus group discussion* (FGD). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dengan melihat data-data statistik yang tersedia yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan teknik cuplikan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan alasan tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan dan penguasaan informan terhadap masalah yang diteliti. Teknik *snowball sampling* akan dilakukan untuk menentukan informan dengan menghubungi informan kunci yang pertama dan mencari informan kunci berikutnya.

Validitas data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu suatu upaya untuk memperoleh derajat kepercayaan yang lebih tinggi dengan membandingkan dan menguji balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari salah satu sumber melalui sumber informasi yang berbeda.

E. Gambaran Kemiskinan di Kota Surakarta

Kemiskinan pada awalnya terkonsentrasi di daerah pedesaan. Kepemilikan lahan yang semakin lama semakin terbatas membuat penduduk pedesaan yang mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai petani harus menanggung resiko berebut lapangan kerja. Sawah yang semakin menyempit karena sebagian besar digunakan untuk lahan perumahan mulai menjadikan warga masyarakat desa kehilangan pekerjaannya. Meskipun mereka tetap bertani namun lahan yang

mereka garap terkadang bukan miliknya sendiri. Akhirnya, masyarakat banyak yang menjadi petani penggarap saja.

Tekanan ekonomi di pedesaan mulai membuat masyarakat kemudian berpikir untuk mencari pekerjaan di perkotaan. Asumsinya, di kota mudah mencari pekerjaan dan jenisnya bervariasi. Anak muda di desa mulai mencari pekerjaan di kota. Dengan demikian, jumlah penduduk menjadi terkonsentrasi di daerah perkotaan. Lapangan pekerjaan di kota mulai banyak diperebutkan sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Implikasinya lahirlah kemiskinan di perkotaan.

Membincang penyebab kemiskinan pun rupanya tidak mudah diperoleh jawaban tunggal yang mencakup semua aspek penyebab kemiskinan karena kemiskinan memang suatu persoalan yang bersifat multidimensional. Ada banyak teori, pendapat serta definisi yang berupaya menjelaskan penyebab dari fenomena kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan belaka, namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka (Bappenas, 2004:2).

Ada banyak definisi yang diberikan oleh para ahli ekonomi dan ilmu sosial berkait dengan konsep kemiskinan. Namun dalam konteks untuk melihat kondisi kemiskinan di Indonesia maka kemiskinan biasa didefinisikan sebagai suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan standart manusia sehari-hari. Ada berbagai macam pemikiran yang mendasari munculnya fenomena tidak terpenuhinya standart hidup masyarakat. Misalnya, struktur ekonomi yang timpang menyebabkan

masyarakat tidak bisa mengakses faktor ekonomi, kesehatan atau pendidikan. Fenomena ini bisa juga muncul sejalan dengan kegagalan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, seperti yang tertuang dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di Indonesia.

Dalam konteks Kota Surakarta, ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan yakni: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya layanan pendidikan, keterbatasan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan dasar, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta, 2008).

Kembali membincang tentang kemiskinan, Kota Surakarta yang terdiri dari lima kecamatan ternyata memiliki keberagaman penyebab kemiskinan. Ada beberapa wilayah kelurahan di Kota Surakarta yang pada tahun 2009 ditetapkan sebagai kantong kemiskinan. Wilayah tersebut antara lain adalah Kelurahan Panularan, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Jebres dan Kelurahan Joyotakan. Kelima wilayah kelurahan ini ditetapkan oleh Walikota Surakarta sebagai daerah kantong kemiskinan sehingga program-program dari tiap SKPD di jajaran Pemerintah Kota Surakarta terkonsentrasi di lima kelurahan tersebut. Berikut ini adalah gambaran kasar tentang kondisi kemiskinan di beberapa daerah yang ditetapkan oleh Walikota Surakarta sebagai daerah yang berlabel kantong kemiskinan.

Kemiskinan sangat erat berkaitan dengan konteks lokalitas masyarakat yang bersangkutan termasuk kondisi geografis dan demografis suatu wilayah. Daerah pinggiran, biasanya berbatasan dengan kabupaten atau kota lain yang identik

dengan daerah kantong kemiskinan. Hal ini ditengarai karena banyaknya pendatang yang menetap di sana untuk mencari pekerjaan. Para pendatang ini rupanya turut juga memanfaatkan fasilitas perkotaan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, tempat tinggal mereka tidak menetap bahkan seringkali hanya mengontrak seadanya untuk jangka waktu yang tidak lama. Harga tanah yang mahal membuat para pendatang ini seringkali nekat mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di areal terlarang karena tidak mampu membayar kontrakan atau sewa rumah dan kamar. Hal inilah yang kemudian menimbulkan hunian liar, seperti di sepanjang rel kereta api, daerah yang notabene sebenarnya dilarang untuk didirikan pemukiman. Hunian liar ini selanjutnya berubah menjadi daerah kumuh atau *slum*. Implikasinya tentu saja pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Minimnya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan dasar mereka tidak bisa terpenuhi secara optimal. Tidaklah mengherankan apabila akhirnya daerah semacam ini identik dengan istilah kantong kemiskinan.

Surakarta sebagai sebuah kota besar tidak bisa disangkal juga telah menyedot banyak tenaga kerja yang berasal dari kota-kota kecil lain di luar Surakarta. Menurut Abdullah (2005:29) laju pertumbuhan penduduk di perkotaan berasal dari peningkatan jumlah pendatang dari daerah pedesaan dan dari kota-kota lain yang lebih kecil. Pemusatan kegiatan ekonomi di kota-kota besar telah menyebabkan konfigurasi penduduk semakin terpusat di daerah perkotaan. Ada banyak implikasi dari membludaknya penduduk di perkotaan yang berasal dari kota-kota satelit di sekitarnya, salah satunya adalah fenomena kemiskinan yang tidak terelakkan. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah di sekitar Surakarta yang masuk ke sebuah

kawasan kota seperti di daerah Laweyan membuat jumlah penduduk di sana membludak karena banyaknya pendatang yang berkaitan dengan persoalan ketersediaan lapangan kerja.

Selain itu, konteks geografis juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan masyarakat. Daerah seperti Kelurahan Kadipiro (dekat dengan terminal bus), Kelurahan Gilingan (dekat dengan stasiun kereta api), Kelurahan Sangkrah (dekat dengan aliran sungai Bengawan Solo) adalah daerah yang sangat identik dengan kemiskinan. Konteks geografis dekat dengan terminal bus misalnya selalu diidentikkan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi selain juga wilayah yang kumuh serta rendah taraf perekonomiannya. Maksudnya, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut secara perekonomian juga terpengaruh oleh adanya terminal. Begitu juga halnya rumah-rumah yang berdiri di sepanjang rel kereta api. Tidak jarang jarak antara rumah dengan rel sangat berdekatan sehingga membahayakan penghuninya. Seringkali pula tidak ada pembatas antara rel kereta dengan rumah penduduk sehingga tingkat bahaya cukup tinggi. Apabila ada pembatas maka biasanya hanya sekedar plang besi dan kawat yang mudah untuk dilewati. Menjamurnya hunian semacam ini juga turut memperburuk suatu daerah yang kemudian berubah menjadi kantong kemiskinan di perkotaan.

Sementara itu, daerah yang dekat dengan bantaran Sungai Bengawan Solo memang menjadi satu daerah yang sungguh rawan terhadap banjir. Kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di sini lebih dikarenakan kondisi alam yang menjadikan daerah tempat tinggal mereka menjadi daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Meluapnya air sungai Bengawan Solo tak jarang menjadikan penduduk kalang kabut mengungsi. Bahkan banjir seolah sudah

menjadi fenomena langganan yang tidak lagi ditakuti keberadaannya meskipun berbahaya.

Masyarakat masih meyakini bahwa penyebab utama kemiskinan bersumber dari mentalitas masyarakat yang bersangkutan sehingga sampai ada istilah “memiskinkan diri” dalam masyarakat ketika ada pendataan bantuan. Sutrisno (1995:18-19) menjelaskan bahwa pemikiran demikian biasanya terdiri dari para pejabat yang melihat bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah.

F. Perspektif Gender dalam Kemiskinan di Kota Surakarta

Data statistik tentang kemiskinan di Kota Surakarta belum secara spesifik terpilah secara jenis kelamin karena yang disurvei adalah rumah tangga, sehingga data yang muncul adalah banyaknya Kepala Keluarga. Walaupun ada data yang terpilah yaitu jumlah jiwa kategori miskin dan jumlah perempuan yang lebih banyak disebabkan karena jumlah penduduk perempuan yang memang lebih besar dibandingkan laki-laki.

Jika melihat kemiskinan dari perspektif gender, maka kita perlu melihat bagaimana aktivitas, akses dan kontrol dari suatu sumber daya bagi laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan dalam aktivitas, akses dan kontrol terhadap sumber daya atau pemanfaatan sumber daya oleh salah satu jenis kelamin tertentu menyebabkan kemiskinan hanya melanda salah satu jenis kelamin saja. Akibatnya, muncullah apa yang disebut sebagai ketimpangan gender. Akses yang sama belum tentu melahirkan kontrol yang sama pula. Faktor kebudayaan sering dijadikan dasar adanya perbedaan ini.

Masyarakat dalam kategori miskin, hampir miskin, dan sangat miskin di Kota Surakarta identik dengan satu persoalan yakni tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar. Walaupun bisa mencukupi itupun dengan kondisi yang sangat pas-pasan. Penyebabnya tentu saja ada beragam faktor namun yang utama adalah karena penghasilan yang tidak seimbang dengan pengeluaran kebutuhan, meskipun untuk kebutuhan sehari-hari bertahan hidup. Pekerjaan mereka tidak pasti atau walaupun pekerjaan menetap penghasilannya cukup rendah. Selain itu, tanggungan hidup mereka cukup besar, misalnya harus membiayai sekian orang dalam keluarga. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar tidak bisa tercukupi dengan penghasilan yang tidak memadai.

Pekerjaan produktif banyak dilakukan oleh laki-laki terkait ranah mereka di domain publik yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan kategori pembagian kerja berdasarkan seksual yang terbungkus dengan ideologi gender membuat perempuan lebih banyak bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik dan reproduktif.

Pada beberapa keluarga miskin, tanggungan hidup mereka cukup besar. Seorang ibu misalnya yang suaminya terkena stroke dan praktis tidak bisa bekerja, harus menanggung keempat anaknya yang masih sekolah. Atau seorang anak laki-laki yang harus menanggung enam orang dalam keluarganya yakni: ayah, ibu, istri, seorang anak, dan dua orang adiknya. Penghasilan para pencari nafkah utama ini tentu saja tidak bisa mencukupi kebutuhan seluruh keluarga sehingga banyak kebutuhan dasar yang tidak bisa dipenuhi. Kasus lain misalnya seorang laki-laki dan perempuan (suami istri) bekerja namun penghasilan bersih mereka tidak lebih dari tiga puluh ribu sehari dengan berjualan gorengan,

itupun apabila laku dijual. Ketika jualan sepi pembeli tidak jarang mereka pulang tanpa membawa hasil apapun malah dikatakan merugi.

Memang ada sebagian besar masyarakat miskin perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, namun mereka mengasuh cucu-cucunya selagi anaknya (ibu si cucu) bekerja sehari-hari. Pekerjaan *momong* ini dilakukan sebagai kompensasi karena mereka hidup menumpang di keluarga si anak atau sebaliknya si anak menumpang dalam rumah milik mereka tetapi si anak membiayai seluruh pengeluaran keluarga. Apabila melihat profil aktivitas, sebetulnya laki-laki dan perempuan sama-sama mengambil peran aktif dalam pekerjaan. Hanya saja pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan terkesan sebagai pekerjaan sampingan, yang dilakukan sambil lalu atau dilakukan untuk mengisi waktu senggang saja sehingga seringkali tidak bernilai ekonomis. Mengasuh anak didefinisikan sebagai tugas reproduktif 'perempuan' sehingga tidak dibayar, tidak bernilai ekonomis oleh karena itu tidak didefinisikan sebagai pekerjaan karena tidak menghasilkan uang. Kompensasinya, seperti kasus di atas, misalnya dengan ditanggung oleh si anak untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ideologi gender yang berakar di benak masyarakat turut mendefinisikan suatu perilaku dianggap sebagai pekerjaan atau bukan pekerjaan.

Akses terhadap sumber daya juga dilihat dari faktor tenaga kerja. Beban pekerjaan domestik pada perempuan membuatnya memiliki sedikit waktu untuk bisa mengakses sumber daya ekonomi di ruang publik. Perbedaan akses jelas terlihat di sini karena laki-laki lebih bisa mengakses sumber daya ekonomi dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki tidak dibebani dengan tugas domestik yang digariskan secara kultural, dengan demikian dia

lebih banyak memiliki waktu untuk mengakses sumber daya dibandingkan dengan perempuan. Akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi produktif terbatas karena peran domestiknya. Walaupun perempuan bisa mengakses sumber daya (bekerja di ruang publik), maka dia akan mengalami beban kerja ganda. Tanggung jawabnya menjadi berlipat yakni mencari uang dan mengurus rumah tangga.

Aktivitas sosial yang diikuti oleh perempuan hanya sebatas PKK dan arisan RT. Perkumpulan semacam ini digunakan oleh kaum perempuan untuk mengakses pinjaman atau memanfaatkan arisan sebagai sarana tabungan. Jumlah yang ditabung juga tidak menentu karena simpan pinjam lebih dimanfaatkan sebagai simpanan menjelang hari raya tiba karena tabungan ini biasa dibagikan menjelang hari raya. Ketika hari raya tiba, harga kebutuhan pokok akan melambung sementara kebutuhan semakin banyak, tabungan merupakan antisipasi perempuan untuk mensiasati pengeluaran yang membengkak menjelang hari raya tiba. Meminjam dalam arisan juga dilakukan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan mendesak lainnya, misalnya untuk SPP anak. Sebagian juga memanfaatkan simpan pinjam sebagai tambahan modal bagi usaha dagang kecil-kecilannya. Murahannya biaya angsuran pinjaman membuat simpan pinjam arisan PKK atau RT menjadi sumber daya ekonomi lain bagi perempuan.

Penyebab kemiskinan secara gender juga terlihat dalam perbedaan kontrol atas sumber daya dan manfaat oleh laki-laki maupun perempuan. Penghasilan yang diperoleh baik oleh suami atau istri seringkali dibedakan cara pengelolannya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila seorang ibu bekerja maka penghasilannya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dapur seperti membeli beras, minyak, gula

dan lain sebagainya. Rata-rata gambaran pengelolaan keuangan (penghasilan) dalam keluarga dipegang oleh suami sementara istri biasanya hanya diberi jatah harian saja untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari. Jumlahnya pun bervariasi. Bagi keluarga yang berpenghasilan tidak tetap, kepriwaaian si istri dalam mengelola keuangan jatah belanja merupakan hal yang mutlak diperlukan. Sampai disini bisa digambarkan bahwa perempuan tidak bisa mengontrol hasil dan manfaat sumber daya.

G. Kesimpulan

Kemiskinan di perkotaan berawal dari berbagai sebab salah satunya adalah urbanisasi yang meningkat tajam. Minimnya lapangan pekerjaan di desa membuat kota menjadi sentra atau daerah yang banyak didatangi orang untuk tujuan mencari nafkah.

Kemiskinan juga menggambarkan adanya ketimpangan gender dimana selalu menampilkan wajah perempuan sebagai ujung tombak keluarga. Di lain pihak, peran perempuan juga sebagai katup penyelamat apabila perekonomian keluarga mengalami goncangan. Penyebab kemiskinan secara gender juga terlihat dalam perbedaan aktivitas, akses dan kontrol atas sumber daya dan manfaat oleh laki-laki maupun perempuan. Penghasilan yang diperoleh baik oleh suami atau istri seringkali dibedakan cara pengelolaannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan (ed). 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PSKK UGM
- Abdullah, Irwan. 2005. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan)*. Bandung : Alfabeta
- Arif, Saiful. 2000. *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- BAPPENAS. 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*
- Basuki, Alif. Yanu Endar Prasetyo. 2007. *Memuseumkan Kemiskinan*. Surakarta: PATTIRO
- Darwin, Muhadjir M. 2005. *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: Media Wacana
- Dewantara, Awan Setya (ed.). 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, Trisakti. Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung
- Sunartiningsih, Agnes. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Saptari, Ratna. Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grafitti Press
- Suparno, Indriyati. Kelik Ismunandar. Trihastuti Nur Rochimah. 2005. *Masih Dalam Posisi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI PASCA BENCANA

R.A Anggraeni Notosrijoedono
Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia

Abstract

The development of preschool children post disaster does not influence the psychological development of children, by reason in a great numbers of social services by playing activities conducted by foreign and domestic social institutions in evacuation shelters. Disaster can be seen from its positive perspective for the children, by reason such age children which formerly had not known and because they live in evacuation shelters makes the children have many friends and they are rapidly adapt and socialize with equal age children.

Such was the case after the children live no more in evacuation shelter, their parent will register their children into Playing Group which has been numerously built in surroundings of their settlement. Through playing, children will have experience and comprehension on the world they need in life in adult period, playing is a medium for developing cognitive, emotional and social competence of children. Thus, playing takes important role in children growth. Social service during the disaster and post-disaster has purpose and type of positive activity for children development. By reason there are playings for playful togetherness for the children and it can grow the solidarity sense, regard their peers, grow their empathy, grow their self-reliance, knowledge and thinking capability for the children and grow the imaginative capability, and increase their creativity and regard their respective competence.

Keywords: *Preschool children development, Post Disaster, Preschool Children Education, Psychosocial, Social Service, Playing*

A. Pendahuluan

Perkembangan anak usia dini dimulai dengan belajar, seperti: berjalan, memakan makanan keras, berbicara, mengatur gerak-gerak tubuh, mengenal perbedaan jenis kelamin dengan ciri-cirinya, mencapai stabilitas fisiologis, membentuk konsep sederhana tentang realitas sosial dan fisik, melibatkan diri secara emosional dengan orang tua, saudara, maupun orang lain dan belajar membentuk konsep tentang benar-salah sebagai landasan membentuk nurani. Anak usia dini yang berkisar antara 0 – 6 tahun disebut sebagai usia emas atau *golden age* dan banyak perubahan yang luar biasa

jika diamati dari awalnya bayi kemudian menjadi anak-anak.

Bayi pada waktu di kandungan ibu menerima pasokan oksigen, sari-sari makanan, sirkulasi darah, proses pembuangan serta pengaturan temperature masih tergantung pada ibu. Ketika dilahirkan, bayi harus melakukan berbagai hal tersebut dengan upayanya sendiri dan pasca kelahiran menuntut bayi untuk mandiri. Lalu, terlihat munculnya refleks-refleks yang merupakan dasar kepekaan terhadap stimulus, munculnya celoteh yang akan ber-kembang menjadi kemampuan

berkomunikasi dan anak sudah berkembang fisiknya sehingga membentuk tubuh yang proporsional, mampu ber-jalan, melompat, berlari, mampu memegang kuas, pensil dengan baik, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa verbal, mampu memahami emosi yang dirasakan oleh orang lain berdasarkan bahasa tubuh yang ditunjukkan.

Pada masa usia emas, anak usia dini membutuhkan rangsangan-rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan yang sempurna sebab pada masa ini juga dapat disebut masa kritis karena sangat mempengaruhi keberhasilan pada masa berikutnya. Apabila pada masa kritis ini tidak memperoleh rangsangan yang tepat dalam bentuk latihan atau proses belajar maka diperkirakan anak akan mengalami kesulitan pada masa-masa perkembangan berikutnya.

Menurut Freud, masa usia dini harus diberi landasan yang kuat agar terhindar dari gangguan kepribadian atau emosi. Freud juga menyatakan bahwa gangguan-gangguan yang dialami pada masa dewasa dapat ditelusuri penyebabnya dengan melihat kehidupan pada masa kanak-kanaknya. Misalnya: orang yang agresif secara verbal, sering marah-marah dan mengumpat, ternyata pada waktu usia dini tidak memperoleh kepuasan terhadap kebutuhannya. Demikian pula Erikson mengatakan bahwa anak yang tidak mengalami dan memperoleh kasih sayang serta tidak memperoleh kepuasan dari kebutuhannya akan mengalami kegagalan untuk mengembangkan rasa percaya pada orang lain. Sedangkan Piaget menyatakan bahwa tahun-tahun awal perkembangan manusia merupakan saat yang tepat untuk mengenalkan berbagai konsep sederhana sebagai landasan untuk mengembangkan cara berpikir yang lebih kompleks pada tahap-tahap perkembangan berikutnya.

Perkembangan anak usia 0 – 3 tahun menurut survey yang dilakukan di Amerika Serikat, pola perkembangan fisik bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 12 bulan/1 tahun mengikuti pola tertentu terutama yang berhubungan dengan berat dan tinggi badan. Demikian pula, perkembangan bayi sejak dilahirkan sampai berusia 3 tahun dapat dilihat dari usia, perkembangan motorik, perilaku adaptif, kemampuan berbahasa dan perilaku sosial dan pribadi, contoh: bayi pada usia 4 minggu, perkembangan motoriknya seperti kelenturan kepala, leher yang kuat, serta tangan menggenggam dan perilaku adaptif dengan melihat berkeliling dengan jangkauannya belum luas karena kemampuan melihat yang masih terbatas. Sedangkan kemampuan berbahasa dengan keluarnya suara kecil yang berasal dari tenggorokan dan mulai tertarik pada suara bel, serta perilaku sosial-pribadi dengan memperhatikan wajah.

Pada usia 3 tahun, terlihat perkembangan motoriknya semakin baik dengan mampu berdiri di atas satu kaki, membangun menara dari 10 kubus dan kemampuan berbahasanya sudah semakin baik dengan jumlah kosa kata sudah mencapai 1.000 kata serta 80% ungkapan-nya sudah cukup mudah.

Selain Freud, ada pula seorang ahli pendidikan Swiss yang bernama Johann Heinrich Pestalozzi yang hidup pada tahun 1747–1827 dan mengembangkan teori Audio Visual Memory (AVM), yaitu anak dapat mengarahkan pendengarannya, dapat menggunakan penglihatannya dengan baik dan anak dapat menggunakan ingatan secara baik. Juga Pestalozzi melihat anak didik adalah pribadi yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Selain itu, anak seharusnya tidak hanya sebagai makhluk individu, akan tetapi harus dipandang sebagai anggota masyarakat.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang dikelilingi oleh laut, tetapi juga merupakan wilayah rawan terjadinya bencana. Seringkali terjadi bencana yang merugikan masyarakat yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

1. Alam, seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, badai/topan, gelombang tsunami.
2. Manusia, seperti: konflik internal antarkelompok atau lebih yang sama militan, perang sipil, bom, lumpur panas Lapindo, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, kebakaran di pemukiman.
3. Alam dan manusia, seperti: banjir dan longsor.

Bencana adalah suatu peristiwa yang mengganggu keamanan dan kenyamanan suatu komunitas, baik disebabkan oleh faktor alam, manusia dan keduanya yang menyebabkan kehilangan jiwa, harta benda, kerusakan lingkungan, sarana-prasarana, dan lain-lain sehingga diperlukan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah dalam negeri, luar negeri, organisasi swasta, organisasi profesi, masyarakat, dan lain-lain karena tidak tersedianya sumber daya manusia dan dana yang tersedia dari wilayah yang terkena bencana. Menurut *Ensiklopedia Pekerjaan Sosial Indonesia* (Depsos RI: h.10), bencana atau *disaster* adalah peristiwa luar biasa yang terjadi baik karena ulah alam maupun manusia, terpusat pada suatu waktu dan ruang tertentu dan sering menimbulkan korban baik terhadap manusia (meninggal dunia, cacat fisik atau mental, kehilangan harta benda), prasarana fisik (gedung, kantor, jembatan, sarana pertanian) dan wilayah lingkungan (hutan, sungai, laut). Jenis-jenisnya: gunung meletus, gempa bumi, gelombang pasang, banjir lahar, angin taufan, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, polusi. Bencana

alam dalam hal penanganan masalah memiliki tujuan terciptanya kondisi sosial masyarakat yang dinamis dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan akibat-akibat bencana alam serta semakin melembaganya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam membantu menanggulangi bencana.

Disamping itu, ada bencana yang disebabkan karena perilaku atau perbuatan manusia (*manmade disaster*), antara lain korban kekacauan, repatriasi warga Indonesia di luar negeri, kebakaran, kecelakaan perahu, dan lain-lain. Dari berbagai pengertian bencana tersebut diatas, intinya bencana dapat menimbulkan kematian, perpisahan, pengisoliran dan kehilangan lainnya. Dampak sosial bencana tersebut juga berhubungan erat dengan dampak ekonomi karena banyak individu dan keluarga yang kehilangan status sosial, posisi, dan peran dalam masyarakat. Selain itu, bencana juga menimbulkan berbagai dampak khususnya dampak psikososial kepada korban langsung (*primary victim*) maupun korban tak langsung (*secondary victim*). Juga dampak bencana tidak hanya kepada penduduk yang terkena bencana, melainkan juga dapat mengenai rekan-rekan terdekat, tetangga dan pekerja atau sukarelawan yang terlibat di dalam pelayanan sosial bencana. Juga kerusakan dapat terjadi pada alat-alat pencegahan banjir, irigasi, pekerjaan, transportasi dan yang berakibat pada ketidak mampuan pemerintah memberikan bantuan dengan segera dan perlu bantuan dari berbagai pihak. Juga untuk menampung pengungsi perlu didirikan tenda-tenda, pelayanan sosial bagi anak usia dini, tempat-tempat penampungan sementara di sekolah, tempat ibadah, Pos Komando (Posko) di rumah warga, di kantor, dan lain-lain.

Anak usia dini pasca bencana perlu mendapat perhatian tersendiri dari pendidik anak usia dini, agar perkembangannya

dapat melalui tahap-tahap yang menyenangkan melalui bermain dan tidak akan membuat masalah kepribadian di kemudian hari.

B. Metode

Pendekatan kajian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan dalam kajian ini adalah:

1. Pemerhati Anak Usia Dini, untuk memperoleh pemahaman pentingnya memberikan pelayanan sosial melalui bermain pada saat di tempat pengungsian dan pasca bencana.
2. Pendidik, mewakili guru-guru yang mengajar anak usia dini.
3. Pengelola Kelompok Bermain, sebagai pimpinan yang sehari-hari berada di sekolah dan memahami perkembangan anak.
4. Staf Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi-Badan Geologi-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Relawan pada saat bencana terjadi, mewakili warga masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi.

C. Pembahasan

Perkembangan anak usia dini pasca bencana tidak mempengaruhi perkembangan anak, karena pada waktu bencana banyak didirikan pelayanan-pelayanan sosial untuk anak usia dini melalui bermain di lokasi penampungan pengungsi. Tujuan didirikan pelayanan sosial bagi anak usia dini melalui bermain, yaitu agar anak merasa ada kebersamaan dengan anak seusianya di tempat pengungsian. Kebersamaan itu melalui permainan-permainan yang menyenangkan bagi anak dan

permainan-permainan tradisional paling disukai oleh anak-anak, seperti: permainan engklek, petak umpet, teka-teki, bernyanyi, menggambar, *outbound*, sulap, bermain peran, pentas seni berkelompok, dan lain-lain. Dengan mengikuti permainan-permainan di tempat pengungsian. Anak-anak akan bertambah teman bermainnya dan setelah bencana berlalu, anak akan mengikuti pendidikan anak usia dini yang berada di sekitar tempat tinggalnya.

Usia dini merupakan waktu di mana anak banyak belajar berbagai macam hal. Seperti dikemukakan oleh Maria Montessori dari Italia yang hidup dari tahun 1870-1952 seorang Doctor of Medicine dengan bukunya *Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's House* telah merumuskan sejumlah teori mengenai belajar pada masa usia dini dan dapat dicermati dari dua belas falsafah, yaitu:

1. Anak usia dini tidak seperti orang dewasa, mereka terus menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan, dimana pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
2. Anak usia dini senang sekali belajar, "selalu ingin tahu dan mencoba". Tugas orang dewasa adalah mendorong, memberi kesempatan belajar dan membiarkan anak belajar sendiri.
3. Pikiran anak yang masih kecil mempunyai kemampuan besar untuk menyerap berbagai pengalaman. Masa yang paling penting adalah masa pada rentang usia sejak lahir sampai umur 6 tahun.
4. Anak usia dini menyerap hampir semua yang dipelajarinya dari lingkungan.
5. Anak belajar banyak melalui gerakan-gerakan. Ia membutuhkan kesempatan untuk bergerak,

berekplorasi, belajar melalui alat inderanya.

6. Anak melewati masa-masa tertentu dalam perkembangannya dan lebih mudah untuk belajar, yang disebut dengan periode sensitive untuk belajar.
7. Semakin banyak kesempatan anak mengirimkan rangsangan-rangsangan sensori ke otak, maka semakin berkembang kecerdasannya.
8. Anak paling baik belajar dalam situasi kebebasan yang disertai disiplin diri. Anak harus bebas bergerak dan memilih kegiatan yang disenanginya didalam kelas dengan disertai disiplin diri.
9. Orang dewasa khususnya guru tidak boleh memaksakan anak untuk belajar sesuatu, dan tidak boleh mengganggu apa yang sedang dipelajari anak.
10. Anak harus belajar sesuai dengan taraf kematangannya, tanpa paksaan untuk menyesuaikan atau menjadi sama dengan anak lain.
11. Anak mengembangkan kepercayaan pada dirinya bila ia berhasil melaksanakan tugas-tugas sederhana.
12. Bila anak diberi kesempatan untuk belajar pada saat sudah siap "matang" untuk belajar, dia tidak saja akan dapat meningkatkan kecerdasannya tetapi juga akan merasakan kepuasan, menambah kepercayaan diri dan keinginan untuk belajar lebih banyak.

Berikutnya adalah Fredrich Wilhelm Froebel lahir di Jerman dan pada tahun 1837 memberikan sumbangan pemikiran mengenai sistem "*Garden of Chidren*" atau "*Kindergarten*" dengan model pembelajaran di luar rumah untuk anak usia 3-7 tahun.

Ada tiga prinsip yang dikemukakan olehnya, yaitu:

1. Otoaktifitas, kegiatan yang dilakukan anak sendiri atau bersifat individualisasi.
2. Kebebasan, tidak dibatasi dinding tertutup, perlu lingkungan terbuka.
3. Pengamatan, terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan.

Situasi pembelajarannya mencerminkan tiga F, yaitu:

1. Fridge atau perdamaian dalam pergaulan anak, pendidik dan orang di sekitar.
2. Frevde atau kegembiraan selama proses pembelajaran.
3. Frabeit atau kemerdekaan adanya kebebasan dalam situasi dan kondisi "iklim" pendidikan yang kondusif.

Demikian pula, Sarah Smilansky seorang guru besar di University Israel di Tel Aviv. Ia peduli terhadap psikologi anak dan mengemukakan tentang mengembangkan kognitif anak melalui permainan dengan 4 tahapan, yaitu bermain fungsional, bermain membangun, bermain pura-pura dan bermain dengan peraturan. Keempatnya dalam bentuk bermain, seperti: berlari-lari, menyusun balok kayu, bermain drama, bermain kartu domino.

Juga ada Jean Piaget seorang ilmuwan yang dilahirkan di Neuchatel, Swiss. Ia ahli dalam bidang biologi dan kemudian tertarik terhadap cara berpikir anak. Ia memperoleh gelar doktor pada usia 21 tahun dan menurut pandangannya, inteligensi anak berkembang melalui suatu proses *active learning* dimana anak diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera anak. Berdasarkan

hasil penelitiannya, Piaget mempunyai kesimpulan:

1. Anak bermain dan berpikir aktif dalam mengembangkan kognitif mereka.
2. Kegiatan mental dan berpikir sangat penting untuk mengembangkan kegiatan anak.
3. Pengalaman-pengalaman sebagai bahan mentah untuk mengembangkan struktur mental anak.
4. Anak berkembang melalui interaksinya dengan lingkungan.
5. Perkembangan terjadi sebagai hasil dari kematangan dan interaksi antara anak, lingkungan fisik dan sosial anak.

Selain itu, Piaget mengemukakan tentang konsep dasar yang dapat mendukung perkembangan anak, yaitu:

1. Semua orang membutuhkan belajar bagaimana membaca dan menulis.
2. Anak belajar dengan baik menggunakan panca inderanya.
3. Semua anak dapat dididik.
4. Semua anak harus dididik untuk memaksimalkan kemampuannya.
5. Pendidikan harus dimulai sejak dini.
6. Anak tidak harus dipaksa untuk belajar, tetapi harus sesuai dengan kesiapan belajar menekan dan harus mempersiapkan pada tahap selanjutnya.
7. Kegiatan belajar harus menarik dan berarti bagi anak.
8. Anak dapat belajar aktivitas berdasarkan ketertarikannya.

Dari Indonesia ada pendidik yang bernama Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan sistem among yaitu metode pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan

pada asih, asah dan asuh. Inti dari sistem among, yaitu:

1. *Ing ngarso sing tulodo*, artinya jika pendidik berada di depan wajib memberikan teladan bagi anak didik. Posisi ini sebaiknya lebih banyak diberikan kepada anak usia dini, tidak perlu banyak nasehat, petuah dan ceramah.
2. *Ing madya mangun karso*, artinya jika pendidik berada di tengah-tengah harus lebih banyak membangun atau membangkitkan kemauan sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mencoba berbuat sendiri. Anak usia dini sudah dapat mengerjakan, namun lebih tepat setelah taman kanak-kanak teladan pendidik masih diperlukan.
3. *Tut Wuri Handayani*, artinya jika pendidik di belakang wajib memberi dorongan dan memantau agar anak mampu bekerja sendiri. Penerapan dalam pendidikan berupa dorongan, penguatan, penghargaan dan sanksi sosial, sehingga pendidik bertugas mengembangkan cipta, rasa dan karsa.

Beberapa tokoh pendidikan anak usia dini di atas merupakan tokoh-tokoh yang perlu diperhitungkan pada masa kini, karena dari merekalah akhirnya Pendidikan Anak Usia Dini semakin dikenal oleh banyak orang dan mereka berlomba-lomba menyekolahkan anaknya sejak usia dini.

Anak usia dini yang ikut serta mengungsi pada saat bencana, setelah pasca bencana sudah dapat mengikuti pendidikan untuk anak usia dini yang ada di sekitar rumahnya. Dengan demikian tidak putus hubungan dengan teman seusianya. Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD adalah pendidikan untuk anak yang berusia antara 0-6 tahun yang perlu dilakukan di tingkat keluarga, sekolah dan komunitas untuk merangsang kreativitas, inovasi, disiplin mandiri, mampu bersosialisasi, dapat

memanage emosionalnya sejak dini agar dapat saling berbagi rasa, saling menghargai keinginan teman dan memberi masukan aspek moral dan budi pekerti, juga perlu diberikan pendidikan menurut kepercayaan masing-masing. Juga, pendidikan anak usia dini sangat menentukan keberhasilan kualitas anak di masa depannya. Kebutuhan tumbuh dan kembangnya anak yang meliputi gizi, kesehatan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang perlu diperhatikan sejak anak usia dini. Hasil penelitian terakhir mengungkapkan 50% perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia 0 – 4 tahun, sehingga bila anak kurang gizi, kurang diperhatikan kesehatan, pendidikan dan relasi sosialnya, maka perkembangan kecerdasannya akan tidak baik.

Perkembangan anak usia dini pada saat bencana terjadi dapat mengikuti pelayanan-pelayanan sosial di tempat pengungsian atau di tempat Hunian Sementara/*Huntara* yang diberikan oleh badan-badan internasional, lembaga-lembaga sosial dari dalam negeri, perorangan dan kelompok yang peduli bencana. Lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan sosial untuk anak, mempunyai satu tujuan, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan melalui permainan-permainan yang menyenangkan bagi anak usia dini, menghilangkan rasa egoisme, menumbuhkan rasa senasib, menumbuhkan rasa percaya diri, menghargai teman, menumbuhkan rasa persaudaraan. Dengan melalui bermain, maka tujuan-tujuan dari pelayanan sosial yang diberikan pada anak usia dini akan menambah nilai positif bagi anak karena menambah pengetahuan, pola berpikir dan wawasan pengetahuan.

United Nation High Comission for Refugee (UNHCR) sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani pengungsi menyebut bencana sebagai peristiwa atau kejadian berbahaya pada suatu daerah yang mengakibatkan

kerugian dan penderitaan manusia serta kerugian material yang hebat. Sedangkan *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan bencana alam sebagai suatu gejala ekologis yang merusak dan membuat penderitaan bagi manusia dan membutuhkan bantuan dari pihak eksternal. Demikian pula, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi menjelaskan yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Melihat beberapa definisi tentang bencana, maka jika terjadi bencana di sekitar tempat tinggal kita akan dengan cepat ditanggapi masyarakat sekitar bencana dan jangan menjadi panik karena tanda-tanda bencana sudah dapat diketahui dari awal jika manusia bersahabat dengan alam. Jika banyak anak usia dini di lokasi pengungsian perlu cepat dikembangkan konsep psiko-sosial untuk anak usia dini, agar pasca bencana tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi perkembangan anak.

Tujuan program-program pelayanan sosial pada saat bencana akan menambah pengetahuan, daya pikir dan wawasan anak sejak usia dini melalui kegiatan belajar bersama secara terjadwal dalam bidang pengetahuan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, agama, peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan anak, dan peningkatan pendidikan anak sejak usia dini. Pasca bencana, anak akan diikut sertakan oleh orang tuanya pada Kelompok Bermain di sekitar tempat tinggalnya.

D. Kesimpulan

Perkembangan anak usia dini pasca bencana perlu mendapat perhatian dari

pembuat kebijakan di tingkat pemerintah pusat, daerah dan lokal. Karena dalam dua puluh tahun mendatang anak tersebut akan menjadi dewasa dan merupakan sumber daya manusia Indonesia. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dari anak yang pernah mengalami bencana dan pernah tinggal di tempat pengungsian lalu kembali lagi kerumah atau dapat juga akhirnya menjadi tinggal di Hunian Sementara sambil menunggu rumah bantuan dari pemerintah karena rumah sebelumnya hancur. Diperlukan pelayanan sosial yang berkelanjutan dan tidak hanya sesaat untuk anak usia dini, karena perlu dibuat suatu kebijakan yang pro anak untuk membantu perkembangan anak pasca bencana.

Melalui Pendidikan Anak Usia Dini, anak-anak yang pernah tinggal di tempat pengungsian akan dapat bertemu kembali dengan teman-teman sepermainannya pasca bencana. Dengan mengikuti program pelayanan sosial pada waktu di tempat pengungsian dan dilanjutkan dengan memasukkan anak di Kelompok Bermain akan banyak manfaatnya pada perkembangan anak, karena melalui bermain anak merasakan suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari manapun. Bagi anak-anak, bermain adalah aktivitas yang dilakukan karena ingin, bukan karena harus memenuhi tujuan atau keinginan orang lain. Anak juga memandang bermain sebagai kegiatan yang tidak memiliki target. Mereka dapat saja meninggalkan kegiatan bermain kapan pun mereka mau. Dengan demikian, bermain sangat penting bagi anak karena membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak pada usia dini mempunyai energi yang berlebih dan mendorong anak untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Demikian pula dalam

bermain anak belajar merespon dan belajar peran-peran tertentu dalam kehidupan, seperti: peran dokter, perawat, tentara, pedagang, petugas kebersihan, penyanyi, pembaca sajak, kolektor perangko dan bekerjasama dengan kelompok.

Bermain bagi anak usia dini memberikan kontribusi tunggal pada semua aspek perkembangan anak. Bermain mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak, juga melalui bermain anak dapat terlibat di berbagai kegiatan yang sangat baik bagi pengembangan fisik, emosi dan sosial. Permainan merupakan hubungan antara ketentuan dan konsekuensinya, karena sangat mempengaruhi sifat perkembangan anak secara kompleks dan melalui suatu proses secara bertahap pada awal perkembangan anak.

Pengaruh bencana pada perkembangan anak usia dini pada pasca bencana tidak mempengaruhi perkembangan psikologi anak, karena banyaknya pelayanan-pelayanan sosial bagi anak pada saat bencana dan pasca bencana. Hal ini karena banyaknya Kelompok Bermain yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang peduli pada perkembangan anak usia dini.

Daftar Pustaka

- _____. 2007. *Child Development*. Eleventh Edition. USA, Bangkok, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto: McGraw-Hill.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga. (2004). *Ensiklopedia Pekerjaan Sosial Indonesia*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia–Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan
- Kuper, Adam & Kuper, Jessica. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santrock, Jhon W. 2002. *Life-Span Development*. Eighth Edition. USA, Bangkok, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto: McGraw-Hill
- Scarlett W. George, Naudeau, Sophie, Saloni, Dorothy-Pasternak, Ponte, Iris. 2005. *Children's Play*. United States of America: Sage Publications
- Sdorow, Lester M and Rickabaugh Cheryl.A. (2002). *Psychology*. Fifth Edition, USA, Bangkok, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto: McGraw-Hill
- Semiawan, Conny R. 2007. *Landasan Pembelajaran dalam Perkembangan Manusia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pusat Pengembangan Kemampuan Manusia

Jurnal & Majalah

- _____. 2007. *Psychosocial Care for Adult and Child Survivors of the Tsunami Disaster in India*. Washington D.C. 20057: Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing. Georgetown University
- _____. 2011. *Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Komunitas*. Salatiga: Widya Sari-Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah dan Sosial Budaya UKSW
- _____. 2011. *Peran Keluarga pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: WUNY-Majalah Ilmiah Populer Universitas Negeri Yogyakarta
- Anggraeni, R.A. 2006. *Penanganan Bencana Berbasis Komunitas (Studi Kasus Bencana Gempa Bumi di Kampung Basen – Kelurahan Purbayan – Kecamatan Kotagede – Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Riau: Siasat – Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Islam Riau
- Becker, Susan M. 2006. *Psychosocial Care for Adult and Child Survivors of the 2004 Tsunami Disaster in India*. Washington DC. 20057: American Journal of Public Health-Georgetown University.
- Becker. Kathryn A.-Blease. 2010. *Disasters, Victimization, and Children's Mental Health*. Oregon: Child Development Oregon State University
- Cojocar, Stefan. Cojocar, Daniela. Bunea, Ovidiu. 2010. *Family Strengthening Program. Evaluation Report*. www.asistentasociala.ro

- Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Perkembangan Pelayanan Pengembangan PAUD di 50 Kabupaten Tertinggal*. Jakarta: Direktorat PAUD
- Dogan, Aysun-Ates. 2010. *Developmental Differences in Children's and Adolescents' Post-Disaster Reactions*. Turkey: Issues in Mental Health Nursing-EGE University
- Masten, Ann S. 2010. *Disasters and Their Impact on Child Development: Introduction to the Special Section*. Minnesota: Child Development University of Minnesota, Twin Cities

Data

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. *Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Provinsi Tahun 2007/2008*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan-Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

PERSPEKTIF GENDER DALAM PENELITIAN KEHUTANAN

Rubangi Al Hasan
Badan Litbang Kementerian Kehutanan

Abstract

The forestry research that used gender perspective is still rare. The forestry research more often used the conventional analytical perspective by excluding the gender concept. This condition cause the women voice was left out from the analysis of the research. In the other hand, women have the different aspirations from the man. As a result, the research had a gender bias and did not reflect the actual situation. When the result of the research became a base of public policy making, it will produce the unbalance policy. This paper aimed to analyze the gender perspective on forestry research. This analysis was expected to be able to answering the question about how far the gender perspective was put into forestry researches.

Keywords: Gender perspective, Research, Forestry, Research methodology

A. Pendahuluan

Kajian ilmiah tentang relasi gender dan kehutanan sampai saat ini dapat dikatakan belum banyak yang mengupasnya. Hal ini mungkin disebabkan, hutan merupakan wilayah yang jauh dari episentrum intelektual yang berbasis perguruan tinggi di kota-kota besar. Sebagai akibatnya, studi tentang gender lebih banyak terkonsentrasi pada kajian mengenai ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan pada sektor-sektor publik yang lebih bersifat *urban* sentris seperti isu akses dalam dunia kerja profesional, perempuan dan pariwisata, sampai dengan isu perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan.

Pemikiran tersebut merupakan asumsi penulis yang sedapat mungkin harus diuji keabsahannya. Untuk itulah tulisan ini akan mencoba menggali perspektif penelitian gender dalam bidang kehutanan. Titik berangkat tulisan ini berawal dari asumsi

bahwa penelitian tentang kehutanan selama ini lebih didominasi penelitian konvensional yang tidak memakai perspektif gender dalam analisisnya. Penelitian konvensional jika dilihat dari perspektif gender mengandung bias gender karena memiliki kecenderungan meminggirkan suara perempuan dalam analisis penelitiannya. Suara perempuan dianggap sudah terwakili oleh suara kaum laki-laki sembari menyatakan bahwa yang menentukan segala urusan, baik urusan keluarga maupun urusan publik adalah kaum laki-laki. Pendapat semacam ini mengakibatkan suara dan aspirasi kaum perempuan tidak terakomodasi.

Dari pemaparan tersebut, akhirnya tulisan ini akan mencoba mengupas konteks gender dan kehutanan dikaitkan dengan metodologi penelitian sosial. Secara khusus, tulisan ini bermaksud melihat

sejauhmana perspektif gender dijalankan dalam penelitian kehutanan.

B. Paradigma dalam Penelitian Sosial

Dalam metodologi penelitian sosial, dikenal konsep paradigma. Paradigma adalah asumsi dasar dan cara pandang terhadap suatu realitas. Friedrich mendefinisikan paradigma sebagai gambaran yang mendasar mengenai pokok permasalahan dalam suatu disiplin (Awang, 2007). Dalam penelitian sosial sendiri terdapat tiga paradigma penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosial. Ketiga paradigma ini menekankan pada hakikat dasar kenyataan sosial. *Pertama*, paradigma fakta sosial. Paradigma ini memandang kenyataan sosial dari aspek struktur sosial dan institusi sosial. Penggagas utama teori ini adalah Emile Durkheim. *Kedua*, paradigma perilaku sosial. Paradigma ini berpandangan bahwa kenyataan sosial dapat diperoleh dari pengamatan secara empiris terhadap perilaku individu. Dalam pandangan paradigma ini, suatu pengetahuan tentang kenyataan sosial dapat dikatakan objektif jika didasarkan pada data empiris. Tokoh dari paradigma ini adalah BF. Skinner dan George Homans. *Ketiga*, paradigma definisi sosial. Paradigma ini memiliki pandangan bahwa kenyataan sosial dikonstruksi berdasarkan definisi individu dan pengertiannya terhadap suatu realitas. Interaksi antar individu memberikan konfirmasi mengenai definisi dan pengertian yang ada sehingga kemudian diterima dalam kerangka pengertian kolektif. Tokoh dari paradigma ini adalah Max Weber dan Talcott Parson (Ritzer, 2002; Ritzer dalam Awang, 2007).

Paradigma memegang peranan penting dalam penelitian sosial. Ketika seorang peneliti memakai satu paradigma, maka pandangan dan langkah yang dilakukan dalam memahami realitas dan dalam

melakukan penelitian akan dibimbing oleh paradigma yang ia anut. Thomas Kuhn sendiri menyatakan apabila seorang peneliti masuk dalam suatu paradigma tertentu maka komitmen terhadap paradigma itu melampaui komitmen rasional dan intelektualnya (Awang, 2007).

Setelah hakekat paradigma dalam penelitian sosial dijabarkan, selanjutnya perlu juga dijelaskan makna penelitian itu sendiri. Penelitian pada hakikatnya adalah upaya sistematis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai realitas yang diteliti. Upaya sistematis dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk metodologi penelitian yang mengatur langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Selain mengatur langkah-langkah yang dilakukan pada suatu tahap penelitian, sebagai konsekuensinya metodologi penelitian juga mengatur mengenai apa yang tidak (boleh) dilakukan dalam kerja-kerja penelitian. Karakter metodologi penelitian yang semacam itu berpengaruh terhadap temuan yang diperoleh. Suatu penelitian terhadap permasalahan yang sama, namun menggunakan kerangka metodologi yang berbeda, pada gilirannya akan mendapatkan temuan penelitian yang berbeda pula. Pemaparan tersebut semakin menjelaskan bahwa analisis terhadap suatu permasalahan bergantung pada pisau analisis atau metodologinya. Metodologi sendiri dibangun atas dasar paradigma yang digunakan oleh peneliti.

Berbicara dalam konteks yang lebih praktis, khususnya mengenai metodologi penelitian sosial dalam bidang kehutanan, kita juga akan menjumpai beragam metodologi penelitian. Tiap metodologi memiliki kaidahnya masing-masing sesuai dengan paradigma penelitian yang dipakai. Jika kita melakukan penelitian mengenai kemiskinan masyarakat sekitar hutan, kita mungkin akan berbicara mengenai aspek-

aspek kemiskinan, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan; akses masyarakat terhadap sumber daya hutan; dan program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Dari aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian tersebut, kita menjumpai bahwa yang diteliti adalah aktor atau subjek yang berwujud manusia, baik masyarakat sekitar hutan, maupun *stakeholder* terkait permasalahan kemiskinan tersebut.

Berkaca pada beragam penelitian yang telah dilakukan, dijumpai bahwa penelitian yang ada belum memiliki perspektif gender. Penelitian terhadap masyarakat secara umum masih merepresentasikan dominasi laki-laki atas perempuan. Penelitian terhadap masyarakat tidak mengakomodasi perempuan sebagai suatu entitas yang menentukan dan berpengaruh dalam dinamika masyarakat. Seperti telah dijelaskan di muka, suatu penelitian banyak ditentukan oleh paradigma yang dipakai. Penelitian-penelitian sosial konvensional yang ada tidak banyak mengakomodasi perempuan sebagai bagian penting yang masuk dalam analisis penelitian. Paradigma penelitian yang ada berwatak patriarkis dan berpandangan bahwa yang memiliki suara hanya kaum laki-laki. Asumsi ini kemudian berlanjut pada hal yang lebih makro yakni bahwa yang menentukan alur sejarah adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan lebih dipandang sebagai pihak yang pasif dan hanya sebagai penikmat hasil dari apa yang diupayakan oleh kaum laki-laki.

Asumsi yang sudah mengakar dalam paradigma penelitian konvensional tersebut kemudian mendapatkan tentangan dari kalangan yang menganggap bahwa paradigma penelitian konvensional mengandung kelemahan yang mendalam. Jika dalam paradigma penelitian konvensional, kaum perempuan tidak dimasukkan

dalam analisis penelitian, dan lebih dipandang sebagai pihak yang pasif dan hanya menikmati hasil kerja laki-laki, justru asumsi semacam ini telah menjadikan kaum perempuan sebagai korban (*victim*). Berawal dari kontradiksi semacam ini akhirnya muncul perspektif penelitian yang banyak memasukkan kaum perempuan dalam domain penelitian sosial. Dari sini kemudian lahir apa yang disebut dengan mazhab feminisme dalam penelitian sosial. Mazhab ini lahir dengan tujuan membangun sebuah konsep penelitian yang tidak bersifat bias gender. Lebih jauh, mazhab ini bertujuan membangun budaya keilmuan yang berwatak emansipatif terhadap kaum perempuan (Hayati, 2006).

C. Institusionalisasi Penelitian Berperspektif Gender

Wacana mengenai kesetaraan gender sebenarnya bukan merupakan isu yang baru, baik dalam konteks keilmuan, politik, sampai dengan kebijakan publik. Hal ini bisa ditilik dalam sejarah, pengakuan dunia terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan sudah ada sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak dalam konsep kesetaraan gender di hadapan hukum. Meskipun begitu, kesetaraan gender sebagai sebuah gerakan dan program secara kongkret baru dirintis pada waktu konferensi perempuan pertama tahun 1975 di Mexico. Dari konferensi tersebut diperoleh gambaran bahwa di negara manapun status perempuan lebih rendah dibanding laki-laki dan lebih terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat hasil pembangunan (BKKBN, Kemeneg PP, dalam Marhaeni, 2008). Setelah konferensi tahun 1975, oleh PBB tahun 1976-1985 disebut sebagai dasawarsa perempuan, dan setelah tahun tersebut topik bahasan mengenai

perempuan berkembang pesat pada semua bidang (Marhaeni, 2008).

Ketika isu gender di dunia internasional begitu santer diwacanakan, di Indonesia juga terdapat kecenderungan yang sama. Pusat kajian gender banyak didirikan di banyak perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai varian namanya. Pusat kajian gender yang cukup awal didirikan, antara lain di UI dengan nama Pusat Kajian Gender dan Seksualitas (Puskagenseks), IPB dan UGM dengan nama Pusat Studi Wanita (PSW), dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan nama Pusat Penelitian dan Studi Gender (PPSG). Setelah itu perguruan tinggi lain di daerah-daerah juga banyak mendirikan pusat kajian gender dengan beragam namanya.

Tabel 1

Fokus Kajian pada Empat Pusat Kajian Gender

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Meskipun memiliki label yang sama dalam konteks kajian, namun pusat kajian gender pada masing-masing perguruan tinggi mengembangkan fokus kajian sendiri, meskipun pada banyak tempat terdapat beberapa kesamaan. Puskagenseks UI (Anonim, 2008) misalnya lebih memfokuskan pada kajian mengenai gender dalam kaitannya dengan seksualitas. Kajian yang diangkat misalnya isu mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Meskipun fokus kajiannya adalah gender dan seksualitas, Puskagenseks UI juga

melakukan penelitian gender dan politik, salah satunya terkait keterpilihan perempuan dalam kursi legislatif. PSW IPB (Amanah, 2009) mengembangkan kajian gender dengan menekankan pada *core science* yang digeluti IPB sendiri yakni bidang pertanian dalam pengertian umum. Pada awal berdirinya PSW di IPB penelitian yang dilakukan banyak yang merupakan kerja sama dengan institusi lain, baik pemerintah/departemen maupun lembaga pendidikan tinggi lain. Kajian yang pernah dilakukan PSW IPB misalnya mengenai peranan perempuan dalam sektor produktif dan reproduktif di pedesaan (bekerja sama dengan Departemen Pertanian), kajian mengenai perempuan dan lingkungan hidup (bekerja sama dengan kantor Kementerian Lingkungan Hidup), kajian tentang perempuan dan perhutanan sosial (kerja sama dengan Departemen Kehutanan). Selain kajian-kajian tersebut, PSW IPB juga melakukan kajian-kajian lain yang lebih bersifat umum dan juga melakukan pelatihan di antaranya pelatihan metodologi penelitian berperspektif gender.

Jika UI lebih menitikberatkan pada kajian seksualitas, dan IPB lebih fokus pada kajian gender dalam konteks pertanian, PSW UGM (Anonim, 2010) memiliki program yang lebih bersifat integratif. Program tersebut adalah penelitian berperspektif gender yang bersifat multidisiplin. Hal ini terkait dengan UGM sebagai perguruan tinggi terbesar di Indonesia dengan 18 fakultas yang mencerminkan beragamnya disiplin ilmu yang ada. Program ini didukung dengan diadakannya pelatihan metodologi penelitian berperspektif gender. Selain itu juga diadakan kegiatan advokasi gender. Sementara itu PPSG UKSW (Anonim, 2003) banyak mengembangkan kajian gender pada konteks ekonomi masyarakat kelas bawah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain itu juga dikembangkan program kajian gender dan

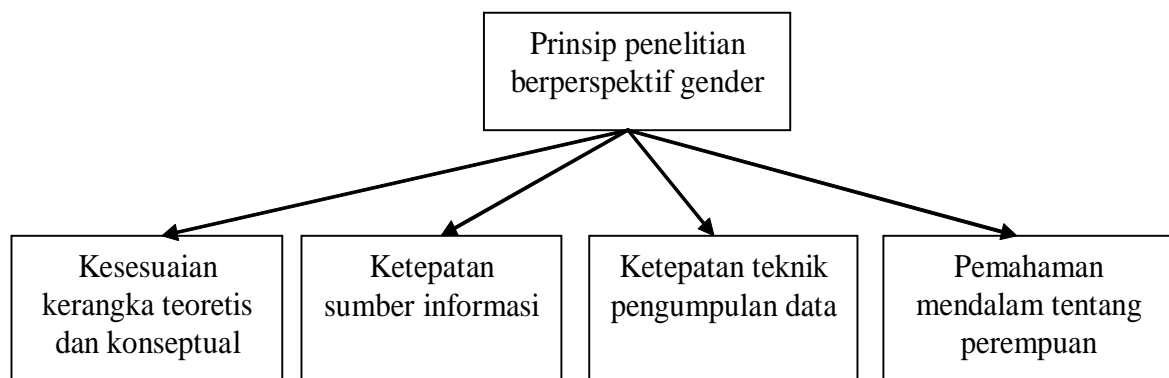
kebijakan publik dan gender pada kawasan daerah tertinggal di Indonesia.

D. Prinsip Pokok Penelitian Berperspektif Gender

Penelitian tentang gender sudah banyak sekali dilakukan dan mencakup aspek yang sangat beragam. Dalam kenyataannya penelitian-penelitian tersebut tidak berhasil mengurai permasalahan, alih-alih melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena penelitian yang dilakukan tidak memiliki wawasan gender. Wawasan gender adalah sebuah konsep penelitian yang mampu merespons kondisi subjektif perempuan sehingga mampu menggali permasalahan perempuan. Irwan

Abdullah (2003) memetakan setidaknya ada empat prinsip yang harus dipegang dalam penelitian sosial berperspektif gender.

Pertama, penelitian gender harus memperhatikan kesesuaian kerangka teoretis dan konseptualnya. Untuk mempertajam analisis tersebut dibutuhkan pemahaman teori-teori gender secara lebih mendalam. Sebagai contoh bila kita akan mengkaji masalah perkosaan, kita tidak akan benar-benar mendapatkan perspektif perempuan jika kita mengkajinya dengan analisis konflik. Kita akan lebih tepat jika menggunakan kerangka pendekatan teori ketimpangan gender atau teori reproduksi kekuasaan.



Gambar 1. Prinsip Penelitian Berperspektif Gender

Kedua, pemilihan sumber informasi harus memperhatikan suara perempuan. Kecenderungan selama ini dalam penelitian sosial, peneliti selalu mencari informan laki-laki. Informan perempuan baru dimasukkan jika bahasan dalam penelitian terkait dengan permasalahan perempuan. Prosedur penelitian semacam ini menyebabkan informasi penelitian yang didapat bersifat bias gender. Jika informan penelitian hanya laki-laki, maka informasi yang muncul hanya merepresentasikan suara laki-laki. Meskipun penelitian yang dilakukan bersifat umum, namun informan dari pihak perempuan harus dimunculkan agar

perspektif perempuan muncul dalam analisis dan hasil penelitian.

Ketiga, pemilihan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data harus mampu merekam seluas-luasnya permasalahan yang terkait dengan perempuan. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu memperhatikan metode pengumpulan data yang sesuai dan benar-benar mampu menampung suara perempuan. Metode *life history* dapat dipilih untuk mendapatkan gambaran subjektif perempuan dalam menjelaskan pengalamannya yang membentuk konsep diri perempuan tersebut.

Keempat, pemahaman yang mendalam tentang perempuan dan hubungan-hubungan gender dapat diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data yang tepat. Teknik analisis data tersebut sebisa mungkin dapat menghadirkan perspektif perempuan. Penelitian sering kali lemah dalam analisis karena hanya menampilkan dalam bentuk tabel tanpa ada analisis data yang sesuai dengan menggunakan metode yang tepat sehingga mampu menghadirkan perspektif perempuan secara lebih luas.

E. Perspektif Gender dalam Penelitian Kehutanan

Berbicara tentang ada tidaknya perspektif gender dalam penelitian, sebagaimana telah dijelaskan oleh Irwan Abdullah, dapat dilihat dari seberapa besar prinsip-prinsip penelitian tersebut memasukkan perspektif gender ke dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan peneliti pada pemahaman terhadap masalah gender sehingga masalah yang ada dipahami secara komprehensif. Pemahaman yang komprehensif selanjutnya ditindaklanjuti dengan metodologi penelitian yang tepat sehingga akan mendapatkan informasi yang benar-benar memiliki perspektif gender.

Prinsip-prinsip penelitian berperspektif gender sebisa mungkin terkandung pada semua bidang penelitian, tidak terkecuali berlaku juga bagi penelitian bidang kehutanan. Jika hal tersebut direfleksikan pada institusi di lingkup kementerian kehutanan, terutama Badan Litbang Kehutanan, maka hal tersebut harus sudah menjadi *mainstream* lembaga dalam melaksanakan penelitian di bidang kehutanan. Keharusan dimasukkannya perspektif gender dalam penelitian kehutanan tidak dapat dielakkan dengan alasan, *pertama*, *gender mainstreaming* merupakan gerakan global dan bahkan telah ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, dan sudah diratifikasi oleh

negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Ratifikasi tersebut bersifat mengikat secara hukum (*legal binding*) terhadap setiap negara anggotanya. *Kedua*, kebijakan *gender mainstreaming* merupakan kebijakan negara dan sekaligus kebijakan Kementerian Kehutanan yang telah memiliki kekuatan hukum yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 299 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) tingkat Departemen Kehutanan, (selanjutnya Kepmenhut) (Anonim, 2007).

Setelah dibentuk Pokja PUG di lingkup Kementerian Kehutanan, Pokja PUG tersebut kemudian diberi tugas yaitu, (1) mendorong terwujudnya pelaksanaan gender di sektor kehutanan dengan menerapkan pengarusutamaan gender ke dalam setiap perencanaan yang disusun; (2) memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan kehutanan; (3) melakukan pembinaan pengarusutamaan gender kepada aparat kehutanan; (4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup departemen kehutanan; (5) melakukan koordinasi lintas instansi/ lembaga dan unit kerja eselon I lingkup departemen kehutanan.

Kepmenhut di atas memberikan penjelasan bahwa instansi di lingkup Kementerian Kehutanan wajib melaksanakan program *gender mainstreaming* dalam segala level dan tahapan pelaksanaan kegiatannya, termasuk di sini adalah kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam konteks pengambilan kebijakan. Dalam iklim birokrasi modern, setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, maupun keilmuan. Pertimbangan tersebut menjadi prasyarat dimana sebuah

keputusan harus didasarkan pada penelitian yang validitasnya benar-benar teruji. Salah satu poin validitas penelitian tersebut adalah muatan perpektif gender dalam penelitian. Poin ini masuk karena Kemenhut telah memasukkan *gender mainstreaming* pada seluruh level kebijakan dan kegiatannya.

Pertanyaan selanjutnya, sudahkah penelitian kehutanan selama ini memasukkan perspektif gender dalam analisisnya. Harus diakui bahwa penelitian dalam bidang kehutanan yang telah memasukkan perspektif gender masih sedikit. Memang tidak terdapat angka pasti tentang itu, namun informasi tersebut dapat dibaca dari beragam publikasi, berupa jurnal-jurnal ilmiah baik terbitan badan-badan litbang maupun perguruan tinggi. Dari penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa publikasi lembaga, terdapat beberapa penelitian dalam kaitannya dengan kehutanan yang menekankan perspektif gender dalam analisisnya.

Penelitian yang relatif awal tentang kajian gender dan kehutanan dapat dilihat pada karya Pudjiwati Sajogjo (1990), yang pernah menjadi ketua PSW IPB. Studi yang dilakukan berjudul *Peranan Wanita dalam Perhutanan Sosial: Suatu Studi Integrasi Wanita dalam Pembangunan Kehutanan Menuju Era Tinggal Landas*. Karya lain yang diterbitkan IPB adalah penelitian yang dilakukan oleh Didik Suhardjito dan S. Sarwoprasodjo (1996). Judul penelitian tersebut adalah *Organisasi Keluarga dan Status Wanita: Studi Kasus Peranan Wanita pada Keluarga Penyadap Getah Pinus dan Keluarga Petani Hutan Rakyat*. Kedua penelitian tersebut memiliki kecenderungan pada pendekatan *Women in Development* (WID) dengan lebih menekankan pada aspek integrasi perempuan dalam pembangunan kehutanan. Penelitian kehutanan dengan perspektif gender yang menggunakan

paradigma *Gender and Development* (GAD) dapat ditemukan pada karya LWF. Rahayu dengan judul *Gender dalam Program Pembangunan Hutan*. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Hutan Rakyat UGM.

Sementara itu, Badan Litbang Kehutanan Kementerian Kehutanan juga menerbitkan tulisan tentang kehutanan dan perempuan. Tulisan tersebut antara lain karya Kresno Agus Hendarto (2002), *Ekowisata dan Peranan Perempuan*. Tulisan ini banyak mengupas sisi keterlibatan perempuan dalam mendukung pembangunan pariwisata alam berwawasan ekologi atau yang dikenal dengan ekowisata. Selain tulisan tersebut, Hendarto (2003) juga menulis tema lain, *Peningkatan Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial*. Tulisan ini lebih banyak berbicara pada aspek peran perempuan dalam program perhutanan sosial. Perempuan diharapkan memiliki peran yang setara dengan laki-laki terkait kontribusinya dalam pembangunan perhutanan sosial.

Selain penelitian di atas, terdapat juga penelitian dan makalah yang merupakan produk lembaga penelitian kehutanan internasional, salah satunya adalah dari *Center for International Forestry Research* (CIFOR). Publikasi CIFOR menunjukkan beberapa tulisan yang berdiskusi tentang gender dan kehutanan. Salah satunya adalah penelitian Agusnawati (2006) yang berjudul *Peran Kaum Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Masyarakat Pengelola Hutan Kemiri di Mario Pulana*. Dari judul tulisan sudah dijelaskan mengenai fokus kajian penelitian ini yaitu melihat peran kaum perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan kemiri. Publikasi CIFOR yang lain berupa buku yang berisi kumpulan tulisan berjudul *Dari Desa Ke Desa: Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*. Buku terbitan tahun 2007 tersebut memuat 11 tulisan yang mengupas masalah sekitar

gender dan kehutanan dari para akademisi perguruan tinggi, peneliti lembaga litbang pemerintah, aktivis LSM perempuan, dan dari staf peneliti CIFOR sendiri. Tulisan dalam buku tersebut merentang dari penyelamatan kupu-kupu di Bantimurung, konservasi bakau di Kutai Timur, Kaltim, sampai dengan rehabilitasi lahan di Sukabumi, Jawa Barat. Tulisan-tulisan yang ada sebagian besar bernuansa lokal namun berbicara pada konteks yang sama, pemberdayaan perempuan dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan hidup.

Penelitian tentang gender dan kehutanan ada juga yang merupakan penelitian mahasiswa sebagai karya skripsi. Penelitian tersebut misalnya karya Ageng Rara Cindoswari (2008), mahasiswa IPB. Judul penelitiannya, *Analisis Gender dalam Gerakan Rehabilitasi Lokal Hutan Mangrove Pada Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (Papeling) di Desa Sidodadi, Kec. Padang Cermin, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung*. Penelitian ini mengambil tema studi akses dan kontrol kaum perempuan terhadap gerakan rehabilitasi mangrove dengan mengambil sampel pada kelompok masyarakat peduli lingkungan (Papeling). Penelitian lain yang merupakan karya skripsi misalnya adalah penelitian Abdul Rohman (2005) yang mengambil judul *Analisis Gender dalam Kontribusi Pembangunan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus RPH Krucil, BKPH Bermi, KPH Probolinggo)*. Penelitian ini menganalisis diferensiasi gender dalam hubungannya dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan.

F. Penutup

Penelitian dalam bidang kehutanan selama ini telah banyak dilakukan dan dipublikasikan. Dari sekian banyak penelitian yang ada, dirasakan masih sedikit yang telah memasukkan perspektif gender dalam proses dan analisis penelitiannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perspektif gender belum begitu akrab di mata para peneliti kehutanan, baik yang ada di lembaga-lembaga penelitian pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi. Melihat kondisi yang ada, perlu kiranya dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan perspektif gender sebagai *mainstream* dalam setiap penelitian pada ranah kehutanan. Salah satu hal yang dapat dilakukan misalnya dengan pelatihan dan *workshop* metodologi penelitian berperspektif gender.

Kebutuhan akan pengetahuan metodologi berperspektif gender bagi peneliti bidang kehutanan dirasa sangat urgen. *Gender mainstreaming* merupakan wacana global dan sudah menjadi program pemerintah, termasuk Kementerian Kehutanan, sehingga secara *legal*, keberlangsungan program tersebut harus dipertanggungjawabkan. Untuk melaksanakan program tersebut, tentu sangat perlu disiapkan infrastrukturnya, terkhusus dalam hal ini sumber daya manusia peneliti bidang kehutanan. Peneliti kehutanan sangat perlu memahami perspektif gender dan mendasarkan penelitiannya pada perspektif tersebut agar penelitian yang dilakukan benar-benar tidak bias gender. Penelitian dengan perspektif gender pada akhirnya menghasilkan produk penelitian yang *reliable* untuk diaplikasikan bagi kepentingan publik yang berasas kesetaraan dan keadilan gender.

Daftar Pustaka

- _____. 2003. *Peningkatan Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial*. Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Vol. 4. No. 1
- Abdullah, Irwan. 2003. *Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial*. Jurnal Humaniora. Vol. XV. No. 3
- Agusnawati. 2006. *Peran Kaum Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Masyarakat Pengelola Hutan Kemiri di Mario Pulana*. Governance Brief No. 28 Juni
- Anonim, 2007. *Pengarusutamaan Gender Lingkup Departemen Kehutanan*
- Anonim, 2003. *Pusat Penelitian dan Studi Gender UKSW*
- Awang, SA. 2007. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Jogjakarta: Kreasi Wacana dan CCSS
- Condoswari, AR. 2008. *Analisis Gender dalam Gerakan Rehabilitasi Lokal Hutan Mangrove Pada Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (Papeling) di Desa Sidodadi, Kec. Padang Cermin, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung*. Skripsi. Fakultas Pertanian IPB. Bogor
- Hayati, EN. 2006. *Ilmu Pengetahuan + Perempuan = ...*. Jurnal Perempuan. No. 48
- Hendarto, KA. 2002. *Ekowisata dan Peranan Perempuan*. Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Vol. 3. No. 2
- Indriatmoko, Y, dkk. (ed.). 2007. *Dari Desa Ke Desa: Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*. Bogor: CIFOR
- Marhaeni, AAIN. 2008. *Perkembangan Studi Perempuan, Kritik dan Gagasan Sebuah Perspektif untuk Studi Gender ke Depan*. Jurnal Piramida. Vol. 4. No. 1
- Rahayu, LWF. 2001. *Gender dalam Program Pembangunan Hutan*. Jurnal Hutan Rakyat. Vol III. No. 1
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Rohman, Abdul. 2005. *Analisis Kontribusi Gender dalam Pembangunan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus RPH. Krucil. BKPH Bermi, KPH Probolinggo)*. Skripsi. Fakultas Pertanian UMM. Malang
- Sajogjo, Pudjiwati. 1990. *Peranan Wanita dalam Perhutanan Sosial: Suatu Studi Integrasi Wanita dalam Pembangunan Kehutanan Menuju Era Tinggal Landas*. Bogor: IPB
- Suhardjito, D., S. Sarwoprasodjo. 1996. *Organisasi Keluarga dan Status Wanita: Studi Kasus Peranan Wanita pada Keluarga Penyadap Getah Pinus dan Keluarga Petani Hutan Rakyat*. Bogor: LP-IPB

Sumber Lain

- Amanah, Siti. 2009. *Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Website: www.psp3ipb.or.id.
- Anonim, 2005. *Keputusan Menteri Kehutanan No. 299 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) tingkat Departemen Kehutanan*. Website: www.dephut.go.id.

Anonim, 2010. Pusat Studi Wanita UGM. Website: www.psw.ugm.ac.id.

Anonim, 2008. Profil Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI. Website: <http://genseks.fisip.ui.ac.id>.

Website: www.dephut.go.id.

Website: www.genderswcu.blogspot.com.

PENGEMBANGAN INSTITUSI PENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN

Siti Zunariyah
Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

*The development of this institution is built from the determination of rules of organization that includes the rights and obligations of each member, the redistribution of land, assurance management rights, conflict resolution and optimization of the village's role in the development of community forestry. **First**, the pattern of institutional development is built in a participatory manner to produce a pattern of collaborative forest management in order to achieve social welfare and sustainable forest management. **Second**, patterns of local institutional development success is largely determined by three factors, namely physical condition and characteristics of local natural resources, political economy factors at the international, national and local factors and local political and social dynamics. These three factors are interrelated to one another and may change from time to time and in certain contexts.*

Keywords: *Institution development, Community forestry*

Institusi dalam konsep ini bukan sekedar dalam pengertian umum yang berarti organisasi atau lembaga. Institusi di sini diartikan seperti apa yang dipahami oleh para pengamat ilmu sosial yaitu sebagai aturan baik formal maupun informal yang digunakan dan dipraktekkan (*rule in use*) oleh masyarakat di suatu tempat yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Atau terkadang ada yang mengartikan institusi sebagai "*rule of the game*" (aturan main). Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, aturan-aturan ini mengatur siapa yang berhak untuk membuat keputusan tentang pemanfaatan dan pengelolaan, aktivitas apa saja yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan, aturan mana saja yang akan digunakan dan bagaimana seseorang dapat memperoleh akses terhadap sumberdaya

tertentu (Ostrom, 1990). Aturan-aturan ini dapat bersumber dari praktek-praktek sehari-hari yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat setempat. Praktek sehari-hari ini dapat saja berupa hasil dari praktek yang sudah diketahui secara turun-temurun tapi dapat pula merupakan aturan main baru yang merupakan respon dari situasi masa kini, atau dapat pula merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh anggota suatu organisasi. Sumber lain aturan ini adalah dari aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam implementasinya, berbagai sumber aturan ini dapat saling menunjang dan melengkapi, akan tetapi dapat pula diimplementasikan secara parsial oleh aktor-aktor di lapangan, atau malah bertolak belakang antara satu dengan lainnya sehingga berada dalam situasi saling tarik menarik pengaruh dan berkonflik.

Dengan demikian, bagaimana aturan ini dipraktekkan pada setiap tempat dapat berbeda-beda karena penggunaannya sebagian sangat tergantung pada aturan mana yang dipilih untuk digunakan dan berhasil dipaksakan atau ditegakkan(enforced) oleh aktor-aktor di lapangan baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat dalam interaksi mereka sehari-hari.

Kemampuan pemerintah untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di atas kertas pada dasarnya tidak sama di setiap tempat dan disetiap waktu karena sebagian besar tergantung pada sikap, motivasi dan interes pribadi dari pegawai-pegawai pemerintah di tingkat lapangan yang diharapkan dapat menegakkan aturan itu. Selain itu, adanya perlawanan dari rakyat setempat juga ikut menentukan kemampuan pemerintah untuk menegakkan aturan hukum yang seringkali dibuat tanpa konsultasi publik secara luas. Semakin kuat dan besar kelompok perlawanan ini, maka semakin sulit bagi pemerintah menegakkan aturan yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Bahkan bukannya tidak mungkin pemerintah bahkan (terpaksa) membiarkan rakyat mempraktekkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena ketidakmampuannya untuk menegakkan aturan karena kuatnya perlawanan rakyat.

Ada empat dimensi institusi yang dikembangkan dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat. Empat dimensi ini adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan Institusi yang Terkait dengan Pengaturan Tata Kuasa dan Tata Guna Lahan

Adanya kepastian akan akses dan kontrol terhadap lahan dan sumberdaya

hutan merupakan isu yang paling banyak diangkat dalam program yang mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Adanya kepastian akses atau penguasaan adalah salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan hutan yang lestari.

Konsep "bundle of right" (Shlager dan Ostrom, 1992) dalam hal ini dapat digunakan untuk menganalisa strategi dalam memberikan kepastian hak-hak tenurial untuk masyarakat atas kawasan hutan yang diklaim negara. Konsep bundle of right dapat juga digunakan untuk menjelaskan siapa yang punya hak untuk mengelola, mengatur, mengambil manfaat, hak untuk membatasi akses, dan hak untuk pengalihan kepemilikan lahan pada orang lain, tidak selalu berada dalam satu orang atau badan.

Dengan menggunakan konsep ini maka kita dapat menganalisis bagaimana kedudukan masyarakat dalam model-model pengelolaan hutan yang ada saat ini dan yang mungkin sedang dikembangkan atau didorong oleh berbagai pihak di luar pemerintah. Akan tetapi persoalan kepastian tenurial ini tidak hanya terkait dengan kejelasan akses atau kepemilikan property masyarakat saja, tetapi juga termasuk persoalan apakah diantara warga desa atau anggota kelompok tani atau adat terjadi (atau tidak terjadi) ketimpangan distribusi akses lahan dan sumberdaya hutan. Ketimpangan distribusi kepemilikan atau akses diantara warga masyarakat adalah persoalan yang sebenarnya sudah diketahui secara luas. Di banyak tempat akses terhadap lahan dan sumberdaya hutan ini seringkali lebih banyak dikuasai oleh para elit lokal dan tokoh-tokoh setempat yang punya pengaruh luas.

1. Redistribusi lahan

Institusi, baik dalam pengertian bentuk kelembagaan maupun pengaturan, penting artinya dalam pengelolaan hutan. Jauh sebelum program hutan

kemasyarakatan ini digulirkan, masyarakat telah terlibat dalam pengelolaan hutan negara melalui skema tumpang-sari maupun melalui okupasi lahan. Sehingga yang kemudian terjadi adalah ketimpangan penguasaan lahan oleh satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Konsep hutan kemasyarakatan tidak secara khusus memberikan penekanan pada aspek pemerataan dalam penguasaan lahan, akan tetapi dalam perkembangannya hal ini menimbulkan konflik meski masih bersifat latent. Oleh karenanya proses redistribusi lahan dilakukan pada masing-masing kelompok tani dengan memperhatikan kepemilikan lahan. Harapannya proses pemerataan pendapatan dapat terjadi sehingga tujuan pengembangan hutan kemasyarakatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Proses redistribusi lahan dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masyarakat berkumpul dan mengidentifikasi dan menginventarisasi lahan garapan masing-masing yang menyangkut luas, letak dan jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnya mereka melakukan identifikasi dan inventarisasi pula pada lahan milik mereka.

Empat kelompok tani yang melakukan proses redistribusi lahan bukannya berjalan mulus tanpa ada persoalan yang menghadang. Apalagi bagi masyarakat yang merasa telah berinvestasi cukup besar pada sejumlah lahan yang telah digarap. Proses mediasi dari aparat desa dan LSM pendamping menjadi sangat penting sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Pengaturan pembagian lahan juga dilakukan untuk mengakomodasi banyaknya anggota Kelompok tani

baru. Sebagaimana diketahui, "penguasaan" lahan pada awalnya didasarkan pada "keberanian" dan kemampuan untuk mengelola hutan negara. Sosialisasi Hutan Kemasyarakatan membuat banyak penduduk merasa berani dan mampu untuk mengelola hutan. Dengan jumlah anggota yang bertambah (sementara luas lahan tetap) membuat kelompok tani merasa perlu untuk mengatur kepenguasaan lahan. Prinsip yang secara umum dipakai adalah satu orang satu lahan dengan luas yang sama. Akibatnya ada yang merasa "rugi" karena harus melepaskan lahan yang telah digarapnya dan ada juga yang merasa "untung" karena memperoleh lahan garapan.

2. Menetapkan aturan internal kelompok
Salah satu implikasi paling penting dari proses Studi banding kelompok tani di Sesaot, Lombok adalah mulai disadari pentingnya membangun kesepakatan diantara anggota kelompok tentang mekanisme aturan internal pada masing-masing individu dalam kelompok tani. Sebelumnya mekanisme keorganisasian dalam kelompok tani hanya berjalan tanpa tujuan dan hanya mengalir bahkan nyaris hanya "sekedar berkumpul" saja di kalangan petani penggarap hutan. Penyusunan aturan internal ini didasari atas kebutuhan bahwa kejelasan hukum dan kepastian ijin pengelolaan hutan hanya akan diberikan kepada kelompok tani yang mampu mengelola hutan negara dengan baik. Sementara itu masing-masing anggota kelompok tani belum tentu memahami secara baik tentang hal tersebut. Oleh karena itulah penting kiranya untuk membangun kesepakatan bersama tentang hal-hal yang

boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pengelolaan hutan negara. Pengaturan lahan hanyalah salah satu aspek saja dari apa yang disebut paugeran atau aturan internal yang disusun bersamaan atau setelah pembaharuan organisasi. Secara umum paugeran disusun untuk beberapa hal berkaitan dengan kriteria menjadi anggota kelompok tani hutan untuk menggarap lahan, pengelolaan lahan garapan, pola tanam, keamanan hutan dan hak waris atas lahan garapan. Pembuatan mekanisme aturan internal kelompok menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sebagai salah satu hal yang membedakannya dengan organisasi formal dan non formal, sementara itu kelompok tani penerima ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan haruslah merupakan organisasi formal. Dengan begitu maka proses penyusunan aturan internal disesuaikan dengan visi dan misi masing-masing kelompok tani. Tidak hanya itu, dari beberapa pengalaman 4 Kelompok tani di kedua Desa ini, memberikan pelajaran akan pentingnya proses demokratisasi. Hal ini dapat tercermin dari proses pemilihan ketua kelompok tani yang tadinya hanya berdasarkan siapa yang paling berpengaruh di wilayah tersebut, kini sudah dilakukan pemilihan secara langsung. Alhasil, petani merasa puas, karena aspirasi mereka diberikan kepada orang yang tepat. Dari segi hak dan kewajiban diantara anggota kelompok tani juga diatur disini, termasuk bagaimana hak dan kewajiban mereka terhadap lahan garapan yang mereka dapatkan. Masing-masing anggota memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan disamping hak untuk memanfaatkan hasil hutan. Secara teknis aturan inipun

mengatur bagaimana seharusnya pola tanam di lahan kehutanan yang disesuaikan dengan status kawasan hutan. Bagi kawasan hutan dengan status hutan produksi maka pola tanamnya akan berbeda dengan kawasan hutan yang berstatus hutan lindung. Meski keduanya memberi peluang pemanfaatan hasil hutan.

Selain itu, mekanisme aturan internal kelompok tani hutan juga menjadi salah satu ruang bagi proses resolusi konflik dalam pengelolaan hutan di tingkat kelompok tani. Sementara itu desa dan kabupaten juga dapat pula dijadikan ruang untuk menyelesaikan segala bentuk konflik pengelolaan hutan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kelompok tani hutan. Dengan demikian maka setelah dibangun kesepahaman akan aturan internal yang mereka bangun maka proses pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dengan mudah dilakukan.

Tabel Data Kelola Lahan Tiap Kelompok Tani

No.	Kelompok Tani (KTH)	Alamat	Jumlah Anggota		Wilayah pengelolaan dan fungsi hutan
			L	P	
1.	KTH Sida Akur	Dusun Ekhar, Desa Hargowilis	57	18	Petak 20 (20,0 Ha)
2.	KTH Menggerejo	Dusun Soka, Desa Hargowilis	41	4	Petak 28 (28,2 Ha)
3.	KTH Mandiri	Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis	106	106	Petak 28 & 29 (29,0 Ha)
4.	KTH Makmur	Dusun Pandu, Desa Hargorejo	106	8	Petak 19 (39,6 Ha)
5.	KTH Tapan	Dusun Simari, Desa Hargorejo	154	9	Petak 17 (43,4 Ha)

Sumber : SIKLUS Edisi Khusus (2003: dimodifikasi)

Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata banyak yang memiliki hutan negara. Masyarakat yang mengelola hutan, maka dengan diberikannya SK Bupati perihal ijin pengelolaan hutan selama 35 tahun maka telah terjamin hak akses untuk memasuki kawasan hutan. Demikian pula terkandung di dalamnya hak untuk mengelola kawasan hutan secara lebih mandiri, dengan tetap menjaga fungsi hutan. Masyarakat yang tergabung dalam ketiga kelompok tani hutan tersebut melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan mengacu pada aturan internal kelompok tani hutan yang lestari dapat terbangun.

Persyaratan sebagai petani pengelola hutan kemasyarakatan juga khusus, artinya tidak semua masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki hak untuk mengelola hutan negara. Masyarakat yang mengelola hutan kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai petani pengelola hutan kemasyarakatan. Masyarakat yang mengelola hutan kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai petani pengelola hutan kemasyarakatan. Masyarakat yang mengelola hutan kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai petani pengelola hutan kemasyarakatan.

memberikan hak kelola hutan negara yang dimilikinya kepada anak atau cucu mereka jika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sehingga dengan begitu maka jaminan keberlangsungan pengelolaan hutan negara yang lestari dapat terjaga. Titik kritis dari aturan ini adalah proses *transfer of knowledge* antara petani pengelola dengan calon peneriman hak kelola waris. Mekanisme ini seharusnya diwadahi oleh kelompok tani melalui forum-forum rutin sehingga masing-masing anggota senantiasa sadar dan selalu mengingat apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Mekanisme kerja pengelolaan hutan di tingkat desa juga diberlakukan dengan membuat forum desa hutan kemasyarakatan. Hal ini sebagai salah satu bentuk keterlibatan desa dalam pengelolaan hutan negara. Forum desa hutan kemasyarakatan (FKHKM) ini dibentuk guna menjembatani persoalan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada wilayah perbatasan di masing-masing garapan. Demikian juga perannya dalam mewedahi dan memediasi konflik antar kelompok yang bisa jadi akan muncul ataupun sebagai salah satu media untuk sharing informasi dan pengetahuan antar kelompok sehingga tujuan untuk mensejahterakan petani dan melestarikan hutan dapat terwujud.

Sharing pengetahuan dan informasi juga dilakukan pada level yang lebih tinggi yaitu kabupaten. Kulon progo membentuk jaringan petani hutan kulon progo (NGULAT ROGO) yang terdiri atas 7 Kelompok Tani hutan. Jaringan petani ini berfungsi sebagai salah satu media informasi dengan kelompok tani lain pada lain kabupaten. Harapannya, petani pengelola hutan kemasyarakatan juga dapat mengembangkan kapasitas kelembagaannya pada skala yang lebih besar.

B. Pengembangan Institusi yang Terkait dengan Tata Produksi

Ketika kepastian tenurial dapat diperoleh masyarakat, maka tantangan selanjutnya adalah mengembangkan institusi yang terkait dengan penataan produksi. Terdapat dua level strategi pengembangan yang perlu dipikirkan yaitu: strategi pengembangan tata produksi pada tingkat kelompok atau komunitas, dan strategi pengembangan tata produksi pada tingkat skala rumah tangga petani.

Kelompok tani pengelola hutan kemasyarakatan di Desa Hargowilis ini memiliki dua karakteristik yang mengelompokkan mereka ke dalam skema tata produksi yang berbeda. Pertama adalah kelompok tani yang mengelola kawasan hutan produksi dan kedua adalah kelompok tani yang mengelola kawasan hutan lindung. Kelompok tani yang mengelola hutan produksi memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka dari hasil hutan berupa kayu. Sementara itu kelompok tani yang mengelola hutan lindung hanya boleh mengembangkan usaha mereka dari hasil hutan non kayu (NTFP). Meskipun demikian, usaha kelompok tani dari hasil hutan berupa kayu juga akan membutuhkan jalan yang panjang mengingat masih dibutuhkannya persyaratan berupa Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHKM) yang mengharuskan mereka membentuk koperasi. Hal inipun masih membutuhkan waktu yang lama karena kondisi tanaman kayu yang ada juga masih belum layak untuk dipetik hasilnya. Sehingga dengan demikian meskipun terdapat dua jenis kelompok tani pengelola hutan kemasyarakatan, namun dalam jangka pendek mereka baru dapat mengembangkan usaha mereka dari hasil hutan non kayu.

Saat ini petani pengelola hutan lindung telah mengembangkan ekowisata sebagai

bentuk upaya mereka untuk memanfaatkan hasil hutan dari sektor jasa. Usaha ekowisata yang mereka lakukan menjadi strategis dilakukan karena kawasan ini merupakan *catchment area* waduk Sermo, sehingga keberadaan hutan yang mereka kelola menjadi salah satu penentu bagi keberlangsungan waduk tersebut. Oleh karena itu usaha ekowisata ini lebih menekankan pada sistem pendidikan lingkungan bagi masyarakat. Harapannya masyarakat dapat mengembangkan usaha seperti penginapan, makanan, moda transportasi maupun keahlian dalam memberikan bekal pendidikan lingkungan bagi masyarakat yang berkunjung di wilayah itu. Dengan begitu, perekonomian masyarakat dapat terbantu tanpa harus menggantungkan pada hasil hutan.

Strategi di tingkat rumah tangga atau individu petani tidak berbeda jauh dengan strategi pada level kelompok. Pada tingkat individu, strategi pengembangan usaha yang berbasis pada hasil hutan non kayu sudah dilakukan sejak sebelum mereka tergabung dalam pengelola hutan kemasyarakatan. Meskipun skala usaha yang mereka lakukan tergolong kecil, namun sangat membantu perekonomian rumah tangga mereka.

Meski usaha rumah tangga yang berbasis hasil hutan non kayu itu telah dilakukan sejak lama, akan tetapi pengusahaannya masih dilakukan secara individu dan belum membangun jaringan secara lebih luas antar individu. Dari segi kualitaspun, mereka masih mengandalkan kemampuan masing-masing individu, berbekal pengalaman mereka sehari-hari. Sehingga dengan demikian maka standar produksi pada level inipun belum terbangun secara memadai.

C. Pengembangan Institusi yang Terkait dengan Tata Konsumsi

Perubahan pola konsumsi tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tinggal di perkotaan saja, tapi juga dialami oleh masya-

rakat yang hidup di pedesaan. Perubahan pola konsumsi umumnya berpengaruh besar pada cara masyarakat menilai sumber-sumber alam ini. Dengan semakin pentingnya mata uang dalam kehidupan masyarakat pedesaan, sedikit banyak juga berpengaruh pada cara mereka menilai dan memaknai sumber alam yang mereka miliki atau kelola.

Seandainya dapat ditelisik lebih jauh, maka potensi hasil hutan non kayu di wilayah Kulon Progo tidaklah begitu beragam, bahkan ada kemiripan antara kawasan hutan lindung dengan kawasan hutan produksi. Perbedaan keduanya adalah pada pola pemenuhan kebutuhan hidup. Kawasan hutan produksi yang relatif memiliki kemudahan akses dari berbagai penjuru wilayah memiliki variasi dalam pemenuhan konsumsi harian mereka dibandingkan dengan kawasan hutan lindung. Sebagai contoh, pada Desa Hargorejo sudah sangat sedikit ditemui anggota masyarakat yang memenuhi kebutuhan karbohidratnya dari jagung atau singkong, sementara di Desa Hargowilis, kedua jenis sumber karbohidrat tersebut masih sering dijumpai dalam anggota masyarakat.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Institusi Hutan Kemasyarakatan

1. Kondisi fisik dan karakteristik dari sumberdaya alam setempat
Pengembangan model pengelolaan hutan dan organisasi sosial yang dibangun dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lain tergantung dari kondisi fisik dan karakteristik sumberdaya alam yang terdapat di tempat tersebut. Misalnya peluang dan tantangannya akan berbeda bila wilayah kelola terletak di lahan subur dibandingkan dengan kalau kondisi fisik lahannya kurang subur atau

marginal. Berbeda lagi di daerah dengan tingkat kemiringan tajam dengan resiko longsor dan erosi tinggi atau merupakan lahan landai yang subur, atau kawasan pesisir dibandingkan dengan pegunungan, di tempat dengan curah hujan tinggi atau rendah, dengan ketersediaan air baik dari tadah hujan atau iirgasi dengan daerah yang sulit pasokan air. Dapat pula terjadi perbedaan dalam peluang pengembangan institusi yang terkait dengan tipe ekosistemnya. Misalnya lingkungan yang merupakan kawasan ekosistem yang indah, menjadi salah satu tujuan wisata menarik dan tersedianya akses transportasi tentu akan berbeda dengan daerah yang lain. Namun tempat-tempat yang mempunyai kekayaan alam yang tinggi, biasanya tempat-tempat dimana banyak kelompok saling bersaing untuk mendapatkan akses untuk memanfaatkan sumber daya alam. Akibatnya konflik sulit dihindari. Pengembangan dan penguatan institusi lokal dalam kondisi seperti ini tentu tantangannya akan berbeda dengan daerah dimana konflik antar kelompok relatif rendah (Afiff, 2007: xvii).

2. Faktor-faktor ekonomi politik pada tingkat internasional, nasional, maupun daerah

Perubahan di tingkat global dapat berpengaruh pada pengembangan institusi di tingkat lokal. Tania Li dalam Afiff (2007) menyebutkan contoh misalnya dengan menguatnya wacana indigenous people di tingkat Internasional, telah memberikan peluang beberapa kelompok masyarakat untuk mengorganisir diri, melakukan klain lahan hutan dalam kerangka gerakan masyarakat adat. Adapun konteks ekonomi politik di tingkat nasioanl

maupun daerah yang dianggap penting dan berpengaruh pada dinamika pengembangan institusi di tingkat lokal misalnya adalah belum adanya kerangka kebijakan yang dianggap cukup kuat mendukung model-mode perhutanan sosial selain model PHBM yang dikembangkan Perhutani. Contoh lainnya adalah belum adanya peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan lainnya yang menjelaskan tentang mekanisme proses penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat setempat dengan instansi pemerintah yang terkait misalnya Departemen Kehutanan atau Kasus Jawa dengan Perhutani.

Berbagai upaya dilakukan dengan memperluas dukungan pemerintah setempat antara lain lewat pembuatan aturan-aturan daerah yang memperluas kedudukan atau legitimasi pengelolaan sumberdaya alam yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Namun karena masih sedikit sekali kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan hutan, makan di banyak kasus pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan Departemen Kehutanan terutama yang terkait dengan masalah tumpang tindih klain di Kawasana yang diklaim pemerintah sebagai "kawasan hutan negara". Adanya aturan atau kebijakan yang dikembangkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberdayakan pengembangan institusi lokal tentunya akan membantu pengembangan institusi ini. Namun, sebaliknya juga dapat terjadi bila ternyata sedikit atau tidak tersedianya kebijakan operasional yang

memperkuat pengelolaan hutan oleh rakyat.

Selain kebijakan pemerintah, faktor-faktor global-nasional dan daerah lainnya, yang berpengaruh juga antara lain fluktuasi harga komoditi pertanian yang ditanam oleh petani setempat, naik atau turunnya permintaan pasar terhadap komoditi-komoditi tertentu, aturan tentang tata niaga, pergantian kepemimpinan daerah maupun nasional. Dengan demikian memetakan faktor-faktor makro ekonomi dan politik baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional perlu dilakukan agar dapat melihat seberapa besar pengaruhnya pada upaya untuk memberdayakan institusi lokal yang terkait dengan pengelolaan hutan di suatu tempat (Afiff, 2007: xix).

3. Faktor dinamika sosial dan politik lokal
Adanya dinamika sosial dan politik di tingkat lokal adalah salah satu alasan mengapa hasil pengembangan institusi lokal di suatu tempat mungkin berbeda dengan di tempat lain. Terdapatnya tokoh masyarakat setempat yang kharismatik dan jelas akuntabilitasnya pada rakyat setempat misalnya, sering merupakan salah satu faktor penting yang merupakan kunci keberhasilan dalam membangun kelembagaan rakyat setempat. Penting juga dilihat bagaimana karakteristik masyarakat yang menjadi basis pengorganisasian berpengaruh pada upaya untuk memperkuat dan mengembangkan institusi lokal ini. Misalnya untuk mengembangkan institusi dimana kelompoknya mayoritas adalah penduduk migran yang baru bermukim di kawasan itu dapat berbeda bila masyarakat yang diorganisir adalah mereka yang dikategorikan sebagai kelompok adat.

Perbedaan karakteristik masyarakat berpengaruh pada model dari gerakan dan institusi sosial yang dapat dikembangkan. Sebaliknya juga, pengembangan institusi lokal akan sulit dilakukan dan akan memakan waktu yang cukup lama bila masyarakatnya karena satu dan lain hal sulit bersatu atau terfragmentasi menjadi berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, sejarah klaim masyarakat atas lahan dan sumberdaya hutan lainnya juga berpengaruh pada perjuangan mereka untuk mendapatkan rekognisi dan tawaran tentang model perhutanan sosial seperti apa yang akan diadvokasi. Aliansi dan konflik antara masyarakat dan aktor-aktor lainnya seperti pemerintah, pebisnis maupun dengan lembaga non pemerintah juga penting untuk dilihat karena pengaruhnya yang cukup signifikan pada upaya pengembangan institusi lokal ini.

Perlu diingat bahwa semua faktor-faktor ini saling kait mengkait dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, dapatlah dilihat bahwa pengembangan institusi lokal pada dasarnya adalah suatu upaya yang cukup kompleks dan senantiasa menyesuaikan dengan proses evolusi sistem sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afiff, Suraya. R. Yando Zakaria .2007. *Hutan dan Manusia*. KARSA bekerjasama dengan SGP PTF UNDP-EC-SEAMEO SEARCA
- Li, Tania M. 2001. *Masyarakat Adat, Difference, and The Limits of Regonition In Indonesia's Forest Zone*. *Modern Asia Studies* 35 (3): 645-676
- Ostrom E. 1985. *Formulating the Elements of Institutional Analysis*. Paper presented to a Conference on Institutional Analysis and Development Washington DC May 21- 22. 1985
- Ostrom, Elinor, 1990. *Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press
- Schlager, Edella and Elinor OStrom. 1992. *Propersty Right Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis*. *Land economics* 68 (3): 249-262

Sumber Lain

<http://www.worldagroforestrycentre.org/sea> diakses tanggal 23 Juli 2011

WACANA TUBUH PEREMPUAN DIDUNIA MEDIA : TINJAUAN PERSPEKTIF GENDER

Sri Yuliani

Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

In the world of entertainment and media industries, women's bodies are assets as well as objects of exploration and exploitation. Exploitation of the female body in art and media industry has the potential to collide with moral values that require a woman's body should be covered and should not publicly displayed. For the sake of upholding moral values, traditional dance movements and costumes were censored to match the standards of modesty. The same is true in literature, women writers who explore female sexuality openly accused of being disrespectful of women, the same is seldom addressed to a male writer. In the media industry, women's bodies is part of the capital which was exploited to make profits only. It turned out that wherever woman works will always be associated with her body and gender identity.

Keywords: *Women's bodies discourse, Media, Art, Gender Perspective*

Tidak ada tubuh makhluk hidup yang bias memicu perdebatan dan polemik yang tak habis-habisnya sebagaimana tubuh perempuan. Tubuh perempuan menjadi sarat muatan politis karena menjadi simbol moralitas masyarakat. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang bisa menertibkan (tubuh) perempuan sebagai sumber godaans eksual. Untuk itu segala bentuk manifestasi dari keindahan tubuh perempuan harus dikontrol agar tidak memancing gairah seksual yang bertentangan dengan aturan masyarakat.

Seni sebagai bentuk manifestasi rasa, karsa dan karya manusia akan segala bentuk keindahan mau tidak mau akan bersinggungan dengan tubuh perempuan sebagai sumber garapan atau inspirasi. Perempuan di dunia seni adalah perempuan yang segala sisi keindahan nyat erpampang di mata publik, menjadi obyek sasaran sorot mata lelaki yang ditakutkan akan mengundang

hal-hal yang tabu, hal-hal yang berbau hasrat seksual maupun imajinasi kotor.

Artikel ini lebih jauh hendak mengulas perempuan di dunia seni, khususnya wacana atau *discourse* tentang makna tubuh perempuan dalam seni tradisi, seni sastra dan industry media dan relasi gender yang ada di baliknya.

A. Perempuan dalam Seni Tradisi

Dalam dunia seni tubuh manusia merupakan media dan sumber inspirasi utama. Seni tari yang mengeksplorasi keindahan gerakan tubuh manusia banyak memperoleh ide dari keindahan dan eksotika tubuh perempuan. Di Indonesia seni tari merupakan salah satu kekayaan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pelosok wilayah. Bila diamati keindahan tari Jaipong dari Jawa Barat, Tayub atau Srimpi dari Jawa Tengah, serta tari Bali, bersumber terutama dari keindahan dan keluwesan tubuh penari yang terlihat dari keindahan

gerak, lekuk-lekuk tubuh maupun kostum si penari yang dalam tari Jaipong menggunakan kebaya ketat, dalam tayub dan tari Bali memakai semacam kemben yang memperlihatkan keindahan sebagian dada dan punggung perempuan penarinya.

Bertahun-tahun tubuh perempuan dalam seni tari tradisi di Indonesia dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Suatu bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat yang tidak menjadi perdebatan mengenai pantas atau tidak bila dipandang dari nilai etika maupun moral. Di Budaya Jawa, pemakaian kebaya yang menggunakan bahan kain brokat yang transparan sehingga memperlihatkan kulit si pemakai menjadi baju yang lazim dipakai saat acara-acara adat semacam ritual di lingkungan keraton atau saat-saat punya hajatan seperti perkawinan. Bahkan pada masa Orde Baru kebaya model Jawa yang biasa dipakai Ibu Tien Soeharto (almarhumah) menjadi baju nasional yang digunakan oleh para istri pejabat.

Dalam pertunjukan seni, menurut Caturwati (2004) dosen STSI Bandung, riasan dan busana merupakan modal penting bagi seniman untuk mengubah penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Bagi perempuan seni, kemolekan tubuhnya menjadi aset yang dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk menarik penonton. Penari atau sinden Jaipong (juga campur sari) misalnya, biasa tampil dengan polesan wajah, bentuk sanggul, model dan warna kain dan kebaya, serta corak kain yang sengaja dipilih untuk memikat penonton. Manipulasi tersebut ditujukan khususnya kepada laki-laki yang tergila-gila oleh kecantikan, goyang pinggul serta eksploitasi gerakan tubuh si penari atau sinden. Oleh karena itu, bagian-bagian tubuh tertentu dibentuk dengan khusus agar memberi kesan seksi dan merangsang.

Dandanan gaya sinden Jaipongan, baik rias maupun busananya lebih menonjolkan kesan sensualitas daripada keanggunan

perempuan berkebaya. Para sinden pada umumnya mengenakan kebaya serta kain dalam satu warna yang dibuat dari bahan brokat atau sutra dengan bentuk kebaya ketat, serta bagian dada terbuka lebar hingga kedua hiasan dadanya tampak sebagian menyembul. Kain bagian bawah dibuat seketat mungkin yang menonjolkan bentuk pinggul dan pantat. Bagian depan kain dibuat belahan tinggi dengan wiru (lipatan-lipatan kain) agak banyak, sehingga apabila sedang melakukan gerakan tertentu, seperti melompat, mengangkang, atau mengangkat kaki, kain akan terbuka lebar dan menampakkan sebagian betisnya (Caturwati, 2004).

Para perempuan penari dan penyanyi (sinden ataupun dangdut) seakan-akan tahu betul apa yang disukai laki-laki dan tahu bahwa tubuhnya adalah senjata ampuh untuk menaklukkan kaum laki-laki. Penari dan penyanyi perempuan, terutama seni tradisi, tahu betul bagaimana menyampaikan sinyal-sinyal yang dapat menggairahkan dan merangsang, melalui gerak tarian atau syair lagu. Eksistensi seks dalam seni tradisi sudah lama ditemui dalam seni Ronggeng, Bajidoran maupun Tayub. Selama bertahun-tahun, fenomena semacam itu diterima masyarakat sebagai suatu realitas budaya yang tidak banyak diperdebatkan.

Persoalan tubuh perempuan pelaku seni menjadi perdebatan terbuka yang memanas di ruang publik saat demam Goyang Ngebor ala penyanyi Dangdut Inul Daratista, populer di masyarakat pada awal tahun 2003. Para pengkritik Inul menuduhnya telah mengeksploitasi seks dan mengumbar hawa nafsu setan melalui erotisme goyangan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya bangsa dan karenanya merusak moral dan martabat bangsa (Rudy Gunawan, 2003).

Dilihat dari sisi gender, kasus Inul memperlihatkan telah terjadi pertarungan

kontrol antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mewakili patriarki. Pertarungan ideologi itu sangat nyata ketika Inul diminta agar menjaga moral bangsa dengan tidak melakukan goyangan khususnya (Kompas, 5 Mei 2003). Dalam wacana kebudayaan, Inul dianggap sebagai representasi budaya pop atau budaya Massa. Budaya pop dianggap bukan budaya *adiluhung* atau budaya tingkat tinggi. Menurut Modleski (dalam Kompas, 5 Mei 2003) perempuan dipandang sebagai penanggung jawab budaya Massa dan efek-efek budaya massa yang merugikan, sementara laki-laki dipandang sebagai penanggung jawab untuk kesenian *adiluhung*. Penggunaan istilah budaya Massa serta meletakkannya dalam posisi lebih rendah dibandingkan seni tinggi, tidak lepas dari konstruksi sosial yang bersifat eksis. Sift-sifat yang ditonjolkan lewat budaya Massa, yaitu sifat feminin dan maskulin.

Gejala dominasi pemaknaan tubuh perempuan oleh perspektif moralitas patriarkis sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum kasus Inul mencuat. Bertahun-tahun sebelum kasus Inul muncul, beberapa seni tradisi telah mengalami sensor moral. Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah tari Dongbret dari Indramayu. Menurut penuturan Wangi Indria (dalam Kompas, 4 Maret 2006), seniman sekaligus pemerhati seni Indramayu, saat ini Dongbret sudah tidak ditarikan lagi di Indramayu. Tradisi tari itu terakhir kali dapat dilihat sekitar tahun 1970-an. Sekarang sudah disingkirkan ke daerah Balanakan Kabupaten Subang.

Menurut Wangi, tari yang dikenal masyarakat masa kini sebagai goyang Dongbret itu tidak lagi menjadi tradisi seni budaya setempat karena penolakan beberapa pihak yang menganggap tari dongbret porno. Sekitar tahun 1970 tari Dongbret dilarang di Indramayu. Padahal, pada masa jaya dulu, kesenian Dongbret merupakan

kesenian rakyat yang paling murah dan selalu diselenggarakan tujuh hari tujuh malam menjelang dan ketika upacara syukuran desa.

Wangi menyatakan bahwa tersingkirnya tarian Dongbret dari Indramayu merupakan salah satu pelajaran betapa banyak tanggapan dan persepsi orang mengenai suatu bentuk kesenian. Banyak orang beranggapan kalau semua yang dilakukan di tari Dongbret adalah perbuatan erotis dan porno.

Pemutlakan nilai seni sering dilakukan oleh otoritas yang *established*, seperti organisasi agama dan negara. Jargon-jargon keagamaan seperti *bid'ah*, *khurafat*, *syirik*, dan haram telah menvonis bentuk-bentuk ekspresi seni tradisi sebagai hal-hal yang bertentangan dengan agama. Sikap keagamaan legal-formal yang bersifat hitam putih menghilangkan kesadaran akan adanya entitas dan kedirian yang lain. Segala yang berbeda dipandang salah dan menyesatkan (Surur dan Anoe-grajekti, 2004).

Menurut Amrih Widodo, pengamat seni Tayub di Blora, para perempuan terutama istri-istri pejabat birokrasi mempunyai peran sangat signifikan dalam mengkonstruksi dan mendiskreditkan perempuan penari seni tradisi. Misalnya, istri seorang camat di Kabupaten Pati berusaha mengusulkan agar model pakaian, tata cara menari, dan ngibing dituangkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan para aktivis perempuan di Pati mengusulkan program Islamisasi Tayub dengan cara memakai kerudung ketika menari di atas panggung (Srinthil, 2004). Bupati Pati, Sunardji pada sekitar tahun 1992 pernah memerintahkan agar pekerja seni Tayub yang umumnya terdiri dari kaum perempuan memakai penutup kemben. Meski bukan surat keputusan, perintah itu akhirnya dituruti dan setiap kali pentas pekerja seni Tayub memakai penutup kemben warna-warni. (Kompas, 4 Maret 2006).

Kasus di atas menunjukkan betapa ekspresi berkesenian seringkali harus berhadapan dengan otoritas moral yang diperkuat dengan legalisasi negara. Akhirnya, agar diterima oleh etika dan moral, berbagai seni tradisi seperti Gandrung (Banyuwangi), Jaipong (Krawang dan Subang), dan Tayub (Pati dan Tuban) melakukan “penyesuaian” dengan melakukan “pembersihan” terhadap gerakan-gerakan yang dipandang bertentangan, mengubah gaya tampilan dan asesoris pakaian agar terlihat lebih sopan. Namun ada juga yang memilih diam atau bahkan menolaknya seperti seniman Tayub di Blora.

Untuk Kabupaten Blora hingga memasuki wilayah Jawa Timur, pekerja seni tayub tetap mengenakan kemben saat pentas. Bagi kalangan pendukung seni tradisi, pembatasan-pembatasan pada seni tradisi yang kental unsur seksualitasnya seperti Tayub, Jaipong, Dongbret dan sebagainya merupakan bentuk pemasangan atau sensor budaya. Unsur seksualitas dalam seni bukan menjadi ukuran untuk memusnahkan suatu bentuk kreasi seni. Bagi seniman kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang sangat mendasar.

Namun tentu tidak demikian halnya bagi para pemuka agama. Jelas tidak ada rohaniwan atau ulama yang setuju dengan atraksi goyang pinggul dan lenggang lenggok penari Jaipong, Gandrung, maupun Tayub yang dapat dinikmati sepuas-puasnya bahkan sebagian dapat disentuh. Bagi ulama, liukan setiap lekukan tubuh penari dianggap saru, seronok, porno, bahkan haram. Oleh karena itu, bantuan otoritas pemaksa, yakni negara, kaum ulama melakukan kontrol terhadap muatan moral seni pertunjukan. Tapi, menurut Surur dan Anoegrajekti (2004) konstruksi yang melahirkan hubungan yang tidak adil terhadap keberadaan seni tradisi seharusnya tidak perlu terjadi. Pluralisme budaya dalam bentuk apa pun harus dapat diterima

dengan sikap netral, bahwa setiap individu memiliki hak budaya yang tidak dapat diganggu gugat.

B. Perempuan dalam Seni Sastra

Tindakan diskriminatif terhadap pelaku seni perempuan juga terjadi di dunia sastra. Novelis perempuan yang mengangkat isu seksualitas perempuan seperti Ayu Utami dan Djena Maesa Ayu oleh sastrawan senior Taufik Ismail disebut sebagai kelompok Fiksi Alat Kelamin (FAK) atau Gerakan Syahwat Merdeka (GSM). Berikut kutipan dari artikel Taufik Ismail “Gerakan Syahwat Merdeka” di Harian Seputar Indonesia 28 Mei 2006.

Di Indonesia, penulis yang asyik dengan wilayah selangkang dan sekitarnya mayoritas penulis perempuan. Ada kritikus sastra Malaysia berkata, “Wah, Pak Taufiq, pengarang wanita Indonesia berani-berani. Kok mereka tidak malu, ya?” Memang begitulah, rasa malu itu yang sudah terkikis, bukan saja pada penulis perempuan aliran “SMS” (Sastra Mazhab Selangkang) itu, bahkan lebih-lebih lagi pada banyak bagian dari bangsa.

Pandangan Taufiq Ismail dengan jelas mengcap perempuan yang berani mengungkapkan secara lugas pengalaman seksual atau berani menggugat relasi seksual patriarkis sebagai perempuan tidak tahu malu, perempuan tidak baik atau tidak bermoral. Konstruksi sosial tentang perempuan baik-baik adalah perempuan yang sopan dan tabu membicarakan aktivitas seksual secara terbuka.

Menanggapi kecaman terhadap penulis perempuan yang dicap oleh Taufiq Ismail sebagai aliran “SMS”, Aquarini Prabasmoro (2006) mengajukan pembelaan sebagai berikut:

...saya pernah dan sering kali terusik oleh komentar para "penyair" atau "pengamat" sastra yang menyatakan bahwa penulis perempuan hanya mengandalkan "pornografi", seksualitas dan tubuhnya, dan bahwa karya banyak penulis perempuan akhir-akhir ini bukan karya sastra "berbobot". Yang mengganggu saya adalah mengapa ketika seksualitas perempuan dibicarakan sebagai obyek dalam tulisan laki-laki, tulisan itu, penulis itu, masih dianggap sastra? Bukankah Ahmad Tohari juga telah menulis bagaimana Srinthil memutuskan untuk lebih baik menyerahkan keperawanannya pada Rasus, laki-laki pilihannya, daripada menggandaikannya kepada laki-laki yang telah memberikan pembayaran atas tubuhnya? Bukankah Srinthil sadar betul akan kekuatan seksualitas perempuannya? Novel Ronggeng Dukuh Paruk, menurut saya, mengantarkan kepada masyarakat gambaran kesalahan pada cara kita memandang seksualitas perempuan... Apakah laki-laki kemudian lebih berhak membicarakan seksualitas perempuan baik secara feminis maupun misoginis?

Mungkin begini, karena laki-laki adalah norma maka pembicaraannya atas seksualitas adalah pembicaraan tentang seksualitas "manusia" yang melingkupi laki-laki dan perempuan. Karena itu menjadi berterima. Jika Pramodya menggambarkan tubuh seorang perempuan dan hubungan seksual antara seorang Bendoro dan istri simpanannya adalah sastra dan berterima, sementara Ayu Utami yang menggambarkan seksualitas

dan tubuh perempuan dengan kenyamanan seorang perempuan yang mengenal tubuh dan seksualitasnya adalah porno. Begitulah tubuh dan seksualitas perempuan di ranah publik. Ketika Inul Bergoyang Indonesia, Rhoma Irama mengatakannya itu tidak bermoral, tidak Islami. Sementara ia sendiri mendendangkan "dangdut suara gendang rasa ingin bergoyang..." dan ia pun bergoyang-goyang. Siapa yang dapat menjamin hasrat yang muncul ketika melihat Inul tidak muncul ketika melihat Rhoma bergoyang-goyang dengan bajunya yang berleher rendah dan menyembulkan bulu-bulu dadanya? Jawabannya, hanya laki-laki yang berhasrat, perempuan tidak dan seluruh kita adalah heteroseksual. Yang ketakutan mungkin bukan siapa-siapa, melainkan mereka yang tahu mereka tidak mampu mengendalikan hasratnya.

Karena itu, bukankah mengungkapkan pengalaman pribadi sebagai perempuan, yang kemudian difiksikan, adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan?

Seks adalah salah satu isu yang tabu dibicarakan atau ditulis oleh perempuan. Laki-laki bicara atau membanyol soal seks lebih diterima sedang hanya perempuan tidak baik yang berani blak-blakan ngomong soal seks. Novel Saman karya Ayu Utami, menurut Mariana Amiruddin (Kompas, 23 Juli 2005), merupakan contoh seks yang memperlihatkan tabu menyempitkan ruang gerak para perempuan tokohnya. Kemudian para tokoh itu mencoba melepaskan kungkungan tabu dengan gaya bicara dan karakter masing-masing.

Hatib Abdul Kadir (2007) berpendapat munculnya penulisan seksualitas oleh perempuan menunjukkan bahwa mereka mampu berbicara dan menceritakan berbagai pengalaman dan perasaannya tanpa harus berusaha takut demi memenuhi perspektif yang diinginkan kaum laki-laki. Kontroversi terhadap munculnya muatan seksual dalam novel menunjukkan semacam keengganan atau ketidaksiapan masyarakat, aparatus moralitas, maupun para penguasa lainnya dalam menyikapi ekspresi individu yang dianggapnya bertentangan dengan nilai moralitas dan serta kesepakatan kolektif. Banyak penulis perempuan yang mengeksplorasi tubuh manusia dalam bentuk aktivitas seksual yang melewati batas-batas nilai seksualitas yang ditabukan atau dianggap sakral. Tak jarang berbagai masalah seks yang selama ini dianggap sebagai *the otherness* diangkat, ditulis dengan gamblang dan diwacanakan.

Senada dengan pendapat Hatib Abdul Kadir, Nurani Soyomukti (dalam Seputar Indonesia, 22 Juli 2007) menyatakan novelis seperti Ayu Utami mengangkat isu seksualitas lebih didominasi untuk menampilkan cara memandang seksualitas dengan cara modern, bukan kolot. Seks dalam "Saman" dan "Larung" lebih digunakan untuk menyerang dasar-dasar ideologis tatanan lama yang membawa misi penindasan di bidang ekonomi politik. Berikut kutipan langsung dari artikel Soyomukti:

Persepsi baru tentang seksualitas dan keadilan gender adalah tujuan utama Ayu Utami. Dan bukannya sekedar mengilustrasikan seks sebagai bagian dari cerita. Menurut saya, Ayu Utami ingin menempatkan seks sebagai alat perlawanan, karena penindasan yang ada juga menggunakan seks sebagai alat hegemoni tubuh dan relasi sosial. Meminjam Michel Foucault, seks dan kekuasaan adalah wacana untuk melanggengkan sejarah penindasan.

Sedangkan menurut Haryatmoko sastra telah menjadi media pemecah kesunyian penindasan dunia perempuan atas nama tradisi dan tatanan sosial patriarki. Menurut Haryatmoko, tindakan-tindakan kreatif tidak akan berkembang bila visi kehidupan dibatasi hanya pada pertimbangan-pertimbangan moral. Moral cenderung memaksakan pembatasan atau larangan pada manuver imajinasi (Hartiningsih, 2005).

Mariana Amiruddin (dalam Hartiningsih, 2005) menyatakan teks sastra merupakan salah satu media yang memiliki potensi membongkar ketabuan meskipun tidak harus dengan motif membongkar. Mengutip sastrawan dan feminis Perancis Helen Cixous, Mariana mengatakan perempuan harus menulis sendiri dan menaruh dirinya ke dalam teks, juga ke dalam dunia dan ke dalam sejarah.

Dengan menulis perempuan dapat kembali pada tubuhnya yang telah lama menjadi tabu. Tanpa tubuh yang ia miliki, perempuan menjadi bisu, tuli, dan buta, dan tak mungkin menjadi petarung yang baik dalam hidupnya. Ia akan terus direduksi menjadi pelayan dan terus hidup di bawah bayang-bayang laki-laki. Oleh karena itu, menulislah. Menulislah tentang dirimu. Tubuhmu harus didengar-kan.

C. Perempuan dalam Industri Media

Tubuh perempuan mempunyai nilai ekonomis tinggi dalam dunia industri, utamanya industri media. Sebagian besar media cetak dan iklan menggunakan model perempuan untuk menarik minat konsumen. Dalam dunia iklan, tubuh dan bagian-bagian tubuh perempuan menjadi satu kesatuan paket dengan produk yang dijual. Disini terjadi komodifikasi tubuh dan bagian-bagian tubuh ataupun seksualitas perempuan. Tampilan tubuh perempuan dalam dunia iklan diarahkan untuk kepentingan laki-laki, sehingga citra perempuan

dikonstruksikan dari perspektif nilai dan hasrat laki-laki.

Dalam iklan di media cetak maupun televisi, Aquarini Prabasmoro (2006) melihat adanya konstruksi feminitas dan seksualitas perempuan yang diarahkan sebagai cara penundukan perempuan dalam kuasa laki-laki. Kontruksi feminitas dan seksualitas perempuan tidak hanya berkaitan dengan budaya patriarki, melainkan juga berhubungan dengan ras, globalitas, dan kelas. Dalam konteks feminitas dan seksualitas perempuan dalam iklan, tubuh perempuan dikonstruksi untuk menyesuaikan dengan selera "pasar". Pasar adalah kuasa yang menentukan apakah bentuk seksualitas dan feminitas (termasuk kecantikan, bentuk tubuh, jenis rambut dan sebagainya) berterima atau tidak. Dalam tatanan personal, kuasa dipegang oleh laki-laki calon pacar, calon suami, pacar atau suami, dan sebagainya, tetapi dalam tatanan global, feminitas dan seksualitas perempuan mengacu kepada standar nilai budaya global yang oleh Naomi Wolf (2004) disebut sebagai "mitos kecantikan" yakni sosok perempuan yang kurus (langsing), tinggi, berkulit putih, dan berambut pirang, dengan wajah yang mulus tanpa noda, simetri, dan tanpa cacat sedikit pun.

Iklan di media cetak dan televisi terus-menerus mengkonstruksi citra perempuan yang ideal semacam itu. Berbagai produk kosmetik, fashion, aksesoris dan obat-obatan dilempar ke pasar dengan menggunakan model perempuan dengan berbagai pose yang sebagian besar mempertontonkan kemulusan dan kemolekan tubuh perempuan, bahkan juga untuk produk-produk yang tidak berhubungan dengan kecantikan seperti mobil, HP, rokok, dan sebagainya. Akibatnya, banyak perempuan yang terobsesi untuk mempunyai sosok ideal bak peragawati atau model iklan. Perempuan siap untuk menderita untuk bisa menjadi sosok yang cantik. Para

perempuan rela melakukan apapun seperti membeli produk kosmetik, operasi plastik, suntik silikon, diet yang ketat, dan sebagainya demi mewujudkan mitos kecantikan ideal versi konstruksi media dan pasar.

Efeknya sungguh luar biasa, data National Institute of Health (NIH) (dalam Wolf, 2004) menyebutkan bahwa 1 sampai 2 persen perempuan Amerika adalah penderita *anorexia* –yang berarti jumlahnya antara 1,5 sampai 3 juta orang– dan diantara para penderita ini, kebanyakan telah mengalami gangguan ini sejak masa remajanya. NIH juga mencatat bahwa angka kematian karena *anorexia* mencapai 0,56 persen per dekade, yang berarti sekitar 12 kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian tahunan perempuan berusia 15 sampai 24 tahun dengan penyebab penyakit lain. *Anorexia* menjadi pembunuh terbesar para remaja perempuan Amerika.

Pencitraan yang disebar industri kecantikan melalui media massa tentang gambaran perempuan ideal yang langsing dengan wajah awet muda tanpa kerutan telah menghasilkan keuntungan bisnis milyaran dollar AS. Majalah Time edisi 16 April 2007 (Pambudy, 2007) melaporkan, nilai produksi perawatan kulit antimenua dunia, menurut Euromonitor, bernilai 13 milyar dollar AS dan tahun depan akan menjadi 17 milyar dollar AS (bandingkan dengan APBN 2007 Indonesia yang kira-kira 86 milyar dollar AS).

Selain dieksploitasi oleh industri kecantikan, tubuh perempuan juga menjadi komoditas ekonomis yang dieksploitasi untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki dalam bentuk media pornografi, baik yang berupa media cetak maupun film.

Di Amerika Serikat, industri pornografi mendapatkan status legal dan memiliki regulasi, sirkulasi media pornografi sangat tinggi dan bernilai jutaan dollar bahkan memberi laba hingga trilyunan rupiah sebagaimana terlihat dari keuntungan

majalah-majalah berikut ini: *Penthouse* US\$ 4.600.000, *Playboy* US\$ 3.600.000, *Hustler* US\$ 1.200.000, *US\$ Gallery* US\$ 500.000, *Qui* US\$ 395.000, *Chic* US\$ 90.000. Jumlah sirkulasi itu belum termasuk merchandise dan hak cipta setiap gambar untuk reproduksi, rata-rata sebesar US\$ 350.000 per gambar (Umi Lasminah, 2006). Di antara banyak majalah porno, *Playboy* terbitan Amerika Serikat menjadi ikon yang terkenal di banyak negara. Sirkulasi *Playboy* di AS sebanyak 3,150 juta kopi. Sebagai perbandingan, majalah berita *Time* dicetak 4,1 juta eksemplar di AS saja. Selain itu, *Playboy* diterbitkan di 17 negara dan dibaca oleh sekitar 15 juta orang di berbagai belahan dunia (Budiarto Shambazy, 2006) .

Pada tahun 2003, menurut Omar Farooq, keuntungan industri pornografi yang pasarnya mencapai seluruh dunia telah mencapai 57 milyar dollar AS. Keuntungan ini lebih besar daripada total keuntungan seluruh pemilik klub-klub sepakbola, baseball, dan basket profesional; juga melebihi keuntungan 3 jaringan TV ABC, CBS, dan NBC dijadikan satu. Sedang menurut majalah *Tempo* edisi 20-26 Maret 2006, di lingkup nasional, pelaku media pornografi kecil-kecilan seperti tabloid *Lipstik*, misalnya, hanya butuh Rp. 3 juta untuk biaya operasional redaksi untuk empat penerbitan dalam sebulan. Pendaapatannya dari iklan untuk tiga penerbitan bisa mencapai Rp 60 juta. Pornografi ternyata merupakan lahan bisnis yang menggiurkan, tidak heran kalau *Harian Republika* terbitan 17 Juli 2003, mengutip Kantor Berita Associated Press, menyebut Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia sebagai surga bagi pornografi. Pornografi di Indonesia bahkan dinilai lebih serius daripada Thailand, yang selama ini dikenal terbuka dan vulgar dalam pornografi (dalam *al-Wa'ie* edisi 1-31 Mei 2006 dan *Jawa Pos* 16 Mei 2007).

Di Indonesia, tabloid porno menjamur di era reformasi yang membuka keran bagi pers yang bebas. Tabloid itu cenderung menjual tubuh perempuan dalam pose-pose yang merangsang hasrat seksual. Informasi yang disajikan kebanyakan hanya seputar isu atau pengetahuan seksualitas yang dikemas dalam bahasa yang vulgar dan provokatif.

Eksplorasi tubuh perempuan untuk kepentingan industri menjadi sulit dihindari mengingat naluri atau hasrat seksual laki-laki yang mudah dibangkitkan oleh keindahan lekuk liku tubuh perempuan. Pencitraan perempuan yang bertubuh seksi sebagai cerminan sosok ideal yang diinginkan lelaki, sebagaimana dikonstruksi oleh industri media, berhasil membuat perempuan bermimpi mewujudkan citra tersebut demi menyenangkan laki-laki atau untuk status di kalangan perempuan sendiri. Pengetahuan pelaku atau aktor bisnis akan hasrat alamiah manusia tersebut menjadi senjata ampuh untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya melalui eksploitasi tubuh perempuan. Dalam bisnis, tubuh perempuan mempunyai nilai jual lebih tinggi dibanding tubuh laki-laki.

Bungin mengatakan pornografi dalam pemberitaan media massa sebagai disebabkan tingginya persaingan antar media massa itu sendiri, sehingga berita atau gambar erotika digunakan sebagai daya tarik untuk meningkatkan daya saing. Sedang Abrar menyebut seks sebagai bumbu yang membuat hidangan media menjadi tampil menarik. Penonjolan tubuh perempuan dalam gambar-gambar bernuansa pornografi dianggap punya nilai jual yang tinggi (dalam Nurul Ilmi Idrus, 2004).

Menurut Ashadi Siregar (dalam Yulianto dan Kristianawati, 2002) komersialisasi seks melalui media dipengaruhi dua relasi sosial yang bersifat mutualistis di satu sisi, sedangkan di sisi lain berwatak parasitis. Mutualistis dalam arti antara pemilik modal

jurnalisme seksis (pornografi media) dan masyarakat pembaca atau penikmat produk pornografi media saling membutuhkan. Masyarakat pembaca di Indonesia pada umumnya memiliki daya apresiasi wacana yang rendah. Mereka lebih menyukai wacana-wacana sosial yang eksotis. Parasitiknya adalah pornografi merupakan ekspresi hegemoni maskulinitas dalam masyarakat. Dimana posisi perempuan selalu dianggap lebih rendah dari laki-laki. Perempuan adalah obyek pemuas syahwat laki-laki. Cara pandang demikian menjadikan perempuan sebagai obyek eksploitasi jurnalisme primitif yang getol membentangkan lekuk-liku tubuh perempuan sebagai barang dagangan.

Berbicara tentang tubuh perempuan sebagai komoditas bisnis tidak semua orang mempunyai sudut pandang yang homogen. Dalam hal pornografi misalnya, paling tidak ada dua kubu yang bertentangan yakni yang memandang pornografi sebagai seks dan yang menganggap pornografi sebagai seni.

Para feminis melihat pornografi merupakan bentuk eksploitasi seksualitas perempuan. Dalam pornografi perempuan menjadi obyek seks dan kekerasan. Seksualitas perempuan dikuasai, dipersepsi dan diproduksi dari perspektif laki-laki. Produsen yang membuat materi porno berada dalam budaya patriarki. Seksualitas dikendalikan laki-laki, dengan selera laki-laki. Tanpa sadar, atau dengan sadar, perempuan menjadi obyek komersialisasi.

Dalam pornografi, tubuh perempuan diukur dari nilai jualnya. Kriteria nilai jual tubuh perempuan dalam industri pornografi ditentukan dari kacamata selera laki-laki yakni dilihat dari bagian-bagian tubuh yang dianggap sensual atau merangsang libido lelaki. Karena itu, bagian-bagian tubuh perempuan seperti payudara, paha, leher, dan pantat menjadi modal utama perempuan model majalah porno.

Modal penting lainnya adalah keberanian berpose dengan mengenakan baju-baju minim dan terbuka. Para model porno membiarkan tubuh mereka dieksploitasi melalui jepretan kamera karena mereka tidak menyadari dengan menjadi model tabloid porno mereka telah dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Dengan masuk ke industri pornografi, para model tabloid porno itu secara sadar dan tidak sadar, mau dan tidak mau, dilukai secara fisik, psikis, maupun seksual.

Perempuan dalam media pornografi adalah bagian dari proses komoditisasi dalam sistem kapitalis. Guy Debord (dalam Nuruzzaman, 2003) menyatakan perempuan dibentuk budaya patriarki menjadi obyek konsumsi atau obyek tontonan, atau sebagai subyek konsumsi (konsumer). Dalam masyarakat tontonan, setiap kehidupan menjadi komoditas, dan setiap komoditas menjadi tontonan. (Tubuh) perempuan dalam masyarakat tontonan mempunyai fungsi sebagai obyek tontonan dalam rangka menjual komoditas dan mempunyai peran sentral.

Menjadikan tubuh sebagai tontonan, menurut Yasraf Amir Piliang (dalam Nuruzzaman, 2003) bagi sebagian perempuan merupakan jalan pintas memasuki pintu gerbang budaya populer, mencari popularitas, mengejar gaya hidup, dan memenuhi kepuasan material, tanpa menyadari mereka sebenarnya telah dikonstruksi secara sosial untuk berada di dunia marjinal dunia obyek, dunia citra, dunia komoditas. Perempuan adalah komoditas yang dimanfaatkan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengeksploitasi tubuh dan memarjinalkan posisi keperempuannya hanya sebagai komoditas atau tontonan di masyarakat patriarki. Penggunaan tubuh perempuan dalam industri media menggambarkan apa yang

disebut oleh Piliang sebagai *political economy of the body* (dalam Nurul Ilmi Idrus, 2004) yakni perempuan sebagai komoditi untuk kepentingan ekonomi yang didasarkan pada konstruksi sosial dan ideologi tertentu. Artinya, penggunaan tubuh perempuan di media sebagai salah satu ajang pornografi merupakan sesuatu yang dipolitisasi untuk tujuan ekonomi dengan aturan-aturan yang telah diset berdasarkan kepentingan pasar.

Menyimak apa dan bagaimana kedudukan dan peran perempuan di dunia seni dan industri media dapat ditarik satu benang merah yakni tidak mudah bagi perempuan untuk menjadi dirinya sendiri. Perempuan dimana pun ia berkarya tidak akan pernah dinilai lepas dari tubuhnya. Terlebih di dunia seni hiburan dimana tubuh perempuan adalah asset dan sekaligus obyek eksplorasi dan eksploitasi.

Perempuan pelaku seni tradisi terancam eksistensinya karena cara berkesenian mereka dipandang terlalu mengumbar tubuh dan goyangan sehingga dianggap porno dan bertentangan dengan norma moral. Di dunia seni sastra pun, perempuan dibatasi untuk menggunakan otaknya, perempuan sastrawan tidak memiliki *privilege* untuk bebas menuangkan gagasannya. Ada tabu-tabu yang tidak boleh dilanggar :tidak boleh vulgar dalam mengeksplorasi seksualitas, harus feminin tak boleh maskulin. Di dunia media, perempuan tidak menjadi pelaku seni yang otonom tapi lebih banyak sebagai obyek yang segala keputusan menyangkut dirinya ditentukan oleh pelaku industri media yang kebanyakan lebih didominasi motif keuntungan ekonomis. Memang benar kalau dikatakan tubuh perempuan itu sangat politis.

Daftar Pustaka

- Caturwati, Endang. *Bahasa Tubuh Jaipongan: Seksualitas Di atas Panggung*. Jurnal Srinthil Kajian Perempuan Desantara. Jakarta. Edisi 6, Juni 2004
- Gunawan, FX. Rudy. 2003. *Mengebor Kemunafikan: Inul, Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Kawan Pustaka dan Galang Press
- Haryatmoko. 2002. *Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*. Basis No. 01-02
- Idrus, Nurul Ilmi. 2004. *Pornografi Dalam Pemberitaan*. Jurnal Perempuan No. 38, November. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Kadir, Hatib Abdul. 2007. *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press
- Lasminah, Umi. 2006. *Pembebasan atau Belenggu? Politik atau Moral?*. Jurnal Perempuan No. 47, Mei. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Prabasmoro, Aquarini Priyatna. 2006. *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra
- Surur, Miftahus dan Anoegrajekti, Novi. 2004. *Politik Tubuh: Seksualitas Perempuan Seni*. Jurnal Srinthil. Kajian Perempuan Desantara. Jakarta. Edisi 6, Juni
- Wolf, Naomi. 2004. *Mitos Kecantikan, Kala Kecantikan Menindas Perempuan*. Penerbit Yogyakarta: Niagara

Sumber Lain

- Al-wa'ie. No 69 Tahun VI 1-31 Mei 2006. *Menggugat Kepornoan*
- Aziz, Nasru Alam. 2006. *Bergoyang dalam Bayang—Bayang RUU*. Kompas 4 Maret
- Kompas 23 Juli 2005. *Citra Teks, Perempuan Menolak Tabu*
- Hartiningih, Maria. 2005. *Lintasan Makna Tolak Pemasangan Kreativitas*. Kompas 23 Juli
- Ismail, Taufiq. 2006. *Gerakan Syahwat Merdeka*. Seputar Indonesia 28 Mei
- Kompas, 5 Mei 2003
- Nuruzzaman. 2003. *Sebuah Perjuangan Perempuan "Pinggiran"*. Kompas 3 Maret
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2007. *Kecantikan: Tubuh Berisi, Keindahan Para Liyan*. Kompas 3 Juni
- Soyomukti, Nurani. 2007. *Menggagas Kembali Sastra Perlawanan*. Seputar Indonesia 22 Juli

Radio Komunitas dan *Disaster Risk Reduction*: Studi Kasus Radio Lintas Merapi di Klaten Jawa Tengah dan Radio Angkringan di Yogyakarta

Ambar Sari Dewi, S.Sos, M.Si
Sosiologi FISHUM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract:

According to UNESCO, Indonesia was ranked the seventh of a number of countries most hit by natural disasters. The high casualties and losses due to disasters, partly because the public does not have enough information about the disaster. Therefore Disaster Risk Reduction is an urgent act to do, with a focus on providing information and communication. This paper seek to answer the question, how does the role of community media in Disaster Risk Reduction in Yogyakarta and Central Java? This paper showed that community radio has an important role in disaster risk reduction, which were made before, during and after the disaster. Various efforts to reduce the risk of disaster were conducted, such as delivering continuous information on the activity of Merapi or other disaster information. Easily understood local language made the information reach specific target and aim the goal of disaster risk reduction itself.

Key Words: *community radio, Disaster Risk Reduction, public sphere, disaster.*

1. Pendahuluan

Berada di pertemuan 4 lempeng tektonik, Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Kompleksitas kondisi demografi, sosial dan ekonomi di Indonesia yang berkontribusi pada tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana, serta minimnya kapasitas masyarakat dalam menangani bencana menyebabkan risiko bencana di Indonesia menjadi tinggi. Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data bencana dari BAKORNAS PB menyebutkan bahwa antara tahun 2003-2005 telah terjadi 1.429 kejadian bencana, di mana bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 53,3 persen dari total kejadian bencana di Indonesia. Dari total bencana hidrometeorologi, yang paling sering terjadi

adalah banjir (34,1 persen dari total kejadian bencana di Indonesia) diikuti oleh tanah longsor (16 persen). Meskipun frekuensi kejadian bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi) hanya 6,4 persen, bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama akibat gempa bumi yang diikuti tsunami di Provinsi NAD dan Sumut tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi besar yang melanda Pulau Nias, Sumut pada tanggal 28 Maret 2005. Pada tahun 2005, Indonesia menempati peringkat ke-7 dari sejumlah negara yang paling banyak dilanda bencana alam (ISDR-UNESCO, 2009). Korban dan kerugian yang timbul akibat bencana tersebut sangat besar. Sebagai contoh, bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada bulan Desember 2004

yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 165.708 orang dan kerugian sebesar Rp 48 triliun. Sementara gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terjadi pada bulan Mei 2006 yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 5.716 orang, rumah rusak sebanyak 156.162 dan kerugian ditaksir sebesar Rp 29,1 triliun.

Tingginya korban dan kerugian akibat bencana, antara lain disebabkan karena masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kebencanaan. Padahal media informasi saat ini telah banyak tersedia. Namun sayangnya, di daerah-daerah yang rawan bencana tersebut, informasi yang relevan justru tidak tersedia atau tidak terdistribusikan dengan baik.

Salah satu jenis media yang terbukti mampu menjadi sumber informasi masyarakat adalah radio komunitas. Radio Komunitas merupakan salah satu jenis media komunikasi elektronik, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat (Komunitas) sendiri. Radio komunitas sebagai media yang dekat dengan komunitas karena dikelola dan diperuntukkan oleh warga komunitasnya menjadi penting untuk terlibat dalam penanganan bencana, termasuk penanggulangan resiko bencana. Keterlibatannya tentu dalam hal memberikan layanan peringatan (*public awarness*) atas potensi bencana dan penanganannya kepada warga komunitasnya, melalui radio komunitas. Upaya pengelolaan bencana oleh radio komunitas telah dilakukan sejak gempa dan tsunami Aceh. Radio-radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia, telah melakukan berbagai aksi untuk menolong korban bencana. Mereka juga bertindak sebagai sumber informasi untuk meyalurkan bantuan, bahkan memberikan peringatan dini. Upaya pengelolaan bencana, khususnya dalam hal

Pengurangan Resiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) memerlukan partisipasi dari semua pihak. Warga masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan seharusnya memiliki informasi yang cukup. Radio komunitas sebagai media yang dekat dengan komunitas menjadi salah satu saluran yang dapat membantu masyarakat dalam hal DRR. Berdasarkan hal tersebut, paper ini ingin menjawab pertanyaan, *bagaimana peran media komunitas khususnya radio komunitas dalam DRR di Yogyakarta dan Jawa Tengah?*

Artikel ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah Juli- Desember 2010, dengan pendekatan kualitatif. Format penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* (Moleong, 2002). Fokus dan unit analisisnya adalah radio komunitas yang berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu Radio Komunitas Angkringan di desa Timbulharjo Sewon Bantul Yogyakarta dan Radio Lintas Merapi di Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah. Kedua radio komunitas tersebut dipilih karena terletak dilokasi bencana gempa bumi (Radio Angkringan) dan erupsi gunung berapi (Radio Lintas Merapi).

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dilakukan bertahap (*multistage* dan *multilevel*), dengan sampel purposif di mana beberapa sampel bisa mewakili pencarian data komunitas (Miles & Huberman, 1992). Teknik/metode yang dipakai meliputi: dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*), Dokumentasi dan studi pustaka digunakan untuk memperoleh data skunder. Data-data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini. Dari hasil analisis dan pengolahan data tersebut diharapkan akan dihasilkan sebuah kesimpulan mendalam serta sistematis yang diharapkan dapat menjawab persoalan-

persoalan yang diajukan dalam penelitian ini.

Sistematika pemaparan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: bagian pertama memuat pengantar dan metode pengumpulan dan analisis data, bagian kedua memuat kerangka teori pengurangan resiko bencana dan media komunitas, bagian ketiga berisi tentang pembahasan, dan terakhir penutup.

2. Bencana, *Disaster Risk Reduction* dan Media Komunitas

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Adapun ancaman bencana di Indonesia dapat berupa gempa bumi dan tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi, wabah dan kejadian luar biasa, kegagalan teknologi dan kerusakan sosial. Menurut Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009 yang dirumuskan melalui kerjasama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (2006), faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

- ➔ Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*)

- ➔ Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
- ➔ Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat

Selama ini terdapat anggapan bahwa pengelolaan bencana adalah tugas dari pemerintah. Pendekatan top-down ini terlalu mengabaikan sumber daya lokal yang mungkin memiliki potensi untuk membangun pencegahan bencana atau program pemulihan. Namun dalam beberapa kasus, jenis pendekatan ini juga meningkatkan kerentanan masyarakat lokal risiko bencana. Oleh karena itu, paradigma harus dirubah dari penanggulangan bencana menuju pengurangan risiko bencana.

Paradigma Pengurangan Resiko Bencana tercermin dari definisi bencana alam itu sendiri. Menurut UU No. 24 tahun 2007, bencana alam dipahami sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya resiko bencana dimengerti sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) merupakan suatu pendekatan praktis sistematis untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana (Pardeep (et.al), 2004). Tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-

kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Caranya adalah dengan mengenali karakteristik ancaman/bahaya (*hazard*) dan resikonya, mengubah kerentanan (*vulnerability*) menjadi peningkatan kapasitas, dan kesiapsiagaan dini melalui Early Warning System (EWS). Perubahan menuju paradigma pengelolaan bencana tersebut setidaknya mencakup tiga aspek berikut ini;

- 1) penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko;
- 2) perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
- 3) penanganan bencana (termasuk penanggulangan resiko bencana) berbasis masyarakat.

Pengalaman bencana dan kebencanaan di Indonesia yang menelan korban, umumnya terjadi karena timbulnya kepanikan warga akibat minimnya informasi. Isu tsunami yang muncul pasca gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta, menimbulkan korban yang cukup banyak. Menurut cerita dan pengakuan warga, beberapa korban gempa sebenarnya masih dapat tertolong jika pada saat itu segera mendapat pertolongan. Namun isu tsunami yang muncul menyebabkan warga yang selamat takut dan melarikan diri, sehingga korban gempa tidak segera mendapat pertolongan.

Menurut Parni Hadi (2010), dampak bencana dapat dikurangi bahkan dihindari jika tersedia informasi yang akurat, tepat, bermanfaat dan terkomunikasikan dengan cepat. Di samping alat komunikasi canggih seperti HP dan internet, yang dapat menyampaikan informasi secara cepat, radio terbukti masih menjadi andalan utama dalam mitigasi bencana, mulai dari

peringatan dini, ketika terjadi bencana dan pasca bencana, terutama di daerah-daerah terpencil/tertinggal ketika listrik mati atau bahkan belum tersedia. Dalam konteks pengurangan resiko bencana, pemanfaatan radio, khususnya radio komunitas memainkan peran penting.

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, radio komunitas merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Komunitas. Secara sederhana, lembaga penyiaran komunitas adalah media yang dimiliki dan dikelola oleh komunitas untuk melayani kebutuhan komunitas itu sendiri. Pendeknya, media komunitas adalah media dari, oleh, dan untuk komunitas. Sedangkan pengertian komunitas adalah sejumlah orang yang mencoba membangun kehidupan bersama dan saling mengenal. Mereka bersama karena disatukan oleh kedekatan wilayah atau oleh kepentingan yang sama, meski tempat tinggalnya berjauhan.

Prinsip penciptaan ruang publik (*public sphere*) sebagaimana yang dicita-citakan oleh Habermas (1989) merupakan dasar berdirinya media komunitas. Media memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk mengekspresikan pendapatnya kepada banyak kalangan. Media juga memudahkan interaksi dalam sebuah komunitas, oleh komunitas, untuk komunitas itu sendiri. Proses ini mungkin mudah diimplementasikan di media cetak, yang praktis tidak menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Pada media radio dan televisi, cerita menjadi lain, karena menggunakan sumber daya alam yang terbatas, yaitu frekuensi. Frekuensi dalam dunia penyiaran sebagai ranah publik yang terbatas yang harus dikelola berdasar prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman isi (*diversity of content*).

Sebuah radio bisa disebut sebagai radio komunitas jika memenuhi beberapa

persyaratan berikut (Nasir, 2002), yaitu menempatkan komunitas sebagai pelaku utama; komunitas berpartisipasi dalam merencanakan, mengelola dan menilai berbagai kegiatan dalam radio komunitas; membangun komunikasi interaktif ; keberpihakan kepada kelompok marjinal. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka radio komunitas dapat menjalankan peran strategis dalam proses penguatan komunitas, diantaranya: 1). Mencerminkan dan mendukung identitas lokal, 2) Mendorong dialog terbuka dan interaktif, 3). Mendorong partisipasi warga, 4). Melayani kebutuhan informasi, 5). Memberikan suara kepada mereka yang tak memiliki suara.

Kebebasan berekspresi dan peningkatan akses informasi bagi warga yang terkena dampak bencana, termasuk kelompok marginal dan rentan, merupakan pilar penting dari pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan manajemen bencana. Terkait dengan hal itu, dalam bidang informasi implementasi DRR dapat dilaksanakan dalam 3 tahap (Said, 2009), yaitu sebelum, ketika dan setelah terjadi bencana. Pada saat sebelum terjadi bencana media informasi seperti radio dapat membuat program informasi berupa: Informasi mitigasi bencana (informasi mitigasi bencana, prediksi dan data mengenai bencana yang mungkin terjadi), Informasi penyelamatan menghadapi bencana (informasi mengenai aktifitas pertolongan pertama apa yg harus dilakukan masyarakat ketika ada bencana), Informasi dan diskusi ilmiah tentang kebencanaan (misalnya diskusi pakar untuk mengembangkan program pengurangan resiko bencana).

Pada saat terjadi bencana, radio komunitas dapat menyiarkan program informasi berupa: Allert atau Signal Bencana yang bertujuan memberitahukan signal kebencanaan atau informasi mengenai

bencana yang akan segera sampai di suatu lokasi, misalnya tsunami yang akan terjadi beberapa menit menjelang gempa, datangnya angin topan yang menuju wilayah tertentu, datangnya serombongan hama ke wilayah tertentu dan lain sebagainya. Selain itu, radio komunitas bekerjasama dengan lembaga terkait, dapat menginformasikan komando evakuasi pada saat bencana. Ini akan dapat mencegah kepanikan dan mengurangi evakuasi bencana yang salah karena ketiadaan informasi.

Sedangkan setelah bencana terjadi, peran radio komunitas dapat membuat program informasi berupa penjelasan tentang peta masalah dan pemerataan logistik bantuan. Berupa informasi tentang kerusakan yang timbul dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Program ini dapat dilaksanakan secara interaktif dengan pendengar. Selain itu, untuk pemulihan mental dan ekonomi, informasi dan siaran yang memberi motivasi dan mendorong masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan terhindar dari ketergantungannya terhadap bantuan. Info lapangan kerja akan sangat membantu para korban untuk segera pulih dan mandiri. Terakhir, program penggalangan dana bagi korban bencana berupa ajakan kepada masyarakat agar dapat membantu korban bencana.

3. Hidup bersama Bencana: Kisah Radio Komunitas Angkringan dan Radio Komunitas Lintas Merapi

Di seluruh dunia terdapat lebih dari 20.000 stasiun radio dan lebih dari dua miliar pesawat radio (Fraser & Restrepo, 2001). Menurut data dari Combine (2010) saat ini terdapat lebih dari 600 radio komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai radio komunitas yang sebagian besar berbasis di wilayah-wilayah pinggiran dan pedesaan.

Sementara itu, di berbagai pelosok negeri, radio komunitas lahir sebagai wujud aspirasi masyarakat akan kebutuhan informasi.

Radio komunitas telah banyak memainkan peran dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis. Cerita mengenai peran mereka, sudah banyak terdengar dan dicatat oleh para ahli (Wijoyono (et.al), 2006:66-67), salah satunya dalam pengurangan risiko bencana. Peran penting radio komunitas dalam pengurangan risiko bencana terletak pada tiga hal yaitu: Sebelum bencana terjadi, Pada saat bencana terjadi, Setelah bencana terjadi. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana peran radio Angkringan dan Radio Lintas Merapi dalam pengurangan risiko bencana.

Saat terjadi bencana gempa bumi tahun 2006, radio Angkringan tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai media informasi kepada komunitasnya. Studio yang digunakan untuk siaran rusak berat dan peralatan siaran tidak bisa digunakan. Sadar akan fungsi rakom sebagai media informasi komunitas, pegiat rakom Angkringan segera bergerak cepat untuk mengupayakan agar rakom dapat segera bersiaran meski dengan peralatan seadanya. Halaman rumah salah seorang pegiat radio tersebut dipilih sebagai studio darurat, walaupun rumah tersebut rusak akibat gempa.

Menggunakan peralatan siaran yang dirakit secara sederhana pegiat rakom Angkringan mencoba semaksimal mungkin untuk segera melakukan aktifitasnya, baik memberikan informasi atau sebagai media hiburan. Bagi pegiat rakom saat pasca bencana masyarakat memerlukan berbagai macam informasi baik berkaitan dengan bantuan maupun kebijakan.

Kebetulan semua personel radio komunitas angkringan ini menjadi korban, itu kita mensikapinya secara pribadi masing-masing personil itu, mereka tidak langsung aktif di radio,

tapi mereka langsung carii info dinama bisa mendapatkan bantuan logistik, agar warga sekitar ini bisa melanjutkan hidupnya. Dalam artinya mereka bisa melakukan tanggap darurat, walaupun itu baru dalam skala kecil (Wawancara dengan Jaswadi, Koordinator Radio Angkringan periode 2005-2010, 18 Oktober 2010)

Pasca terjadinya gempa bumi, masyarakat memerlukan bantuan untuk melangsungkan hidupnya. Persoalannya, warga tidak memiliki informasi, dimana dan siapa yang mampu memberikan bantuan. Pihak donatur juga mengalami kebingungan, kehe mana bantuan akan disalurkan. Listrik yang padam selama sebulan pasca terjadinya bencana, menyebabkan arus informasi bantuan tidak berjalan lancar. akibatnya, bantuan salah sasaran atau menumpuk di gudang, adalah fenomena yang lazim terjadi saat ini. Radio Angkringan yang memiliki perangkat dan relasi dengan pihak luar, membantu masyarakat dengan menyebarkan informasi terkait dengan bantuan atau kebijakan pemerintah. Selain menginformasikan sumber bantuan rakom angkringan juga memberikan gambaran tentang penyebaran bantuan yang ada di lingkungan Desa Timbulharjo. Sebagai media hiburan, pasca bencana tersebut radio Angkringan menyiarkan siaran hiburan berupa siaran lagu, atau obrolan santai penuh canda. Selain itu, secara bergiliran, radio angkringan menyelenggarakan nonton bareng piala dunia di lokasi pengungsian. Upaya ini tentu saja mendapat sambutan hangat dari para pengungsi.

Sementara itu di lereng Gunung Merapi, Radio Komunitas Lintas Merapi bahu membahu memantau aktivitas gunung tersebut. Pengelola Radio ini secara terus menerus menyampaikan perubahan

yang terjadi di gunung tersebut kepada masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Radio Lintas Merapi bersiaran mulai pukul 17.00 wib sampai selesai. Pada jam-jam tersebut, siaran radio akan diisi dengan siaran lagu atau saling berkiriman pesan antara sesama pendengar. Program ini adalah program favorit warga sekitar. Menurut Sukiman, jumlah pesan yang masuk setiap kali siaran bisa mencapai ratusan. Hal ini menandakan antusiasme masyarakat yang tinggi.

Selama siaran dan berkiriman pesan, penyiar radio Lintas Merapi tidak lupa menyelipkan informasi tentang kewaspadaan terhadap kondisi gunung Merapi. Menurut Sukiman, cara ini dinilai lebih efektif daripada membuat siaran berita mengenai Merapi.

Pada saat siaga, waspada dan awas juga seperti itu, tetap dengan sajian hiburan tetapi informasi mengenai keadaan gunung di seringkan. Pada saat awas-pun kita selalu menginformasikan keadaan gunung, misalnya soal "telah terjadi guguran Material" mohon warga tetap siaga dan jangan panik. Itu kata-kata yang selalu diselipkan (Wawancara dengan Sukiman, Koordinator Radio Komunitas Lintas Merapi 4 Oktober 2010).

Sebagai sumber informasi, radio Lintas Merapi senantiasa menyosialisasikan tindakan yang harus dilakukan oleh warga saat terjadi erupsi. Pada saat Gunung Merapi berstatus awas, radio berperan dalam mengelola, siapa saja yang harus menghindari wilayah mana, siapa yang diungsikan dulu, siapa yang berperan untuk berkomunikasi menggunakan radio komunikasi 2-arah (handy talkie), siapa yang melakukan pemantauan, siapa yang tetap bertahan di desa dan melakukan

ronda. Melalui informasi yang disiarkan secara periodik ini, diharapkan warga selalu waspada dan pada gilirannya mampu menekan jumlah korban akibat erupsi Merapi.

Selain aktivitas on-air, radio Lintas Merapi memiliki kegiatan off-air. Kegiatan-kegiatan ini dirancang agar warga sekitar tetap waspada terhadap ancaman erupsi Merapi. Salah satunya adalah dengan mendirikan KANCING (Kelompok Anak Cinta Lingkungan). Kancing saat ini beranggotakan 39 orang anak-anak usia sekolah Dasar dan SLTP. Kegiatan utama KANCING umumnya berkaitan dengan upaya penyadaran akan kelestarian lingkungan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan menanam pohon jambu biji sebagai sumber makanan kera liar pada 21 Desember 2009 (Wawancara dengan Paiman alias Koprul, Koordinator KANCING, 24 November 2010).

Untuk melestarikan kebudayaan, radio Lintas Merapi secara berkala menyiarkan siaran wayang kulit atau karawitan, baik secara langsung atau rekaman. Dalam siaran tersebut, pesan agar selalu waspada terus menerus disampaikan. Penggunaan bahasa dan istilah lokal sebagai pengganti istilah teknis dalam siaran tersebut menjadikan siaran tersebut sangat diminati oleh pendengar. Dengan demikian pendengar selalu siap dan siaga dalam menghadapi ancaman bencana.

4. Sinergi masyarakat dalam Disaster Risk Reduction melalui Radio Komunitas

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 2, pengurangan resiko bencana merupakan bagian dari pengelolaan bencana yang mencakup tiga aspek yaitu penanganan bencana secara holistik, perlindungan masyarakat dari

ancaman bencana dan penanganan bencana berbasis masyarakat. Terkait dengan hal itu, dalam bidang informasi implementasi DRR dapat dilaksanakan dalam 3 tahap (Said, 2009), yaitu sebelum, ketika dan setelah terjadi bencana.

Mencermati apa yang telah dan terus dilakukan oleh radio komunitas Angkringan dan Lintas Merapi, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan bencana, khususnya yang terkait dengan pengurangan resiko bencana, telah dilaksanakan secara baik. Informasi yang benar yang disampaikan pada saat yang tepat, akan membantu pengelolaan bencana berjalan lancar.

Sebelum terjadi gempa bumi tahun 2006, masyarakat desa Timbulharjo tidak pernah mendapat sosialisasi dan pemahaman bahwa wilayah desa mereka berada di daerah yang rawan bencana. Minimnya pengalaman bencana yang dimiliki oleh warga desa Timbulharjo, berdampak pada besarnya kerugian akibat bencana gempa bumi. Radio Angkringan sebagai saluran informasi warga Timbulharjo, tidak mampu memberikan peringatan ketika gempa bumi terjadi pada dini hari tanggal 27 Mei 2006. Meski demikian, pengalaman mengorganisir diri terbukti membantu kru radio Angkringan dalam mengelola bantuan, bahkan menjadi mediator ketika terjadi penyalahgunaan bantuan. Dengan bantuan Radio Angkringan, korban gempa berhasil mendapatkan hak, sekaligus menyuarakan pendapatnya. Pada titik inilah, public sphere yang diidamkan Habermas tercipta, yaitu ketika warga berhasil mewujudkan masyarakat komunikatif tanpa dominasi. Habermas melihat translasi sosiologi tentang teori demokrasi menunjukkan bahwa keputusan yang mengikat dan sah harus dikemukakan oleh arus komunikasi yang mengalir dari pinggiran dan melewati saluran yang demokratis dan konstitusional yang ditempatkan pada pintu masuk

kompleks parlemen atau pengadilan (Habermas, 1996).

...the public sphere is not conceived simply as the back room of the parliamentary complex, but as the impulse-generating periphery that surrounds the political center: in cultivating normative reasons, it affects all parts of the political system without intending to conquer it. Passing through the channels of general elections and various forms participation, public opinions are converted into a communicative power that authorizes the legislature and legitimates regulatory agencies, while a publicly mobilized critique of judicial decisions imposes more intense-justificatory obligations on a judiciary engaged in further developing the law.

Sebaliknya, karena berada di lokasi yang rawan bencana gunung meletus, Radio Lintas Merapi telah melatih warga Desa Sidorejo untuk selalu waspada. Setiap perubahan alam yang terjadi di gunung Merapi, terus dipantau dan di kabarkan kepada warga desa. Dengan demikian, warga terhindar dari kerugian akibat bencana. Secara periodik, berbagai upaya peningkatan kewaspadaan dilakukan oleh kru Lintas Merapi secara online maupun program off line. Hasilnya, ketika terjadi letusan Merapi pada tahun 2010, seluruh warga desa Sidorejo tahu apa yang harus dilakukan, termasuk hapal rute evakuasi darurat. Tak heran jika dalam peristiwa letusan tahun 2010, seluruh warga desa Sidorejo berhasil selamat tak kurang suatu apapun.

5. Penutup

Keberadaan radio komunitas secara hukum telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan diperdalam di Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Berdasarkan aturan hukum tersebut, maka tak ada alasan lagi untuk mengesampingkan peran radio komunitas dalam mewujudkan demokratisasi, termasuk dalam pengurangan risiko bencana.

Dari beberapa pengalaman pengelola radio komunitas yang disampaikan, dapat dipahami bahwa sebenarnya radio komunitas telah memiliki posisi yang cukup kuat di masyarakat. Menurut Prof. Ir. Sarwidi keberadaan radio komunitas dalam usaha pengurangan risiko bencana sangat penting dalam setiap tahap penanggulangan bencana, seperti sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana.

Radio komunitas berfungsi sebagai salah satu sumber informasi, termasuk dalam hal kebencanaan. Karakter radio komunitas yang akrab dan dekat dengan pen-dengarnya menjadikan informasi yang disampaikan oleh radio ini lebih mengena. Dengan demikian, pendengar akan selalu waspada dan siaga dalam menghadapi bencana. Ke depan, peran ini hanya perlu diperkuat dan dipublikasikan secara lebih luas kepada masyarakat. Tak hanya dengan kegiatan on-air, sebuah radio pun juga bisa memanfaatkan kegiatan off-air untuk mengembangkan pendidikan kebencanaan kepada warganya.

Daftar Pustaka

- Birowo, Mario Antonius, *Community Radio Movement in Indonesia: A Case Study of Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (Yogyakarta Community Radio Networks)*, Paper presented in Media: Policies, Cultures and Futures in the Asia Pacific Region Conference, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, 27-29 November 2006.
- Faser, Colin dan Restrepo, Sonia, *Buku Panduan Radio Komunitas*, UNESCO Jakarta Office, 2001.
- Gazali, Effendi (ed) , *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Indonesia, 2003
- Habermas, Jürgen (1989), *The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of Bourgeois society*. Translated by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence. Introduction by Thomas McCarthy. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen (1996), *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, MA: The MIT Press, hal 356.
- Haifani, Akhmad Muktaf, *Manajemen Resiko Bencana Gempa Bumi: Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 27 mei 2006*, Proceeding Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta, 25-26 Agustus 2008 ISSN 1978-0176
- Hill, David T., *Media Culture and Politics in Indonesia*, Oxford University Press, 2000
- Masduki, *Jurnalistik Radio*, LKIS, Yogyakarta 2001
- Miles, Matthew b. & A. Michel Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Moleong, Lexy, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya.
- Nasir, Akhmad, *Mengenal Radio Komunitas*, makalah tidak dipublikasikan, 2002
- Olle, John, 'Sex, Money, Power', *Inside Indonesia*, No. 61 Januari – Maret 2000, www.insideindonesia.org/edit60/jolle1htm dan Margaret Cohen, 'Fastest Gun in the East', *Far Eastern Economic Review*, 25 Maret 1999.
- Rahmawati, Yunita, *Radio Komunitas sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Skripsi tidak dipublikasikan, UNS, 2003:9
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, 2000, The McGraw-Hill Companies, USA.
- Sahni, Pardeep., Ariyabandu, Madhavi Malalgoda, *Disaster Risk Reduction in South Asia*, PHI Learning Pvt. Ltd, 2004.
- Said, A Ismail, *Radio based Disaster Risk Reduction*, slide presentasi Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Radio, 17 September 2009
- Siebert, F.S., T. Peterson, W. Schramm. *Four Theories of the Press*. (1956). Urbana, Chicago, London: University Of Illinois State
- Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- — — — —, *Benturan Tiga Paradigma: Catatan Kritis atas UU Penyiaran*, Kompas, Senin, 25 November 2002

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009, kerjasama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, 2006

Partnerships for Disaster Reduction-South East Asia Phase 4, *Monitoring and Reporting Progress on Community-based Disaster Risk Management in Indonesia*, Kolaborasi antara Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan the Disaster Preparedness of the European Commission Humanitarian Aid Department (DIPECHO), April 2008

Komisi Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dalam Lokakarya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Melalui Radio Komunitas di Radio Komunitas Lintas Merapi, Deles, Sidorejo, Kemalang, Klaten (4/8/2009).

Link:

Hadi, Parni, *Mengurangi Risiko Bencana Melalui Radio*, <http://www.antaranews.com/berita/1288947395/mengurangi-risiko-bencana-melalui-radio>

<http://combine.or.id>

http://wiki.kombinasi.net/index.php/Rekam_Jejak_Jalin_Merapi , diakses 31 November 2010

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH DAN PENELITIAN SOSIAL DILEMA SOSIOLOGI

Jurnal Ilmiah dan Penelitian Sosial DILEMA (Dialektika Masyarakat) SOSIOLOGI menerima naskah Ilmiah berupa hasil penelitian atau artikel dalam bidang Ilmu Sosiologi. Adapun pedoman penulisan naskah adalah :

1. Naskah belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media publikasi lainnya.
2. Naskah diketik pada kertas HVS ukuran A4/kwarto, dengan jarak 1,5 spasi, font 12 (margin : atas – bawah – kanan 3 cm, kiri 4 cm), disket disertakan.
3. Judul naskah seluruhnya ditulis dengan huruf besar dilengkapi dengan judul dalam bahasa Inggris. Di bawah judul ditulis nama para penulis (tanpa gelar), dan tambahkan catatan kaki tentang instansi dan jabatan penulis.
4. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris untuk naskah berbahasa Indonesia dan sebaliknya (maksimum 250 kata).
5. Sistematika penulisan naskah terdiri atas :
 - a. Hasil Penelitian : Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Ucapan Terima Kasih (kalau ada), Daftar Pustaka.
 - b. Artikel : Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, Daftar Pustaka.
6. Penulisan daftar pustaka berpedoman pada contoh berikut :
 - a. Terbitan Berseri :

Leibo, Jefta. 2003. Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Timur Indonesia, Wanodya, Jurnal Ilmiah Penelitian Kajian Wanita dan Gender, No. 15 Tahun XIII, 51 – 55.
 - b. Buku :

Kuhn, Thomas. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. (1st and 2nd ed). University of Chicago Press. Chicago.
 - c. Makalah Seminar :

Haryono, Bagus. (2004, Oktober). Menemukan Model Kontrol Sosial yang Efektif. Makalah disajikan dalam Seminar Hasil Penelitian Dosen Muda. Surakarta.
 - d. Tulisan yang tidak dipublikasikan :

Utami, Trisni. 1994. Pola Adaptasi dalam Penerimaan Inovasi pada Sistem Pertanian Peladangan di Daerah Transmigrasi Rajawajitu Lampung Utara. Tesis (S2) yang tidak dipublikasikan. Program Studi Ekologi manusia. Universitas Indonesia. Jakarta.
7. Redaksi berhak mengubah naskah dengan tidak mengurangi pokok isi tanpa ijin penulis.

Demikian syarat penulisan yang harus ditaati setiap calon penulis. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.